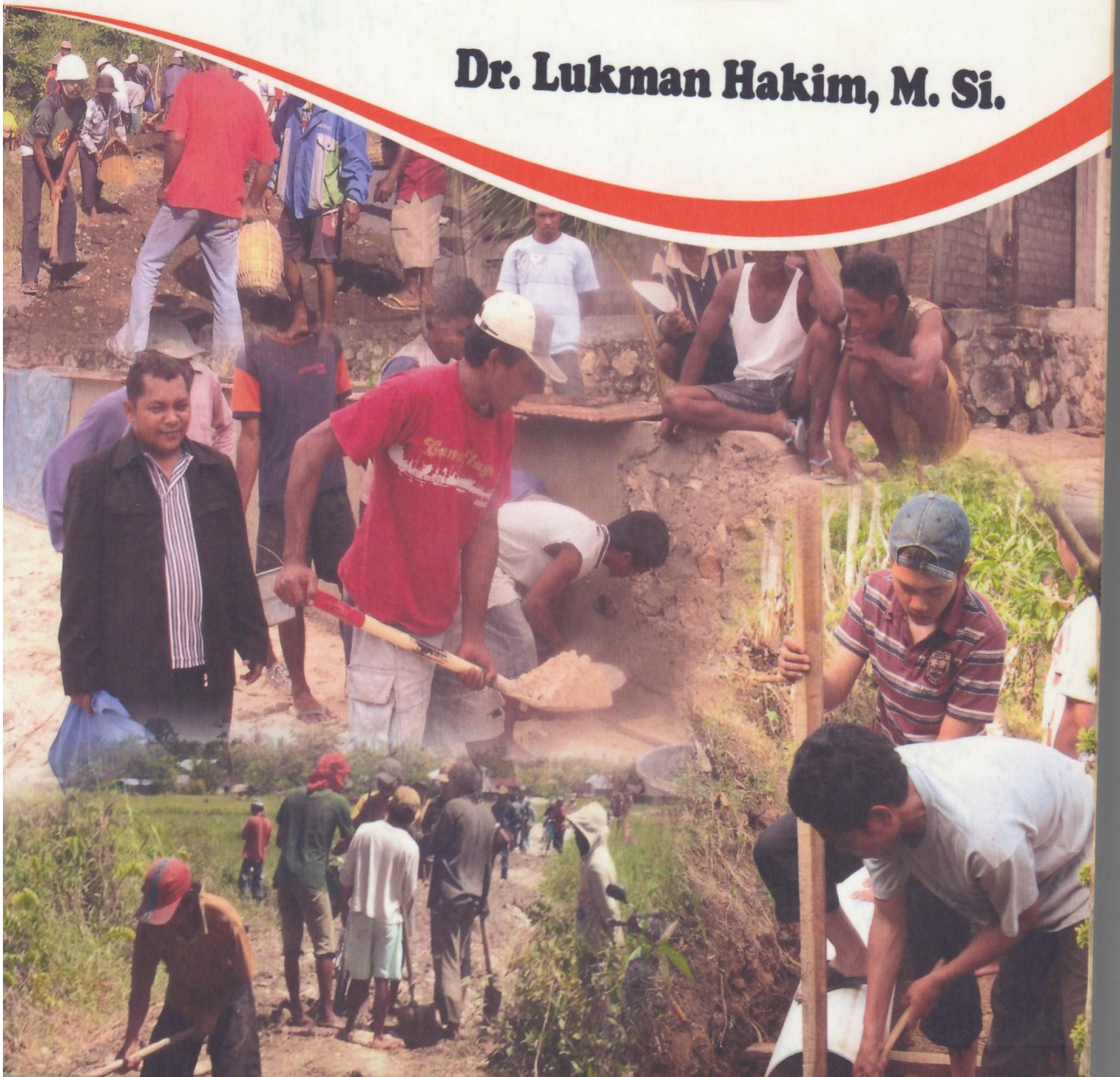


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sketsa Teori dan Pendekatan

Dr. Lukman Hakim, M. Si.



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sketsa Teori dan Pendekatan

Editor : Andi Hasrianti, S.S, M.Pd
Desain Sampul : Nasrun, S.Pd, M.Pd
Setting & Lay Out Isi:

**Diterbitkan oleh: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Dicetak oleh CV. Berkah Utami
Jl. Sultan Alauddin No. 121-123 Ruko Permatasari Makassar 90221
Telp. dan Fax (0411) 868688
e-mail:
Anggota Ikapi

Cetakan Pertama: Maret 2010
ISBN 978-602-96743-2-3
Isi 212 Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Konsep Pemberdayaan
- B. Tujuan Pemberdayaan
- C. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan
- D. Strategi Pemberdayaan

BAB II FENOMENA KEMISKINAN

- A. Pengertian Kemiskinan
- B. Ciri-Ciri Penduduk Miskin
- C. Penyebab Kemiskinan
- D. Pemberdayaan dalam Penanggulangan Kemiskinan

BAB III PENDEKATAN PEMBERDAYAAN

- A. Penguatan Kelembagaan
- B. Penguatan Kelompok
 - 1. Kelompok dalam Masyarakat Pedesaan
 - 2. Dinamika Kelompok
 - 3. Interaksi Sosial dalam Kelompok
 - 4. Kelompok Sebagai Media Pemberdayaan
 - 5. Pengembangan Usaha Kelompok
 - 6. Pengembangan Jaringan Kerja
 - 7. Manfaat Kerjasama dalam Kelompok
 - 8. Pelatihan Kelompok
- C. Pengembangan Partisipasi

BAB IV PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL

- A. Pengembangan Kepribadian
- B. Pengembangan Modal Sosial
- C. Penguatan Lingkungan Sosial
 - 1. Norma dan Nilai Budaya
 - 2. Peran Pemimpin Informal
- D. Peningkatan Produktivitas Kerja

BAB V DUKUNGAN FAKTOR EKSTERNAL

- A. Sumber Daya Alam
- B. Akses Permodalan
- C. Akses Pada Informasi

BAB VI KASUS-KASUS PEMBERDAYAAN

- A. Pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - 1. Pengembangan Fungsi-Fungsi Keluarga
 - 2. Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya
- B. Program Layanan Khusus Pendidikan Anak Nelayan
 - 1. Tujuan Pemberdayaan
 - 2. Bentuk Pemberdayaan
 - 3. Tahapan Pelaksanaan Program
- C. Pemberdayaan Petani Sayuran
 - 1. Sasaran Pemberdayaan
 - 2. Strategi Pemberdayaan
- D. Pemberdayaan Petani IP Padi 400
 - 1. Pendekatan Pemberdayaan
 - 2. Jenis-jenis Kegiatan
 - 3. Target yang Akan Dicapai

- E. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
 - 1. Bentuk Pemberdayaan
 - 2. Metode *Participatory Rural Appraisal dan Rapid Rural Appraisal*

- F. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar
PT Aneka Tambang Pongkor

BAB VII PENUTUP

Daftar Pustaka

Riwayat Hidup Penyusun

DAFTAR TABEL

Tabel 1. *Hyothetical Minimum Needs.*

Tabel 2. Perbandingan Standar Kemiskinan

PENGANTAR

Pentingnya upaya pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang masih banyak didominasi oleh penduduk miskin, masyarakat dengan kualitas hidup rendah, pengangguran dan masyarakat terbelakang/tertinggal, dimaksudkan agar mereka memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses dan menikmati kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga mereka mengalami peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial.

Kondisi kehidupan masyarakat dalam kungkungan kemiskinan tersebut di dasarkan pada suatu kenyataan bahwa pembangunan dalam dua dasawarsa terakhir telah menimbulkan permasalahan mendasar karena paradigma pembangunan selama ini bersifat sentralistik dan instruktif. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah dicanangkan dan digerakkan dalam menanggulangi kemiskinan nampaknya masih perlu dirancang dengan baik agar mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan agar mampu menumbuhkan prakarsa yang kuat dan tumbuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dominasi pemerintah yang begitu kuat mulai dari pemerintah pusat hingga ketingkat kelurahan dan desa dalam mengatur program PNPM mengakibatkan keberhasilan program yang dicapai kurang mengakar pada kekuatan masyarakat sebagai basis berkembangnya ekonomi pedesaan. Pendekatan pembangunan yang terpusat terkesan dapat mempersempit ruang gerak dan kreatifitas bagi tumbuh dan berkembangnya keswadayaan masyarakat.

Realitas tersebut juga pernah diungkapkan dalam hasil kajian sebuah tim yang dipimpin oleh Sarman dan Sayogyo (2000) terutama dalam kasus program pengentasan kemiskinan. Hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwa fokus perhatian program untuk mengentaskan kemiskinan, baru sebatas mempersoalkan seberapa banyak kelompok sasaran yang berhasil dibentuk dan seberapa besar jumlah dana yang berhasil dikucurkan kepada kelompok sasaran tersebut. Dengan kata lain bahwa program tersebut belum sampai menjangkau pada persoalan efektifitas program dalam mendorong

kelompok sasaran keluar dari kondisi kemiskinan. Ilustrasi tersebut pernah pula ditemukan dalam penelitian model pengembangan usaha masyarakat pesisir oleh tim peneliti LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar bersama Balitbangda Sulawesi Selatan, bahwa macetnya kredit yang diberikan melalui program pemberdayaan masyarakat nelayan disebabkan karena kurangnya kesiapan kelompok sasaran untuk menggunakan kredit dan kesiapan mengembalikan kredit yang ditawarkan oleh mitra perbankan seperti koperasi nelayan. Hal ini disebabkan karena lebih mengejar target banyaknya orang yang dibantu, bukan lebih mengutamakan dampak agar kemandirian dan parakarsa dapat tumbuh dan menolong keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan kenyataan dan pengalaman tersebut maka di dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan reorientasi pendekatan pelaksanaan program melalui perubahan paradigma dari yang sentralistik dan instruktif menjadi desentralistik dan persuasif edukatif. Inti pokok dari paradigma ini adalah program dirancang dan dilaksanakan oleh dan bertumpu pada kekuatan masyarakat itu sendiri. Seharusnya pemerintah lebih memberikan ruang partisipasi lebih luas kepada rakyat sebagai *end user* kebijakan publik sehingga tidak menyebabkan matinya inovasi dan kreasi rakyat untuk memahami kebutuhannya melalui proses pembangunan. Oleh sebab itu perlu mengadopsi konsep pemberdayaan yang dipercayai mampu menjembatani partisipasi rakyat dalam proses pembangunan. Pemberdayaan ditantang untuk dapat menumbuhkan kembali inovasi dan kreativitas rakyat

Pentingnya pemberdayaan tidak terlepas pula dari kondisi kehidupan masyarakat yang mendambakan hidup sejahtera yakni kehidupan yang akan datang lebih baik dari kehidupan sekarang. Dalam masyarakat yang sudah terlalu lama menyandang kondisi kemiskinan dan ketertinggalan perlu dibantu agar dapat keluar dari *syndrome* dan perangkap yang melilitnya. Oleh sebab itu *community development* dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang merupakan sinergi antara potensi internal dan bantuan eksternal untuk membawa masyarakat keluar dari *syndrome* dan perangkap tersebut

Potensi internal perlu dibangun dan ditumbuh kembangkan bagi setiap individu maupun kelompok. Potensi yang dimaksud adalah potensi kepribadian seperti membangun semangat kerja, ketekunan dan harga diri. Pemberdayaan yang berorientasi pada pengembangan usaha individu atau usaha kelompok agar hidupnya lebih baik perlu didukung oleh semangat kerja yang tinggi, keuletan dalam bekerja, mampu mengembangkan kreativitas dan rasa percaya diri agar dapat berhasil. Sedangkan bantuan yang bersifat eksternal seperti bantuan pendanaan program melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) lebih diharapkan sebagai stimulan, pendorong untuk membangkitkan potensi dan sumber daya dalam komunitas. Oleh sebab itu keterlibatan pihak eksternal dijaga agar tidak menimbulkan ketergantungan, melainkan justru menumbuhkan keberlanjutan dari program yang dijalankan. Proses pemberdayaan masyarakat yang benar adalah apabila masyarakat yang tadinya kurang berdaya dan statis kemudian berubah menjadi berdaya dan dinamis, tetap dapat mempertahankan kedinamisannya tersebut walaupun bantuan pihak eksternal dihentikan.

Pembahasan tulisan ini berfokus pada pendekatan proses dalam memahami dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Misalnya perlunya pendekatan kelompok. Setiap individu dalam masyarakat perlu didorong untuk mengembangkan terus kegiatan kelompok agar lebih dinamik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga mempunyai kesadaran dan kekuatan penuh untuk membentuk hari depannya.

Pemberdayaan melalui kelompok setiap individu dapat memenuhi sebagian kebutuhannya yang tak dapat dipenuhi sendiri dengan cara bekerjasama dengan orang lain. Dengan demikian setiap individu tetap berada dalam kelompok sepanjang mereka masih percaya bahwa menjadi bagian dari kelompok tetap lebih menguntungkan dibanding meninggalkannya. Melalui kelompok, seseorang dapat pula mengalami proses pembelajaran serta berbagi gagasan dan perasaan dalam menentukan tujuan kelompok, fungsi tugas dan mengembangkan kelompok.

Di dalam kelompok, dapat membina kekompakan serta dapat bekerjasama dalam membuat keputusan maupun kerja yang tak dapat ditangani sendiri.

Melalui kelompok diharapkan pula mampu meningkatkan produktivitas kerjanya dengan meningkatkan hasil kerja dan memanfaatkan sumber daya dan energi secara efisien. Produktivitas kerja akan meningkat dengan tingkat pemanfaatan sumber daya yang efisien jika didukung oleh kemampuan kelompok mengakses informasi yang sesuai, akurat dan tepat waktu. Faktor-faktor tersebut ikut menentukan keberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan usaha dan daya kreativitasnya.

Pengembangan kepribadian individu menjadi bagian pembahasan buku ini, semata-mata melihat perlunya membangun faktor *energi internal* dalam diri manusia sebagai sebuah kekuatan agar mereka dapat bertahan dari lingkungan kehidupan sosial. Demikian pula faktor eksternal seperti ketersediaan sumberdaya alam, akses modal dan akses informasi sebagai faktor pendukung yang dapat dikembangkan dalam proses pemberdayaan.

Pada akhir tulisan ini disajikan pula beberapa jenis kasus program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh penulis sendiri bersama tim LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar. Kasus tersebut merupakan instrumentasi dalam memperkaya pengalaman penulisan buku ini. Tulisan yang sempurna tidak akan terlihat dari pengalaman menelaah dan menekuni berbagai literatur, tetapi yang terbaik adalah kemauan menyampaikan antara hasil pembelajaran teoritis berbagai pustaka dengan pengalaman empiris melaksanakan program dari apa yang telah dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Hanya dengan demikian ilmu yang dipelajari punya arti dan bermanfaat. Semoga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *empower* yang makna sebenarnya adalah "*to give official authority or legal power, capacity, to make one able to do something*" (Sudiyanto, 2005). Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses kapasitas atau pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Dengan kapasitas maka seseorang akan memiliki kekuatan (*daya*) atau kewenangan yang diakui secara *official* atau *legal* sehingga orang tersebut tidak termarginalisasi lagi melainkan sadar akan harga dirinya, harkatnya, dan martabatnya. Dengan kapasitas seseorang akan memiliki kemandirian, tahan uji, pintar, jujur, berkemampuan kreatif, produktif, emansipatif, tidak tergantung, proaktif, dinamis, terbuka dan bertanggung jawab dalam mengatasi semua masalah dan menjawab tantangan untuk mencapai kemajuan.

Menurut rumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

Rumusan tersebut berbeda dengan definisi yang dirumuskan Christenson dan Robinson (1989) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal dilokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk merubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan atau lingkungan mereka. Definisi tersebut diartikan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, intervensi bukanlah merupakan hal yang mutlak, justru yang lebih penting adalah prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses yang berlangsung.

Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang menggambarkan tindakan bersama warga komunitas atas prakarsa dan partisipasi mereka guna mengembangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kehidupannya.

Perbedaan rumusan atau definisi tersebut mencerminkan penanganan dalam pembangunan masyarakat yang tidak terlepas dari dua strategi pembangunan yakni strategi pembangunan dari atas kebawah (*top down*) dan strategi pembangunan dari bawah keatas (*bottom up*).

Pada pendekatan pertama, model strategi pembangunan yang didominasi oleh intervensi dari atas ke bawah muncul dari dominasi peranan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan terkait program-program pembangunan kemasyarakatan. Hal ini didasari suatu asumsi bahwa dengan melalui strategi dari atas ke bawah dapat dilakukan kontrol yang tetap. Seperti dinyatakan oleh Bryant dan White (1982) kelihatan efisien baik dilihat dari segi waktu maupun dari energi yang dikeluarkan, dan dalam sejarah pembangunan desa di Indonesia pemerintah juga memegang peranan terpenting dan menggunakan strategi dari atas kebawah.

Pendekatan *top down* dalam pembangunan pedesaan di Indonesia, perkembangannya dapat dideskripsikan mulai dari zaman kolonial, pasca kolonial, masa revolusi hijau (*green revolution*) hingga munculnya berbagai program pembangunan pedesaan. Keberhasilan yang paling menonjol dari kebijaksanaan pembangunan adalah pada saat menempuh kebijaksanaan yang berfokus pada penyediaan kebutuhan makanan yang cukup bagi penduduk negara yang berjumlah besar, yaitu revolusi hijau. Untuk mendukung revolusi hijau, Institut Pertanian Bogor (IPB) membuat proyek yang dinamakan Denmas (Demonstrasi Massal) yang mempertunjukkan penggunaan pupuk yang benar dengan metode pengolahan yang baik, dimana proyek ini selanjutnya dikenal dengan nama Bimas (Bimbingan Massal). Proyek ini membantu petani dengan memberi kredit, bimbingan penyuluhan, pupuk serta pestisida dan insektisida. Namun sesudah dijadikan usaha besar-besaran di bawah bimbingan pemerintah, program tersebut

mengalami kesulitan dan menimbulkan kerugian milyaran rupiah, karena tidak di dukung oleh kemampuan administrasi yang memadai (Hansen,1973). Jadi strategi pembangunan dari atas ke bawah (*top down*) yang dilakukan oleh banyak negara termasuk Indonesia juga menimbulkan eksese dan akibat negatif. Maka berbagai sumber mengemukakan jalan keluarnya, antara lain gagasan yang dikemukakan oleh Friedman dalam artikelnya yang berjudul *The Active Community* berpendapat bahwa pembangunan desa (*rural development*) harus dibimbing secara sentral tetapi dilandaskan pada kondisi setempat. Bimbingan dari atas hanya mungkin efektif jika di desa ada organisasi yang mampu menerima, menyerap, menterjemahkan, menanggapi bimbingan tersebut. Organisasi yang dimaksud haruslah mampu berbicara untuk dan atas nama masyarakat setempat. Hal itu berarti organisasi tersebut berada pada posisi sebagai yang mewakili pihak atas (pemerintah) dan juga pada posisi yang mewakili masyarakat.

Pada pendekatan kedua, model strategi pembangunan dari bawah keatas adalah proses perluasan kesempatan-kesempatan bagi individu, kelompok-kelompok sosial dan masyarakat-masyarakat yang terorganisasi pada ukuran kecil dan menengah. Pembangunan dari bawah berdasarkan input dan pernyataan kebutuhan lokal dan regional yang ditentukan secara teritorial. Strategi pembangunan ini berguna untuk pengembangan masyarakat daerah-daerah pinggiran sub nasional terutama sekali daerah pedesaan. Tujuan utamanya adalah pengembangan sepenuhnya sumberdaya alam suatu daerah dan keterampilan sumberdaya manusianya. Strategi pembangunan ini penting berdasarkan beberapa pertimbangan:

- (1) Melalui mekanisme dari bawah keatas, masyarakat dapat memberikan tanggapan, jawaban, atau *feedback* kepada pihak atas mengenai hal-hal yang menyangkut jawaban, tanggapan, laporan, keluhan dan *feedback* baik yang positif maupun yang negatif. Jika seorang warga desa tidak bebas menyatakan pendapatnya mengenai suatu hal mengenai usaha perbaikan atau kegiatan sosial, yang bersangkutan telah kehilangan daya lindung atau pertahanannya selaku anggota masyarakat.

- (2) Melalui mekanisme dari bawah keatas, masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan atau tuntutan kepada pemerintah sehingga masyarakat dapat mencapai tujuan demokrasi yang tinggi.
- (3) Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi tawar menawar, permufakatan atau kompromi (*cooptation*" Bryant dan White, 1982).
- (4) Melalui mekanisme tersebut juga dapat dilakukan komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah yang diharapkan memperoleh informasi yang tepat mengenai berbagai hal sehingga dapat diambil tindakan yang tepat.
- (5) Melalui mekanisme dari bawah dapat terjadi proses "*exchange*" antara masyarakat dengan pemerintah, misalnya kesempatan bagi kaum petani miskin untuk memberikan suaranya (*toexchange theirvote*) dengan harapan akan menerima keuntungan tertentu dari pemerintah kelak sebagai imbalan.

Berdasarkan rumusan tersebut nampaknya strategi pembangunan dari bawah keatas (*bottom up*) lebih mencerminkan kaum miskin memperjuangkan nasibnya. Tanpa pemberian kekuasaan kepada masyarakat untuk mengontrol masa depannya, pembangunan dan pengembangan masyarakat tidak akan berhasil.

Sejalan dengan rumusan itu pula, Shardlow (Isbandi Rukminto Adi, 2003) melihat bahwa pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip tersebut pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri hal-hal yang harus ia lakukan dalam upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran penuh dalam membentuk hari depannya.

Berbagai hasil kajian menyimpulkan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat daya internal yang mekanismenya bersifat khas (*local spesifik*) dan secara nyata berperan mengatasi masalah sendiri (*internal*). Berkaitan dengan sumber daya internal dikenal beberapa konsep, antara lain *Energi*

Sosial Kreatif (Sayogyo, 1994, Uphoff, 1992) yang pada dasarnya menyatakan bahwa di dalam masyarakat terdapat energi sosial yang diarahkan pada upaya mengatasi masalah kemiskinan, baik yang terbatas pada mengatasi konsekuensinya maupun yang mengatasi penyebabnya.

Pembangunan yang bersifat *top down*, dimana kekuasaan pusat sangat mendominasi dalam pembangunan di daerah, cenderung mengabaikan potensi sumberdaya lokal yang disebut energi sosial. Hal ini terjadi karena derasnya arus atas yang diwarnai oleh kepentingan pusat, yang telah mendikte tokoh-tokoh formal di tingkat desa untuk menerapkan dan melaksanakan program dari atas desa tersebut. Walaupun demikian, daya internal yang membawa kepentingan dan menjawab kebutuhan masyarakat lokal masih ada dan tetap berfungsi sebagai jaring pengaman bagi upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, Inti daya internal ini adalah kepedulian sesama warga masyarakat terhadap kepentingan satu sama lain yang saling sinergis, misalnya *Rereongan* (gotong royong) di Jawa Barat, *Mapalus* (gotong royong di Sulawesi Utara), *Sibali-bali* (gotong royong di Makassar), *Pawanda/Parapona* (kerja bergilir di Sumba, dan lain-lainnya. Daya internal (energi sosial) tersebut penting dan perlu dikembangkan untuk memberdayakan kehidupan di lingkungan sosial maupun lingkungan fisik tempat mereka tinggal.

B. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan adalah mengembangkan individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Tujuan utama pemberdayaan adalah meningkatkan kondisi kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat terutama pada lingkungan komunitas yang bersangkutan. Oleh sebab itu pemberdayaan individu maupun kelompok masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan yang bertujuan:

(1) Untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan

(2) Untuk meningkatkan kemampuan berprakarsa secara mandiri agar kehidupan seseorang atau kelompok dimasa datang lebih baik dan lebih sejahtera dari pada kehidupannya sekarang.

(3) Mengembangkan usaha dan kemampuan dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang sangat penting oleh individu maupun kelompok terutama dalam mengembangkan usahanya, apakah akan membawa keuntungan atau kerugian (Purnaningsih, 2006). Dalam kaitan dengan hal tersebut Payne (Isbandi Rukminto Adi, 2003) mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Oleh karena itu dalam proses pengambilan keputusan, seorang harus dapat berpikir secara cepat dan tepat, antara lain dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Untuk memiliki kemampuan dan rasa percaya diri perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki kekuatan atau kemampuan kognisi, psikomotorik, dan afektif terhadap urusan sosial (akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu), politik (kemandirian dalam pengambilan keputusan) dan psikologis untuk membangun kepercayaan diri. Pemberdayaan menekankan bahwa orang seharusnya memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons,1994).

Tujuan lainnya dari suatu proses pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya karena ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Untuk *menolong yang lemah* atau tidak berdaya

(*powerless*) agar mampu (berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial hidupnya, maka mereka harus dipandang sebagai *aktor* yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- (1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis
- (2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, dan lain-lain
- (3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga. Kelompok lemah tersebut dibantu dengan sumberdaya yang memungkinkan bisa diberikan.

Berdasarkan kategori tersebut, maka tujuan dari proses pemberdayaan adalah sebagai pemberian daya, kuasa, kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya dalam hal ini kelompok lemah (Ife, 1995). Sejalan dengan itu, Mujiyadi dan Gunawan (2000), menekankan perlunya pemberdayaan menjadi suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Masyarakat miskin merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan “penguatan” agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang dimiliki.

C. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Para Pakar menguraikan pengertian “ Prinsip “ dengan berbagai cara. Gudykust dan Young Yun Kim (Mulyana, 2001) menyebutnya sebagai asumsi-asumsi. Sedangkan Book, CL, et al (Mulyana, 2001) menyebutnya sebagai karakteristik-karakteristik. Ada pula yang menyebutnya sebagai azas-azas. Pengertian tersebut saling memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain serta dapat dijabarkan sesuai bidang kegiatan termasuk dalam kegiatan pembangunan masyarakat.

Pemahaman terhadap prinsip pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan agar dalam penerapan pengembangan masyarakat, seorang community worker mempunyai orientasi yang tidak hanya bersifat pragmatis tetapi juga mempunyai visi jangka panjang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Nasdian (2003) memaparkan sepuluh prinsip pemberdayaan masyarakat yang dianggap dapat diterapkan di seluruh dunia, yaitu :

- (1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar dari masyarakat, program-program (proyek) pertama harus dimulai sebagai jawaban atas kebutuhan yang dirasakan masyarakat.
- (2) Kemajuan lokal dapat dicapai melalui upaya-upaya tak saling terkait dalam setiap bidang dasar, akan tetapi pengembangan masyarakat yang penuh dan seimbang menuntut tindakan bersama dan penyusunan program-program multi tujuan.
- (3) Perubahan sikap masyarakat adalah sama pentingnya dengan pencapaian kemajuan material dari program-program masyarakat selama tahap-tahap awal pembangunan.
- (4) Pemberdayaan masyarakat mengarah pada partisipasi orang-orang yang meningkat dan lebih baik dalam masalah-masalah masyarakat.
- (5) Identifikasi, dorongan semangat dan pelatihan pemimpin lokal harus menjadi tujuan dasar setiap program.
- (6) Kepercayaan yang lebih besar pada partisipasi wanita dan kaum muda dalam proyek-proyek pengembangan masyarakat akan memperkuat program-program pembangunan, memaparkannya dalam basis yang luas dan menjamin ekspansi jangka panjang.
- (7) Agar sepenuhnya efektif, proyek-proyek swadaya masyarakat memerlukan dukungan intensif dan ekstensif dari pemerintah.
- (8) Penerapan program-program pemberdayaan masyarakat dalam skala nasional memerlukan pengadopsian kebijakan yang konsisten , pengaturan administrative yang spesifik, perekrutan dan pelatihan

personil, mobilisasi sumber daya lokal dan nasional dan organisasi penelitian, eksperimen dan evaluasi

- (9) Sumberdaya dalam bentuk organisasi-organisasi non pemerintah harus dimanfaatkan penuh dalam program-program pengembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional dan internasional
- (10) Kemajuan ekonomi dan sosial pada tingkat lokal mensyaratkan pembangunan yang paralel di tingkat nasional.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami bahwa suatu program pemberdayaan masyarakat senantiasa berorientasi pada prioritas kepentingan masyarakat di tingkat lokal dan nasional yang tak dapat dipaksakan penerapannya karena sifatnya berbasis pada kemandirian masyarakat baik pada penyusunan program maupun dalam pelaksanaan program.

Ife (1995) memaparkan 22 prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

(1) *Integrated Development* (Pembangunan Terpadu)

Proses pemberdayaan masyarakat tidak berjalan secara parsial, tetapi merupakan satu kesatuan proses pembangunan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, lingkungan dan personal. Pembangunan masyarakat yang hanya menekankan satu aspek saja akan menghasilkan ketidak seimbangan dalam pembangunan.

(2) *Confronting Structural Disadvantage* (Konfrontasi dengan Kebatilan Struktural)

Prinsip yang mengakar pada perspektif keadilan sosial dalam pengembangan masyarakat, dimana harus memperhitungkan kompleksitas yang ditemukan dalam suatu komunitas dengan latar belakang ras, jenis kelamin, sikap dan partisipasi masyarakat.

(3) *Human Rights* (Hak Azasi Manusia)

Program pengembangan masyarakat harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar hak azasi manusia yang meliputi hak mendapatkan

kehidupan yang layak, hak ikut serta dalam kehidupan kultural, hak perlindungan keluarga dan hak untuk *self determination*.

(4) *Sustainability* (Keberlanjutan)

Program pemberdayaan masyarakat berada dalam kerangka *sustainability* yang berupaya mengurangi ketergantungan kepada sumber daya yang tidak tergantikan (*non-renewable*) dan menciptakan alternative serta tatanan ekologis, sosial, ekonomi, politik yang berkelanjutan ditingkat lokal.

(5) *Empowerment* (Pemberdayaan)

Pemberdayaan adalah membantu komunitas dengan sumberdaya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas.

(6) *The Personal and The Political* (Pribadi dan politik)

Pengembangan masyarakat perlu membangun keterkaitan antar aspek pribadi dan Politik, individu dan struktur, masalah pribadi dan isu umum yang kemudian dapat menjadi suatu kekuatan komunitas.

(7) *Community Ownership* (Kepemilikan Komunitas)

Kepemilikan komunitas menjadi penting yang dapat membantu menciptakan identitas dan memberikan alasan untuk aktif dalam program pengembangan masyarakat dan mengefisienkan sumberdaya di tingkat komunitas.

(8) *Self-Reliance* (Kemandirian)

Prinsip ini mengimplikasikan agar warga komunitas mencari atau berusaha menggunakan sumberdaya lokal sendiri apabila memungkinkan dari pada menyandarkan sendiri pada bantuan luar, baik sumberdaya manusia, SDA, keuangan, dan teknik.

(9) *Independence From The State* (Ketidaktergantungan pada Pemerintah)

Peranan yang berlebihan dari pemerintah dapat menimbulkan kelemahan pada kekuatan berbasis komunitas. Oleh sebab itu *community workers* dan warga komunitas agar lebih berhati-hati sebelum menerima bantuan dari pemerintah walaupun bantuan tersebut penting untuk memulai proses pembangunan.

(10) *Immediate Goals and Ultimate Vision* (Tujuan dan Visi)

Tujuan dan visi harus menjadi perhatian dalam pendekatan pembangunan masyarakat. Tindakan untuk tujuan langsung tidak dibenarkan bila tidak sesuai dengan visi jangka panjang.

(11) *Organic Development* (Pembangunan bersifat Organik)

Prinsip ini diharapkan mampu menghargai dan menilai sikap tertentu warga komunitas, mengizinkan dan mendorongnya untuk berkembang pada jalannya yang memiliki keunikan masing-masing dan mempunyai hubungan yang kompleks antara warga komunitas dan lingkungannya.

(12) *The Face of Development* (Kecepatan Gerak Pembangunan)

Prinsip ini menekankan agar proses pembangunan dibiarkan berjalan dengan sendirinya dan tidak dipercepat untuk dapat melihat hasilnya karena pembangunan masyarakat adalah proses jangka panjang sesuai dengan dinamika komunitasnya.

(13) *External Experties* (Keahlian Pihak Luar).

Keahlian atau pengalaman seseorang serta pengalaman pembangunan di suatu tempat boleh dipelajari sebagai pertimbangan dalam pembangunan di wilayah lain dengan tidak meniru secara mutlak. Pendekatan ini dikembangkan secara alami sesuai dengan situasi spesifik kebudayaan, tradisi masyarakat dan lingkungan.

(14) *Community Building* (Membangun Komunitas)

Prinsip ini mendorong masyarakat untuk bekerjasama, lebih bergantung satu sama lain dalam menyelesaikan sesuatu. Masyarakat yang memberikan kontribusi menjadi dihargai. Oleh sebab itu interaksi sosial ditingkat komunitas lebih fokus pada kebersamaan, dialog, pemahaman dan tindakan sosial, menyelesaikan masalah bersama dan memperkuat interaksi yang bersifat formal dan informal.

(15) *Process and Outcome* (Proses dan Hasilnya)

Dalam pengembangan masyarakat , proses dan hasil merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling menunjang sehingga keduanya menjadi penting.

(16) *The Integrity of The Process* (Keterpaduan Proses)

Proses yang digunakan untuk mencapai tujuan harus sesuai dengan hasil yang diharapkan, prihal keberlanjutan , keadilan sosial dan lain-lain.

(17) *Non-Violence* (Tanpa Kekerasan)

Pembangunan masyarakat dijalankan tanpa kekerasan atau paksaan yang nyata seperti militerisme, paksaan fisik, hukuman fisik seperti hukuman mati, kebrutalan polisi dan lain-lain, termasuk kekerasan struktural yakni dengan cara tanpa mengubah lembaga yang ada dan struktur sosial masyarakat

(18) *Inclusiveness* (Inklusif)

Dalam pembangunan masyarakat, tetap menghargai orang lain walaupun berlawanan pandangan dan tetap merangkulnya tanpa mengasingkannya dan mempermalukan mereka

(19) *Consensus* (Konsensus)

Keputusan yang diambil adalah betul-betul yang terbaik tanpa kekerasan dan inklusif sehingga menemukan solusi sebagai milik bersama.

(20) *Co-operation* (Kerjasama)

Pendekatan pengembangan komunitas yang berlandaskan pada konsensus dan tanpa kekerasan memerlukan struktur untuk bekerjasama (*co-operation*) dari pada struktur persaingan. Dengan kerjasama akan mampu "*sharing*" perasaan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dalam jangka panjang akan mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi bersama dalam komunitas.

(21) *Participation* (Partisipasi).

Partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat.

(22) *Defining Need* (Mendefenisikan Kebutuhan)

Dalam pengembangan komunitas, pendekatan harus mencari persetujuan dari berbagai macam kebutuhan. Untuk itu peranan *community workers* yang sangat penting adalah membangun konsensus dari beragam kebutuhan warga komunitas. Melalui dialog diharapkan dapat dirumuskan sesuatu yang benar-benar menjadi kebutuhan anggota komunitas bukan keinginan.

Salah satu prinsip dari pemberdayaan (*Empowerment*) adalah membantu komunitas dengan sumberdaya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas, karena pemberdayaan menurut Ife (1995) bertujuan membangun kemandirian (*self*

reliance) yang mengimplikasikan agar warga komunitas mencari atau berusaha menggunakan sumberdaya lokal sendiri apabila memungkinkan dari pada menyandarkan sendiri pada bantuan luar, baik sumberdaya manusia, sumber daya alam, keuangan, dan teknik.

Prinsip kemandirian bukan berarti berjuang sendiri tanpa bantuan orang lain, tetapi justru mendorong masyarakat untuk bekerjasama, lebih bergantung satu sama lain dalam menyelesaikan sesuatu. Masyarakat yang memberikan kontribusi menjadi dihargai. Oleh sebab itu interaksi sosial ditingkat komunitas lebih fokus pada kebersamaan, dialog, pemahaman dan tindakan sosial, menyelesaikan masalah bersama dan memperkuat interaksi yang bersifat formal dan informal.

Berkaitan dengan hal itu, Mardikanto (Margono, 2003) mengingatkan beberapa hal yang menurut penulis dapat menjadi prinsip pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- (1) Pemberdayaan tidak boleh hanya dipusatkan pada masyarakat lapis bawah, tetapi kepada semua stakeholder pembangunan terutama para penentu kebijakan, para pakar, tokoh masyarakat dan aktivis LSM
- (2) Pelaku pemberdayaan tidak terbatas pada elite masyarakat, tetapi siapa saja yang berkompoten dalam arti memiliki konsep, komitmen dan jejaring yang diperlukan
- (3) Pentingnya pengembangan kapasitas masyarakat, baik kapasitas individu, kapasitas kelembagaan, maupun kapasitas jejaring dalam masyarakat global
- (4) Pemberdayaan harus menumbuh kembangkan partsipasi masyarakat, dalam arti:
 - (a) Menginformasikan pentingnya partsisipasi masyarakat
 - (b) Menunjukkan kesempatan berpartisipasi kepada seluruh warga masyarakat
 - (c) Memampukan masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi

- (d) Dalam kegiatan pemberdayaan perlu dijaga agar peran bantuan yg dilakukan tidak bersifat karitatif, karena hal tersebut akan menimbulkan ketergantungan dan menghambat proses pemandirian masyarakat.

Pada dasarnya setiap individu dan kelompok memiliki daya. Akan tetapi kadar daya itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status dan gender. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan dengan dikotomi “subyek” (penguasa) dan “objek” (yang dikuasai). Pentingnya mengalirkan daya dari subyek ke objek dengan memberinya kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada merupakan salah satu manifestasi dari mengalirnya daya tersebut. Dengan demikian kemampuan individu miskin untuk mewujudkan harapannya dengan diberinya pengakuan oleh subyek merupakan bukti bahwa individu dan kelompok tersebut memiliki daya. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu atau kelompok yang semula sebagai objek menjadi subyek.

Dari prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut, antara satu dengan lainnya saling terkait yang tak dapat dipisahkan baik dari struktur maupun prosesnya. Lebih jelas lagi bahwa pembangunan masyarakat adalah pembangunan yang komprehensif dan berbasis komunitas. Jika kita mencermati kebelakang dalam kasus pembangunan masyarakat di Indonesia dan mungkin hingga hari ini bahwa pendekatan pembangunan masyarakat di Indonesia nampak sangat sentralistik dan bersifat top-down. Dari Pendekatan tersebut, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang menakjubkan

. Pendekatan *top down* berarti bahwa wewenang masyarakat tingkat bawah (*community local*) terhadap input proses pembangunan sangatlah kecil, sehingga berdampak langsung pada aktifitas keseharian, produksi dan prikehidupan serta tingkat kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu mungkin

kedepan akan lebih banyak terfokus pada pendekatan alternatif yang menempatkan masyarakat juga sebagai pelaku perencana dan pelaksana pembangunan dan tidak semata-mata hanya sebagai obyek pembangunan. Hanya saja menurut Ndraha (1990) kenyataan bahwa dalam pembangunan masyarakat (community development) masyarakat kita lebih-lebih masyarakat pedesaan tidak segera mampu menunjukkan prakarsa yang berarti disebabkan oleh struktur dan kultur pedesaan itu sendiri, misalnya banyak orang bergantung pada orang lain, pemerintahan lokal yang berwatak feodal serta ikatan tradisi yang kuat

D. Strategi Pemberdayaan

Menurut Parsons (1994), proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien. Hal tersebut bukanlah strategi utama pemberdayaan.

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yakni: (1) pendekatan mikro, (2) pendekatan Mezzo, (3) pendekatan makro.

(1) Pendekatan Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

(2) Pendekatan Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pemberdayaan dengan pendekatan ini biasanya dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok yang digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

(3) Pendekatan Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Pemberdayaan dengan pendekatan ini biasanya dilakukan dalam perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

BAB II

FENOMENA KEMISKINAN

A. Pengertian Kemiskinan

Secara harafiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin diberi arti “tidak berharta-benda” (Poerwadarminta, 1986). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Pengertian kemiskinan, dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk, yakni kemiskinan *struktural*, kemiskinan *kultural*, kemiskinan *relatif*, dan kemiskinan *absolut*. Kemiskinan struktural terjadi karena seseorang kurang mampu mendapatkan akses kehidupan khususnya kebutuhan dasar seperti pangan, papan, kesehatan dan hak-hak kebutuhan lainnya, akibat kebijakan pemerintahan yang kurang menguntungkan. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Seseorang termasuk golongan miskin absolute apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

Menurut Kartasasmita (1997), kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sedangkan Nasikun (1995) menyatakan “kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap

berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”.

Program pemberdayaan masyarakat menjadi suatu pilihan yang bersifat strategis tidak terlepas dari fenomena kemiskinan yang membutuhkan penanggulangan agar masyarakat dapat menikmati kehidupan yang bermartabat. Dalam konteks strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK), kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, 2006).

World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial. Kekurangan fisik adalah ketidakcukupan kebutuhan dasar materi dan biologis (*basic material and biological needs*), termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Di sisi lain, ketidakcukupan sosial

adalah adanya resiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kepercayaan diri yang kurang. Peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen (Gunawan dan Sugiyanto, 2004), mengatakan bahwa ada beberapa cara pendekatan untuk mengetahui apa itu kemiskinan. Sen menawarkan pendekatan melalui kelaparan atau akses seseorang terhadap pangan. Menurut Sen, Seseorang akan mendapatkan makanan jika dia dikenal secara sosial dan legal. Jadi, walaupun ketersediaan pangan melimpah, Sen berpendapat *“Starvation is seen as the result of his inability to establish entitlement to enough food”* Oleh karena itu, Sen mengatakan bahwa untuk memberantas kemiskinan adalah dengan memberikan kesempatan/akses kepada orang miskin terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Schiller dalam Gunawan dan Sugiyanto (2008) berpendapat bahwa ada beberapa kriteria yang termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Variabel-variabel tersebut adalah asupan kalori, konsumsi energi, kebutuhan akan pakaian, transportasi, dll.

Tabel 1. *Hyothetical Minimum Needs.*

Category	Amount
Minimun food requirements	2471 calories per day
Minimun fuel requirements	37 KW-hours
Minimun shelter requirements	60 Board feet
Minimun clothing requirements	4 pounds
Minimun transportation requirements	7 miles

Sumber : Schiller, 1989 (Gunawan dan Sugiyanto, 2008)

B. Ciri-Ciri Penduduk Miskin

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 14 variabel/kriteria untuk mengkategorikan penduduk miskin. Variabel-variabel atau kriteria-kriteria itu adalah: luas lantai bangunan; jenis lantai bangunan yang digunakan; jenis

dinding yang digunakan; ada tidaknya jamban/toilet; ada tidaknya sumber penerangan rumah tangga; sumber air minum; jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak sehari-hari; jumlah konsumsi daging, susu, ayam; pengeluaran untuk barang sandang; tingkat konsumsi makanan; pengeluaran untuk kesehatan; jumlah penghasilan kepala rumah tangga dalam sebulan; tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; dan jumlah tabungan yang dimiliki.

Seseorang akan dikategorikan miskin oleh BPS jika memenuhi minimal 8 dari 14 kriteria/variabel tersebut. Kriteria-kriteria tersebut nampaknya memang sangat tidak manusiawi tetapi itulah potret atau gambaran kemiskinan di Indonesia yang masih sangat jauh dari layak. Terlebih jika kita bandingkan standar yang ditetapkan oleh BPS dengan *World Bank*. Menurut *World Bank*, salah satu kriteria orang miskin di Indonesia adalah mereka yang berpenghasilan di bawah dua dollar per hari atau sekitar Rp. 19.000,-. Standar kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS tersebut sangatlah rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan standar kemiskinan yang ditetapkan oleh PBB (MDG'S), terlebih lagi jika dibandingkan dengan *World Bank*. Yang lebih menyedihkan lagi ketika dibandingkan standar kemiskinan BPS (2007) tetap jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan standar kemiskinan di Amerika Serikat sekitar 46 tahun yang lalu (1963).

Selain BPS, standar kemiskinan yang digunakan para peneliti dan ilmuwan dalam menganalisis persoalan-persoalan kemiskinan, sering pula digunakan standar versi Sayogyo. Guru Besar Institut Pertanian Bogor ini menyetarakan penghasilan seorang yang tergolong miskin setara dengan 360 kg beras setahun. Jika harga beras perkilogram sebanyak Rp. 5.500 rupiah, maka total penghasilan adalah sebanyak $360 \text{ kg} \times \text{Rp.}5.500 = \text{Rp.} 1.980.000$ pertahun, atau sebanyak Rp.165.000 perbulan, atau Rp.5.500 perhari. Nampaknya perhitungan Sayogyo sama dengan perhitungan BPS tahun 2007.

Tabel 2. Perbandingan Standar Kemiskinan

Parameter	BPS (versi Maret 2007)	World Bank	PBB (MDG'S)	Amerika Serikat Tahun 1963 (Schiller, 1989)
Pendapatan (per orang per hari)	Rp.5.500,- (\$0,6)	Rp.19.000,- (\$2)	Rp. 9.500,- (\$1)	Rp.29.735,- (\$3,13)
Asupan Kalori (per hari)	2100	-	-	2471
Penerangan	Lampu Templok, Tidak ada listrik (0 KWh).	-	-	37 KWh

Sumber: Gunawan dan Sugiyanto, 2008

Berdasarkan standar kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan mendesak bagi Indonesia. Pada tahun 2006 hampir 35 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Jumlah ini masih melebihi total jumlah penduduk miskin di seluruh Asia Timur, tidak termasuk China. Selain itu, angka kemiskinan nasional ini menutupi gambaran tentang kelompok besar penduduk 'hampir-miskin' di Indonesia, yang hidupnya mendekati garis kemiskinan. Sekitar 40 persen dari jumlah penduduk keseluruhan, atau mendekati 90 juta penduduk, hidup dengan penghasilan antara 1 dan 2 dollar AS per hari. Sesungguhnya, meskipun Indonesia sekarang merupakan negara berpenghasilan menengah, jumlah penduduknya yang hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dollar AS per hari sama besar dengan jumlah penduduk miskin di negara-negara berpenghasilan terendah di wilayah Asia Timur.

Sangat rentannya kelompok penduduk hampir-miskin ini dibuktikan dengan meningkatnya angka kemiskinan yang dipicu oleh kenaikan harga beras pada tahun 2006, yang mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dari 16,0 persen menjadi 17,7 persen. Indonesia juga mengalami kemajuan yang sangat lamban dalam beberapa aspek penting kemiskinan lainnya selain

penghasilan. Angka kematian ibu hamil, angka partisipasi siswa sekolah menengah tingkat pertama dan angka gizi buruk, misalnya, belum juga membaik dengan cukup cepat dan masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasannya.

Indonesia juga ditandai dengan tingginya kesenjangan dan ketimpangan antarwilayah. Masih ada beberapa wilayah Indonesia di mana tingkat dan karakteristik kemiskinan lebih mirip dengan sebagian negara berpenghasilan terendah di dunia, serta masih adanya kantong-kantong kemiskinan bahkan di wilayah-wilayah Indonesia yang lebih makmur.

Pemerintah Indonesia jelas memiliki komitmen untuk menanggulangi kemiskinan seperti tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengahnya (RPJM) tahun 2004-2009, yang hal itu merupakan bagian dari Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang digariskan oleh pemerintah. Selain ikut menandatangani Sasaran Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) untuk tahun 2015, dalam rencana jangka menengahnya pemerintah telah menjabarkan target-target utama penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2009. Hal ini meliputi target-target yang yang ambisius namun relevan, seperti mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen pada 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009, meningkatkan rasio partisipasi siswa sekolah menengah pertama dari 79,5 persen pada 2002 menjadi 98 persen pada tahun 2009, dan menurunkan angka kematian ibu hamil dari 307 per 100.000 kelahiran pada 2002 menjadi 226 pada tahun 2009. Target ini diupayakan agar Indonesia berhasil melewati ambang batas kemiskinan dan menjadi salah satu negara baru berpenghasilan menengah di dunia. Paling tidak target tersebut sudah bisa tercapai hingga tahun 2010.

C. Penyebab Kemiskinan

Jika dikelompokkan penyebab kemiskinan, maka ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam

yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Kemiskinan dapat disebabkan pula oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan disebabkan oleh perbedaan akses dalam modal. Sedangkan lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse sangat relevan dalam menjelaskan fenomena kemiskinan yang terjadi di negara-negara terbelakang. Menurutnya negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).

Kemiskinan memang merupakan momok utama dalam perekonomian suatu negara. Makin banyak kemiskinan di suatu negara, menggambarkan ketidakberesan negara dalam mengurus rakyatnya. Selain itu, kemiskinan juga merupakan potret adanya suatu kegagalan ekonomi. Terlebih jika kemiskinan telah berlangsung sejak lama. Bila hal ini sudah terjadi maka kemiskinan ini bukan merupakan fenomena sesaat tetapi sudah menjadi fenomena struktural yang harus diselesaikan dengan cara yang sistematis dan berkelanjutan.

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.

D. Pemberdayaan dalam Penanggulangan Kemiskinan

Penerapan pemberdayaan paling banyak digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijo (2007), upaya penanggulangan kemiskinan secara konseptual dapat dilakukan oleh empat jalur strategis, yaitu perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan perlindungan sosial. Strategi perluasan kesempatan ditujukan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan dua strategi berikutnya yakni peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial bertujuan agar seseorang dapat memiliki kekuatan (daya) atau kewenangan sehingga orang tersebut tidak termarginalisasi lagi melainkan sadar akan harga dirinya, harkatnya, dan martabatnya. Dengan kapasitas seseorang akan memiliki kemandirian, tahan uji, pintar, jujur, berkemampuan kreatif, produktif, emansipatif, tidak tergantung, proaktif, dinamis, terbuka dan bertanggung jawab dalam mengatasi semua masalah dan menjawab tantangan untuk mencapai kemajuan.

Sejak tahun 2004, pemerintah Indonesia melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan melalui bentuk Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net Program*), data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil, pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN. Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri (Prokesos KUBE KMM), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra), Kredit Usaha Kecil Menengah, dan lain-lain. Kemudian

sejak tahun 2009 dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono-Budiono digalakkan pula Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Meskipun masih perlu usaha penyempurnaan dan perbaikan dari program tersebut agar benar-benar mampu membangun prakarsa dan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan usaha dan tingkat kesejahteraannya.

Mengenai penanganan permasalahan kemiskinan ini beberapa usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun swasta tersebut menunjukkan bahwa adanya kepedulian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan seperti yang tertuang dalam UUD Tahun 1945.

Penanggulangan kemiskinan terlihat pula dalam strategi pemenuhan kebutuhan dasar yang dicanangkan dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) antara lain meliputi: (1) kecukupan dan mutu pangan, (2) akses mutu layanan kesehatan, (3) akses mutu layanan pendidikan, (4) kesempatan kerja dan berusaha, (5) akses layanan perumahan, (6) akses terhadap air bersih dan aman, serta sanitasi, (7) kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (8) perbaikan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (9) pemenuhan jaminan rasa aman, dan (10) meningkatkan partisipasi.

(1) Kecukupan dan Mutu Pangan

Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan daya beli, ketersediaan pangan yang merata, serta mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap beras dan meningkatkan terus upaya diversifikasi pangan selain beras seperti jagung, sagu, ubi jalar, ubu kayu dan bahan pangan lainnya yang tumbuh secara lokal. Selain itu kecukupan pangan dapat pula dilakukan dengan peningkatan asupan kalori penduduk miskin dan memperbaiki status gizi bayi, anak balita dan ibu. Kekurangan asupan kalori yang terjadi pada saat ketersediaan pangan nasional cukup

memadai, menunjukkan adanya masalah dalam keterjangkauan pangan yang bermutu.

(2) Akses Mutu Layanan Kesehatan

Masyarakat miskin harus diberdayakan untuk memperoleh akses mutu layanan kesehatan dan peningkatan status kesehatan yang akan berdampak pada tingginya daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah, membantu kemampuan anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang, dan meningkatkan derajat kesehatan ibu. Pemberdayaan mutu layanan kesehatan dimaksudkan pula agar pemahaman perilaku hidup sehat dapat meningkat, mengurangi angka kematian bayi, serta menurunkan dampak timbulnya penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis paru, dan HIV/AIDS serta kebiasaan merokok. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, pendapat NU dan MUI tentang bahaya dan larangan merokok dapat menjadi referensi dalam proses pemberdayaan masyarakat.

(3) Akses Mutu Layanan Pendidikan

Masyarakat miskin diupayakan seoptimal mungkin dapat memperoleh layanan pendidikan formal dan non formal dengan memudahkan dan menurunkan biaya pendidikan, mencukupkan jumlah prasarana dan sarana pendidikan, jumlah guru yang bermutu baik di daerah pedesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan, serta jumlah sebaran dan mutu program kesetaraan pendidikan dasar maupun pendidikan menengah melalui pendidikan non formal.

(4) Kesempatan Bekerja dan Berusaha

Pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui peningkatan peluang untuk mengembangkan usaha, perlindungan terhadap aset usaha, mengatasi diskriminasi perolehan upah serta mengadvokasi perlindungan kerja khususnya bagi pekerja anak dan perempuan pembantu rumah

tangga. Memberi informasi akses modal, menambah keterampilan dan pengetahuan yang dapat menyebabkan mereka mampu mengembangkan usaha. Masalah pengangguran dan kurangnya perluasan kesempatan kerja akibat krisis ekonomi akan meningkatkan jumlah orang miskin terutama oleh usia muda yaitu usia 15-19 tahun merupakan tantangan tersendiri dalam kegiatan program pemberdayaan mengingat jumlahnya yang cukup besar sekitar 36,7 persen dari jumlah penduduk.

(5) Akses Layanan Perumahan

Tempat tinggal yang sehat dan layak merupakan kebutuhan primer yang harus dinikmati oleh kaum miskin. Kondisi perumahan sering dipakai untuk mengenali penduduk miskin seperti luas lantai bangunan; jenis lantai bangunan yang digunakan; jenis dinding yang digunakan; ada tidaknya jamban/toilet; ada tidaknya sumber penerangan rumah tangga; sumber air minum dan sanitasi pembuangan limbah. Pemenuhan hak untuk mendapatkan akses perumahan yang sehat dan layak sama halnya dengan hak-hak yang didapatkan oleh kelompok masyarakat lainnya. Upaya pemberdayaan dilakukan agar mereka mendapatkan pendanaan untuk membayar biaya awal untuk mendapatkan perumahan sangat sederhana dengan harga murah, meringankan pajak serta memberikan harga tanah yang terjangkau

(6) Akses Terhadap Air Bersih dan Aman, Serta Sanitasi

Penyediaan air bersih, dan jaringan distribusi air yang terjangkau merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. Air bersih didefinisikan sebagai air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air bersih disini termasuk air minum dan air minum non perpipaan (sumur dalam, sungai, danau dan *small scale provider*). Masyarakat miskin diberdayakan agar mereka mudah untuk mendapatkan air bersih dan aman. Kesulitan memperoleh

air bersih dan aman umumnya dirasakan oleh mayoritas penduduk terutama rumah tangga yang tinggal di daerah yang sulit air.

(7) Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah

Masyarakat miskin khususnya di pedesaan sangat tergantung hidupnya pada struktur penguasaan dan kepemilikan tanah terutama lahan pertanian. Tingkat pendapatan rumah tangga petani ditentukan oleh luas tanah pertanian yang dikuasai. Oleh sebab itu pemberdayaan ditujukan untuk membantu mengatasi meluasnya sengketa agraria agar masyarakat khususnya petani miskin mendapatkan nilai dan rasa keadilan. Konflik pertanahan yang sering terjadi semakin mencerminkan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah dan mempengaruhi kondisi kemiskinan di pedesaan dan masyarakat petani penggarap. Penguasaan tanah dalam pembangunan yang mengandalkan modal besar seperti revolusi hijau, perkebunan dan konsesi hutan produksi, semakin mencerminkan potret kemiskinan di pedesaan dan ketidakadilan agraria. Oleh sebab itu masyarakat miskin perlu dibantu untuk mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan tanah secara optimal dan mengadvokasi mereka dalam penyelesaian konflik agraria secara jelas dan tuntas agar dapat memecahkan kemiskinan dan tidak menimbulkan kemiskinan baru.

(8) Perbaikan Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Kehidupan masyarakat miskin di daerah pedesaan, daerah pinggiran hutan, kawasan pesisir, dan daerah pertambangan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan. Sedangkan masyarakat miskin di perkotaan umumnya tinggal di lingkungan pemukiman yang buruk dan tidak sehat, misalnya di daerah rawan banjir dan daerah yang tercemar. Tugas utama dalam proses pemberdayaan adalah menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi serta rasa kewajiban bagi semua orang

terutama masyarakat miskin untuk menjaga dan melestarikannya, misalnya menjaga kuantitas dan kualitas air yang dimanfaatkan, menjaga upaya penggundulan hutan serta sedimentasi, memelihara saluran-saluran air atau irigasi agar sistem kinerjanya tidak semakin rusak, sehingga dapat menambah pasokan air baku, baik untuk kebutuhan air minum maupun untuk meningkatkan intensitas tanam. Kemudian meningkatkan pengetahuan hak atas sumberdaya alam terkait dengan hak atas akses dan keadilan dalam pemanfaatannya, sehingga relevan bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini dimaksudkan pula agar mereka tidak semakin terpinggirkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.

(9) Pemenuhan Jaminan Rasa Aman

Masyarakat miskin seringkali menghadapi berbagai tindak kekerasan yang menyebabkan tidak terjaminnya rasa aman. Tindak kekerasan tersebut disebabkan oleh konflik sosial, ancaman terorisme, dan ancaman dalam bentuk eksploitasi dalam perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*), krisis ekonomi, penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obat terlarang. Pemberdayaan ditujukan agar masyarakat miskin mendapat hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya agar terhindar dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi, dan rasa tidak aman tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan atau konflik sosial hampir setiap hari dan malam diliput oleh media televisi maupun media cetak seperti kekerasan komunal, kekerasan yang bernuansa separatistis, kekerasan masyarakat dengan negara, kekerasan yang berhubungan dengan persoalan perburuhan yang tentu saja dapat merusak tatanan sosial yang ada, menciptakan rasa tidak aman dan mengurangi minat orang luar untuk mengunjungi wilayah tersebut. Dalam kurikulum Perguruan Tinggi Muhammadiyah, sejak tahun 2003 dirumuskan pendidikan *civic education* sebagai pengganti mata kuliah kewiraan. Hal tersebut bertujuan agar kesadaran berkehidupan sosial yang lebih nyaman, toleran, yang didasari

oleh nilai-nilai kasih sayang, penghormatan terhadap hak-hak publik, serta tidak merusak tatanan sosial dapat terpelihara dengan baik. Kesempatan ini dapat di implementasikan oleh para mahasiswa dalam membantu mensosialisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat.

(10) Meningkatkan Partisipasi

Partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan dimaksudkan agar mereka tidak terkooptasi dari kehidupan sosial dan membuat mereka semakin berdaya untuk menyampaikan aspirasinya. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang cenderung memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek dan mengabaikan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan seharusnya telah berubah menjadi sebaliknya, yakni meningkatkan partisipasi mereka menyampaikan suara si miskin dalam tahap perumusan, pelaksanaan, pemanataan, maupun evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Berbagai kasus penggusuran di perkotaan, pemutusan hubungan kerja sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dapat membantu memperkuat posisi tawar untuk mempengaruhi kebijakan baik melalui kelompok-kelompok, maupun kelembagaan organisasi di pedesaan.

Kelompok atau organisasi dilingkungan masyarakat baik yang tumbuh atas kesepakatan masyarakat itu sendiri maupun atas bentukan secara formal dari pihak pemerintah seyogyanya menjadi wadah berhimpunnya kekuatan masyarakat untuk memelihara tradisi musyawarah agar pengambilan keputusan dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada kalangan pemerintah saja, melainkan melibatkan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat.

Selama ini, peran serta masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk

mengurangi biaya pembangunan. Dengan kondisi ini, partisipasi masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapan program; masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar. Akhirnya partisipasi menjadi bentuk yang pasif dan tidak memiliki kesadaran kritis (Nasdian 2003).

Pentingnya partisipasi tersebut karena akan menumbuhkan daya kreatif dalam dirinya sendiri sehingga menghasilkan pengertian partisipasi yang aktif dan kreatif mulai dari tahap pembuatan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi (Cohen dan Uphoff dalam Nasdian, 2003). Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Partisipasi juga membantu masyarakat miskin untuk melihat realitas sosial ekonomi yang mengelilingi mereka.

BAB III

PENDEKATAN PEMBERDAYAAN

A. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan masyarakat merupakan wadah pengembangan perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan program pemberdayaan dalam pembangunan. Pengembangan kelembagaan masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang kerangka dasar ketahanan kehidupannya. Secara sederhana, North (1990) memberi makna kelembagaan (*institution*) sebagai aturan permainan (*rule of the game*). Aturan permainan diperlukan untuk mengarahkan perilaku sejumlah individu dalam pencapaian tujuan. Dalam pengertian yang lebih operasional, Uphoff (1988) mengelaborasi kelembagaan dalam tiga kategori entitas yakni:

- (1) Adanya sejumlah aturan yang mengarahkan perilaku individu dalam pencapaian tujuan tetapi keberfungsian aturan itu tidak dibarengi dengan entitas organisasi
- (2) Adanya organisasi yang mempolakan perilaku individu tetapi tidak dibarengi dengan bekerjanya norma-norma dalam mengarahkan perilaku yang dimaksud
- (3) Entitas dimana norma dan organisasi sekaligus menjelma sebagai entitas yang mengarahkan perilaku individu dalam pencapaian tujuan.

Dalam praktek pembangunan, terdapat dua unsur yang terlibat, yakni sumber daya dan kelembagaan. Sumber daya adalah unsur yang dikelola dalam pembangunan, sedangkan kelembagaan adalah pengelola dan cara mengelola sumber daya tersebut. Karena itu, Ohama (2002) mengemukakan konsep tiga unsur pembangunan yakni:

- (1) Sumber daya (*resources*), unsur yang dikelola dalam pembangunan baik sumber daya alam, manusia, teknologi dan finansial
- (2) Organisasi (*organization*) yakni unsur yang mengelola sumber daya untuk pencapaian tujuan

(3) Norma-norma (*norms*) yaitu acuan dari organisasi sebagai pelaku dalam mengelola sumber daya untuk pencapaian tujuan.

Kelembagaan adalah suatu aturan yang dikenal, diikuti, dan ditegakkan secara baik oleh anggota masyarakat, yang memberi naungan (*liberty*) dan hambatan (*constraints*) bagi individu atau anggota masyarakat (Arifin, 2004). Arifin mengklasifikasi dua jenis kelembagaan, yakni:

- (1) Kelembagaan yang tertulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah
- (2) Kelembagaan tidak ditulis secara formal seperti pada aturan adat dan norma yang dianut masyarakat.

Terdapat tiga saluran kelembagaan yang idealnya berperan seimbang dalam pembangunan (Ohama, 2002). Pertama saluran kelembagaan pemerintah, berfungsi bagi rumah tangga lokal untuk mengakses sumber daya dan fasilitas dari luar komunitas, melalui program dan kebijakan yang dibuat pemerintah. Kedua, saluran kelembagaan pasar, berfungsi bagi rumah tangga lokal untuk mempertukarkan barang dan jasa diluar komunitas. Ketiga, saluran kelembagaan komunitas, berfungsi bagi rumah tangga lokal untuk mengakses fasilitas dan sumber daya secara internal dalam agregasi rumah tangga-rumah tangga yang ada. Penguatan kelembagaan (*institutional strenghtening*) diperlukan dalam kerangka penguatan semua saluran kelembagaan tersebut.

Pengembangan kelembagaan adalah salah satu langkah penting dalam perbaikan distribusi sumber daya dan peningkatan keadilan sosial. Kelembagaan sangat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang harus atau tidak harus mengerjakan sesuatu (kewajiban atau tugas), bagaimana mereka boleh mengerjakan sesuatu tanpa intervensi dari orang lain (*kebolehan atau liberty*), bagaimana mereka dapat atau mampu mengerjakan sesuatu dengan kebutuhan kekuatan kolektif (*kemampuan atau hak*), dan bagaimana mereka tidak dapat memperoleh kekuatan kolektif untuk mengerjakan sesuatu atas namanya (*ketidak mampuan atau exposure*) (Coase dalam Arifin, 2004) Oleh sebab itu kelembagaan adalah serangkaian hubungan keteraturan (*ordered relationship*) antara beberapa orang yang

menentukan hak, kewajiban atau tepatnya kewajiban menghargai hak orang lain, privilis, dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat atau kelembagaan tersebut (Bromley dalam Arifin, 2004).

Sumardjo (Margono, 2003) dalam penelitiannya mengenai kelembagaan pangan di pedesaan menyatakan bahwa kelembagaan pangan adalah segala bentuk pengaturan atau keteraturan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan di pedesaan yang telah menjadi acuan dalam bertindak, karena di dalamnya telah terkandung nilai, norma, penggunaan/pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukungnya, kejelasan orang-orang yang mendukungnya serta cara-cara berpola pengendalian sosial agar kelembagaan tersebut senantiasa terjaga efektif sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan masyarakat.

Salah satu jenis kelembagaan yang berperan cukup penting dalam sektor pertanian adalah lumbung pangan atau lembaga "tunda jual" sebagai suatu instrumen kebijakan untuk mencapai suatu tingkat ketahanan pangan yang lebih sustainable. Persepsi dikalangan masyarakat bahwa lembaga "lumbung desa", "lumbung pangan" "lumbung sosial " dan sejenisnya yang pernah amat maju pada zaman dahulu, kini amat nyaris tidak banyak berperan (Arifin 2004). Oleh karena itu menurut Sumardjo (Margono, 2003) kelembagaan kelompok tani secara efektif dapat memenuhi kepentingan masyarakat dengan gejala-gejala lingkungan sosial sebagai berikut:

- (1) Keanggotaan dan aktivitas kelompok lebih di dasarkan pada masalah, kebutuhan dan minat calon anggota
- (2) Kelompok tani berkembang mulai dari informal efektif dan berpotensi serta berpeluang untuk berkembang ke formal sejalan dengan kesiapan dan kebutuhan kelompok yang bersangkutan
- (3) Status kepengurusan yang dikelola dengan motivasi mencapai tujuan bersama dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama, cenderung lebih efektif untuk meringankan beban bersama sesama anggota, dibanding bila pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri

- (4) Inisiatif anggota kelompok tinggi untuk berusaha meraih kemajuan dan keefektifan kelompok karena adanya keinginan kuat untuk memenuhi kebutuhannya
- (5) Kinerja kelompok sejalan dengan berkembangnya kesadaran anggota, bila terjadi penyimpangan pengurus segera dapat dikontrol oleh proses dan suasana demokratis kelompok
- (6) Agen pembaharu cukup berperan secara efektif sebagai pengembang kepemimpinan dan kesadaran kritis dalam masyarakat atas pentingnya peran kelompok,
- (7) Kelompok tani tidak terikat harus berbasis sehamparan, karena yang lebih menentukan efektifitas dan dinamika kelompok adalah keefektifan pola komunikasi lokal dalam mengembangkan peran kelompok. Komunikasi ini ternyata ibarat urat nadi dan syaraf bagi kehidupan kelompok, yang dapat mengalirkan informasi dan menggerakkan anggota berperan sesuai dengan kebutuhan kelompok.

B. Penguatan Kelompok

Secara sederhana kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Goodman (Idianto, 2004) mendefinisikan kelompok sebagai dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Margono (Setiawan, 2003), kelompok adalah dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan (tujuan, kebutuhan, minat, jenis) yang saling berinteraksi melalui pola struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama, dalam kurun waktu yang relatif panjang

Haiman (1951) mendefinisikan kelompok sebagai dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis eksplisit satu dengan yang lain. Sedangkan Schein (Indrawijaya, 1986) mengartikan kelompok sebagai ikatan psikologis sejumlah orang yang saling berhubungan, saling memperhatikan (secara psikologis), dan menerima kenyataan sebagai suatu kelompok.

Haiman menyebut alasan utama keberadaan kelompok adalah bahwa setiap anggota percaya bahwa dia akan dapat memenuhi sebagian kebutuhannya yang tak dapat ia penuhi sendiri dengan cara berkolaborasi dengan orang lain. Seseorang akan tetap berada dalam kelompok sepanjang ia masih percaya bahwa menjadi bagian dari kelompok tetap lebih menguntungkan dibanding meninggalkannya. Haiman membagi kelompok menjadi kelompok belajar dan kelompok bertindak. Kelompok belajar adalah yang terbentuk berdasar kebutuhan untuk berbagi gagasan dan perasaan, dan juga untuk mendapat pengertian lebih dari orang-orang lain. Sedangkan kelompok bertindak adalah kelompok yang berdasar kebutuhan untuk bekerjasama dalam membuat keputusan maupun kerja yang tak dapat ditangani sendiri.

Berdasarkan rumusan tersebut, Hamner dan Organ (Uchrowi, 2006) menyebut adanya empat hal penting dalam kelompok, yaitu adanya saling berhubungan (interaksi), saling memperhatikan, merasa sebagai satu kelompok dan untuk pencapaian tujuan bersama. Senada dengan rumusan tersebut, Duncan (Indrawijaya, 1989) mengemukakan suatu kelompok terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, interaksi tersebut bersifat relatif tetap dan mempunyai struktur tertentu.

Selanjutnya Duncan menyebut empat ciri utama kelompok, yaitu:

- (1) Anggota suatu kelompok paling tidak harus punya satu tujuan bersama
- (2) Hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Tingkat pengaruh tersebut diantara mereka dapat berbeda
- (3) Dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat/status, karena selalu ada pimpinan dan pengikut
- (4) Karena kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukannya disertai oleh pola tingkah laku dan sistem nilai bersama. Setiap anggota kelompok diharapkan mengikuti pola tersebut.

Berkaitan dengan identitas, Lau dan Shani (1992) menyebut kelompok sebagai sebuah himpunan tiga orang atau lebih yang dapat mengidentifikasi diri atau diidentifikasi oleh orang lain sebagai kelompok. Namun beberapa pandangan menyatakan bahwa tidak semua kumpulan manusia adalah kelompok. Cartwright dan Zander (1968) mengemukakan, " adalah tidak benar bahwa setiap kumpulan manusia merupakan suatu kelompok ". Suatu kumpulan orang hanya layak disebut sebagai suatu kelompok bila mereka berhubungan satu dengan lainnya dengan pola yang jelas. Demikian pula kesamaan atau ketidak samaan bukan kriteria untuk menetapkan orang-orang berada dalam kelompok yang sama atau berbeda. Kelompok yang kuat dan terorganisasi baik, jauh dari homogen serta berisikan beragam sub-kelompok dan individu yang berbeda. Mardikanto (1993) menyebut kelompok berbeda dengan kerumunan. Anggota kelompok memiliki interaksi kuat satu sama lain. Pada kerumunan, orang-orang secara fisik tampak bersatu, namun sebenarnya tidak ada hubungan atau interaksi antar individu yang ada ditempat itu.

Pengembangan kelompok berlangsung secara bertahap. Tahapan tersebut adalah pembentukan, pembadaian (*storming*), penormaan, penyelenggaraan (*performing*), dan istirahat (*adjourning*). Pada tahap awal tertuju pada masuknya anggota ke dalam kelompok. Kebutuhan individu dan kemampuan kelompok untuk memenuhinya menjadi perhatian utama. Setelah tahap tersebut terlampaui, kelompok akan masuk pada tahap tekanan dan emosi tinggi diantara anggotanya. Pada tahap ini setiap individu mulai mengenal karakter individu lain. Pada tahap berikutnya kelompok mengalami integrasi, harmoni dikedepankan, pandangan minoritas akan tersisih. Menurut Schermerhorn, *et al.* , (Uchrowi, 2006).Keadaan ini akan menjadi fondasi bagi tahap kematangan kelompok. Pada tahap ini kelompok akan terorganisasi dan mampu menangani tugas-tugas yang kompleks. Setelah menyelesaikan tugasnya, maka kelompokpun memasuki fase istirahat.

Robert Bierstedt (Idianto, 2004) mengungkapkan bermacam-macam jenis kelompok, yakni: (a) kelompok sosial yang teratur, (b) kelompok sosial

yang tidak teratur. Kelompok sosial yang teratur meliputi: (1) *in-group dan out group*, (2) kelompok primer dan sekunder, (3) paguyuban, (4) *formal group dan informal group*, dan (5) *membership group dan reference group*. Sedangkan kelompok sosial yang tidak teratur meliputi: (1) kerumunan (*crowd*) adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan pada waktu yang bersamaan, (2) publik adalah orang-orang yang berkumpul yang mempunyai kesamaan kepentingan.

In-group dan out-group adalah kelompok sosial dimana individu mengidentifikasi dirinya dalam kelompok tersebut. Sifat *in-group* biasanya didasarkan pada faktor simpati dan kedekatan dengan anggota kelompok. Kelompok primer adalah kelompok kecil yang anggota-anggotanya memiliki hubungan dekat, personal dan langgeng. Kelompok sekunder adalah kelompok yang lebih besar, bersifat sementara, dibentuk untuk tujuan tertentu dan hubungan-hubungan antar anggota bersifat impersonal sehingga biasanya tidak langgeng.

Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang anggota-anggotanya terikat oleh hubungan batin murni dan bersifat alamiah serta kekal. Hubungannya didasari oleh rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang telah ditakdirkan.

1. Kelompok dalam Masyarakat Pedesaan

Sebagian besar kelompok dalam masyarakat pedesaan adalah kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok paguyuban lainnya. Kelompok tersebut memiliki ketahanan kelompok yang sangat membantu kehidupan petani. Kelompok tani adalah himpunan dua orang atau lebih petani yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Secara konsepsi kelompok tani merupakan kumpulan petani yang terikat secara non formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumber daya), keakraban, kepentingan bersama dan saling percaya mempercayai, serta mempunyai kesadaran "kolektif" untuk mencapai tujuan

bersama (Pusat Pengkajian Sumber Daya Manusia Pertanian Departemen Pertanian, 2000).

Kelompok tani merupakan sistem sosial, di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang berinteraksi langsung untuk pencapaian sebuah tujuan dan di arahkan oleh pola-pola terstruktur serta simbol dan pengharapan bersama. Parsons (Soekanto, 1986) dalam membahas aspek bertahannya suatu sistem sosial, menyebut empat fungsi yang terkait kebutuhan yang harus dipenuhi agar suatu kelompok dapat bertahan. Keempat fungsi tersebut biasa diistilahkan sebagai skema AGIL yang merupakan singkatan dari *adaptation, goal attainment, integration, serta latency*. Fungsi adaptasi mengharuskan kelompok mencari sumber daya eksternal yang baru dan teknik-teknik yang efektif lainnya. Fungsi pencapaian tujuan mengharuskan kelompok mengembangkan tujuan agar anggota kelompok memahami tujuan yang ingin dicapai dan mampu memobilisasi sumber daya yang dimiliki. Fungsi integrasi mengharuskan kelompok mampu mengontrol, melindungi dan mengkoordinasikan bagian-bagian dalam kelompok dan mampu menjembatani perbedaan di antara yang kuat dan yang lemah, yang aktif dan pasif, dan sebagainya. Fungsi pemeliharaan pola mengharuskan kelompok mampu mempertahankan standar prosedurnya, menumbuhkan perasaan serta hubungan efektif anggotanya, mendorong aturan-aturannya serta meneguhkan keyakinan-keyakinan para anggotanya.

Kelompok tani tidak hanya sekedar kelompok untuk saling mengenal antara anggotanya, saling akrab, saling percaya mempercayai, mempunyai pandangan dan kepentingan bersama karena persamaan tradisi, pemukiman, hamparan kegiatan usahatani, jenis usaha dan sebagainya, akan tetapi di masa depan kelompok tani harus memiliki daya saing tinggi yang mampu memberdayakan petani dan menghadapi era globalisasi pasar.

Upaya pengembangan kelompok tani sebagai basis kegiatan ekonomi di pedesaan perlu dilihat secara komprehensif, disesuaikan dengan tujuan pembangunan pertanian pada masa yang akan datang.

2. Dinamika Kelompok

Pembahasan dalam buku ini terkait pula dengan dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu keadaan dimana suatu kelompok dapat menguraikan, mengenali kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam situasi kelompok yang dapat membuka perilaku kelompok dan anggota-anggotanya (Margono dalam Setiawan, 2003).

Cartwright dan Zander (1968), menyatakan bahwa dinamika kelompok mengandung tiga makna. Pertama, sebagai ideologi politis menyangkut bagaimana kelompok diorganisasikan atau dikelola. Kedua, terkait dengan teknik seperti observasi dan timbal balik dalam proses kelompok, atau mengenai keputusan kelompok. Ketiga, menyangkut kondisi alamiah kelompok, hukum-hukum yang berlaku dalam pengembangan kelompok, interaksi antar anggota dan sebagainya. Adapun unsur-unsur dinamika kelompok menurut Margono adalah: (1) tujuan kelompok, (2) struktur kelompok, (3) fungsi tugas, (4) pembinaan dan pengembangan kelompok, (5) kekompakan kelompok, (6) suasana kelompok, ketegangan kelompok, (7) keefektifan kelompok, dan (8) maksud tersembunyi.

Margono (Setiawan, 2003) menjelaskan bahwa semua unsur tersebut adalah peubah (*variables*) yang nilainya berbeda antara satu dan lain kelompok, dan bisa berubah dalam satu kelompok yang sama. Kemudian nilai masing-masing peubah tersebut bergerak dalam satu garis kontinum. Guna pembinaan kelompok, masing-masing peubah itu dapat dimanipulasi agar bisa menjadi baik nilainya, dan dengan demikian akan meningkatkan dinamika kelompok itu. Kondisi suatu kelompok dapat dianalisis dengan mengukur nilai dari masing-masing unsur. Unsur yang nilainya tidak baik dianggap menjadi sumber kurang

dinamisnya kelompok itu. Oleh karena itu bila unsur tersebut diperbaiki keadaannya, bisa berpengaruh pada meningkatnya keefektifan kelompok.

Terdapat empat unsur dalam dinamika kelompok yakni : tujuan kelompok, fungsi tugas, pembinaan dan pengembangan kelompok serta kekompakan kelompok. Dinamika kelompok bukan satu-satunya pendekatan dalam pengkajian kelompok. Menurut Margono (2005) kelompok merupakan suatu sistem sosial dan suatu proses sosial, dan di dalam pembahasan kelompok dijelaskan pula pentingnya aspek kepemimpinan khususnya model kepemimpinan kelompok informal.

3. Interaksi Sosial dalam Kelompok

Interaksi sosial antar individu dalam kelompok merupakan aspek yang sangat penting sebagai suatu proses belajar, sosialisasi dan pengambilan keputusan terhadap kegiatan usaha yang saling menguntungkan. Menurut Gillin dan Gillin (Soekanto, 1986), interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar orang perorang, antar kelompok-kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai dan pada saat itu mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi.

Interaksi sosial adalah suatu proses dimana individu memperhatikan dan merespon terhadap individu lain sehingga dibalas dengan suatu tingkah laku tertentu (Mar'at, 1981). Reaksi yang timbul menandakan bahwa individu memperhatikan orang yang memberi stimulus. Adanya perhatian terhadap stimulus menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Oleh sebab itu dalam proses interaksi sosial selalu diikuti sertakan proses belajar, sosialisasi dan pengambilan keputusan yang relevan.

Individu yang hidup bersama dalam suatu masyarakat sudah jelas saling berinteraksi satu dengan yang lain. Oleh karena itu interaksi

sosial adalah proses dimana manusia saling mempengaruhi dan merumuskan pikiran, perasaan, harapan dan kecemasan (Soesanto, 1985). Koentjaraningrat (1990), menyatakan interaksi merupakan keterhubungan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dan individu dengan kelompok tanpa memperhatikan kesamaan status yang ada. Oleh sebab itu, interaksi yang terjadi karena ada keterhubungan antara dua subjek yang menguntungkan atau merugikan. Terciptanya interaksi yang menguntungkan, jika kondisi saling menambah keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak dalam proses interaksi tersebut.

Demikian halnya Knowles (Gunawan, 2000), menyebut interaksi sebagai komunikasi para anggota kelompok yang berkaitan satu dengan yang lain, saling mempengaruhi dan memberi reaksi untuk menunjukkan kesadaran seorang anggota akan kehadiran anggota lain dalam kelompok berdasarkan kepentingan dan kebutuhan bersama.

Interaksi sosial akan menumbuhkan nilai-nilai positif seperti pentingnya kerjasama, kepercayaan serta ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku untuk disepakati bersama. Manusia sebagai individu maupun kelompok perlu diberdayakan agar memiliki nilai-nilai positif tersebut yang sering diistilahkan sebagai *social capital*.

Secara sederhana, Fukuyama (2002), menyebutkan *social capital* bisa di defenisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya kelompok atau organisasi menjadi lebih efisien.

Kepercayaan adalah produk yang sangat penting dari norma-norma sosial kooperatif yang memunculkan *social capital*. Jika masyarakat bisa diandalkan untuk tetap menjaga komitmen, norma-norma saling menolong dan menghindari perilaku oportunistik, maka berbagai

kelompok akan terbentuk secara lebih cepat, dan kelompok-kelompok yang terbentuk tersebut akan mampu mencapai tujuan-tujuan bersama secara efisien.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial merupakan hal sangat penting dalam kehidupan bersama khususnya dalam kelompok karena tanpa interaksi maka individu atau kelompok akan kehilangan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan baru terjadi jika manusia bekerjasama, saling berbicara, saling berdiskusi, saling peduli serta saling mempercayai dalam mengembangkan usaha. Dengan interaksi sosial itu pula dapat berfungsi sebagai wahana pembelajaran agar menjadi lebih arif dan memiliki kemampuan membangkitkan kesadaran untuk menolong dan membantu diri sendiri.

4. Kelompok sebagai Media Pemberdayaan

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Friedmann dalam Nasdian (2003) menyatakan bahwa kemampuan individu senasib untuk mengorganisir diri dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif ditingkat komunitas (*collective self-empowerment*). Kendati demikian maka dalam mengorganisir individu senasib tersebut sangat diperlukan adanya kepemimpinan dalam kelompok. Menurut Margono (Setiawan, 2003), kepemimpinan adalah proses mempengaruhi perilaku orang banyak. Kepemimpinan itu sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain. Perilaku tidak hanya yang terlihat, tetapi pikirannya, keyakinannya, dan sikap mentalnya. Kemudian diperlukan pula komunikasi, karena melalui komunikasi dalam kelompok akan terjadi suatu *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam, dan mengenali kepentingan mereka bersama. Melalui kelompok masing-masing

individu belajar untuk menganalisis secara kritis situasi sosial mereka (kelompok dan komunitasnya). Individu dalam kelompok, belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka. Dengan kata lain warga komunitas dalam kelompoknya, belajar untuk mendefinisikan masalah serta merancang suatu solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Hal ini bisa dilakukan jika ditunjang adanya kerjasama yang baik antara anggota kelompok. Dengan demikian unsur kerjasamapun sangat diperlukan dalam membina hubungan yang baik dalam kelompok.

5. Pengembangan Usaha Kelompok

Pengertian usaha kelompok adalah proses memanfaatkan dan mengelola sumberdaya oleh kelompok untuk mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan. Di dalam kelompok ditemukan dua macam bentuk pengelolaan usaha, yaitu usaha perorangan dan usaha kelompok. Usaha perorangan adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh masing-masing anggota kelompok. Tanggung jawab pengelolaan, keberhasilan dan resiko kegagalan sepenuhnya berada pada anggota yang memiliki usaha tersebut. Sedangkan usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok, artinya yang dilakukan tersebut dikelola oleh kelompok atau orang yang ditunjuk oleh kelompok untuk melakukan usaha.

Susapto dan Widayati (Uchrowi, 2006) menekankan aspek pengembangan usaha bagi kelompok swadaya masyarakat. Pengembangan usaha tersebut perlu didasarkan pada karakteristik wilayah tempat kelompok berada. Untuk wilayah pegunungan, misalnya, dapat berupa usaha peternakan, pertanian sayuran maupun perkebunan. Untuk wilayah pantai dan sungai dapat berbasisikan perikanan seperti budidaya ikan keramba, usaha industri rumah tangga dapat dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

6. Pengembangan Jaringan Kerja

Pengertian jaringan kerja adalah sejumlah kegiatan kerjasama yang saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan dalam konteks kelompok, maka yang dimaksud dengan jaringan kerja adalah kegiatan kerjasama antar anggota kelompok dengan pihak-pihak lain diluar kelompok. Jaringan kerja kelompok digambarkan sebagaimana sarang laba-laba, dimana kelompok digambarkan sebagai laba-labanya, sedangkan rumah laba-laba yang terdiri dari beberapa dan terikat oleh tempat dimana jaringan berada. Gambaran tersebut dapat terjadi apabila kelompok sudah bekerjasama dengan banyak pihak. Dengan demikian kelompok yang ingin mengembangkan aspek organisasi, usaha dan permodalannya seyogyanya juga memperhatikan atau meningkatkan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Tanpa ada kerjasama dengan pihak lain, kelompok akan sulit mengembangkan ketiga aspek yang lain. Semakin banyak terjadi kerjasama antara kelompok dengan pihak lain dan diikuti dengan kualitas kerjasama yang baik akan semakin memberikan peluang bagi kelompok untuk lebih cepat berkembang.

Kerjasama kelompok dalam pengertian luas adalah kerjasama antara kelompok dengan pihak lain diluar kelompok, misalnya Lembaga pemerintah, Bank, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lainnya.

Jaringan kerja kelompok dengan pihak lain sering diwujudkan dengan pola kemitraan. Pola kemitraan agribisnis sebagai suatu inovasi berpotensi untuk menjadi suatu strategi peningkatan pendapatan petani, melalui penggunaan teknologi, peningkatan mutu produk, pengaturan jumlah produk dan jadwal tanam (Purnaningsih, 2006). Pola kemitraan merupakan strategi dalam meningkatkan kinerja pelaku agribisnis khususnya pengusaha kecil. Dalam pola kemitraan, pihak perusahaan mamfasilitasi pengusaha kecil dengan modal usaha, teknologi, manajemen modern dan kepastian pemasaran hasil,

sedangkan pengusaha kecil melakukan proses produksi sesuai dengan petunjuk teknis dari pihak pengusaha besar. Dengan memaksimalkan kekuatan-kekuatan dan meminimalkan kelemahan-kelemahan dari kedua belah pihak yang bermitra maka pihak perusahaan maupun pengusaha kecil akan memperoleh keuntungan. Pihak perusahaan dapat memperoleh produk sesuai dengan kualitas yang diinginkan, mendapat jaminan pasokan bahan baku, dengan meminimalkan resiko kegagalan. Namun ditemukan pula bahwa sampai saat ini pola kemitraan masih menghadapi banyak tantangan dalam rangka mencapai kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bermitra, baik dalam aspek kemitraan, aspek produktivitas, aspek pemasaran dan aspek kelembagaan. Banyak kasus penerapan pola kemitraan yang tidak bisa berlanjut karena berbagai alasan, baik alasan yang bersumber dari pengusaha kecil maupun perusahaan, koperasi atau pedagang pengumpul.

7. Manfaat Kerjasama dalam Kelompok

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh kelompok dengan adanya kerjasama adalah antara lain:

- (1) Persoalan yang dihadapi kelompok termasuk anggotanya seringkali terlalu berat untuk diatasi sendiri karena keterbatasan yang dimiliki. Sementara ada pihak lain yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam mengatasi persoalan tersebut, sehingga terjadi saling tukar pengalaman diantara keduanya
- (2) Meningkatkan tugas yang harus dihadapi oleh masing-masing pihak
- (3) Penggabungan sumber daya dari dua pihak atau lebih akan menghasilkan tujuan yang lebih baik (efektif dan efisien)
- (4) Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk dapat mengembangkan kemampuannya Sedangkan kelompok yang mandiri dalam aspek kerjasama dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Memiliki inisiatif kerjasama
- (b) Mendasarkan pada prinsip kesetaraan
- (c) Mengoptimalkan keuntungan bagi kelompok maupun anggotanya
- (d) Cara mengembangkan kerjasama.

Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan usaha kelompok diperlukan kerjasama antara kelompok dengan pihak lain atau dengan pola kemitraan dengan perusahaan, lembaga keuangan atau pihak-pihak lainnya diluar kelompok. Kerjasama yang ada akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan bermitra akan lebih baik dibanding tidak bermitra.

8. Pelatihan Kelompok

Pelatihan merupakan salah satu kegiatan pendidikan dimana didalamnya terdapat proses belajar-mengajar dengan mempergunakan teknik dan metoda tertentu. Pelatihan diartikan pula sebagai proses pengajaran, memberitahu, atau mendidik orang-orang sehingga mereka memiliki kualitas untuk melaksanakan tanggung jawab dan kesulitan yang lebih besar

Menurut Siagian (1982), pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang atau sekelompok orang. Biasanya orang yang mengikuti pelatihan adalah yang produktivitas kerjanya dirasakan perlu ditingkatkan secara terarah dan programatik. Sedangkan menurut Manullang (1996) pelatihan merupakan usaha untuk mengembangkan kecakapan atau menambah keahlian dan efisiensi kerja seseorang.

Pelatihan merupakan bagian dari aspek pengembangan sumber daya manusia. Werther dan Davis (Uchrowi, 2006) mengaitkan aspek pengembangan sumber daya manusia dengan evaluasi hingga meliputi orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, perencanaan

karir serta penilaian kerja. Hal tersebut merupakan rangkaian kegiatan manajemen sumber daya manusia.

Tujuan dari suatu program pelatihan (*training*) adalah untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan, pelaksana hendaknya melakukan analisa tentang kebutuhan, tujuan, sasaran, serta isi dan prinsip belajar terlebih dahulu agar pelaksanaan program pelatihan tidaklah sia-sia (Umar, 2004).

Bagi anggota kelompok dan keluarganya, pelatihan adalah proses pembelajaran yang perlu direncanakan terlebih dahulu agar materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Program pelatihan hendaknya bersifat partisipatif, relevan, memungkinkan terjadinya pemindahan keahlian serta memberikan *feedback* dalam mengikuti pelatihan.

C. Pengembangan Partisipasi

Pengembangan partisipasi merupakan sebuah pendekatan dalam program pemberdayaan masyarakat. Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya (Uphoff, 1992). Partisipasi adalah suatu proses dimana berbagai pelaku (*stakeholders*) dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumberdaya yang berpengaruh terhadap mereka (Bank Dunia, 1994).

Mubyarto (1984) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan Nelson (Bryant dan White, 1982) menyebut dua macam partisipasi, yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan

partisipasi horizontal, dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dan atasan atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan, kampanye dan sebagainya, disebut partisipasi dalam partai politik. Sedangkan keterlibatan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administrasi.

Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individu dalam kegiatan kelompok disebut partisipasi individual. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan membangun prakarsa dimana setiap orang atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal antara satu dengan lainnya baik dalam melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

Dalam pembangunan pedesaan di Indonesia, partisipasi sepenuhnya dari segenap lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin adalah komponen vital dalam suatu proses pembangunan yang mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri. Oleh sebab itu seringkali diperlukan pendekatan partisipatif dalam pengembangan masyarakat, karena memberi manfaat dalam pelaksanaan program, antara lain; efisien, efektif, menjalin kemitraan, memberdayakan kapasitas, memperluas ruang lingkup, meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, berkelanjutan, memberdayakan kelompok marjinal dan meningkatkan akuntabilitas. Salah satu sisi masalah dalam pendekatan partisipatif ini adalah membutuhkan biaya yang besar dan lambatnya proses pengambilan keputusan. Namun demikian, pengembangan partisipasi tersebut akan mendukung keberhasilan dari pelaksana program yang didampingi dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tergantung kemauan politik (*political will*) dari pemerintah yang berkuasa. Dalam pelaksanaannya, proses partisipatif seharusnya dimulai sejak identifikasi dan analisis *stakeholders*, konsultasi tingkat daerah, penyusunan program pembangunan (strategi program, program investasi, program

pembiayaan, dan program pengembangan kelembagaan), proses pengawasan hingga monitoring dan evaluasi. Dengan demikian pengembangan partisipatif dalam pengembangan masyarakat diharapkan selalu muncul dalam setiap penggalan aspirasi dan kebutuhan, konsultasi, penyepakatan, dan pengambilan keputusan.

Keuntungan-keuntungan lainnya dalam pengembangan partisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- (1) Mampu merangsang timbulnya swadaya masyarakat yang merupakan dukungan penting bagi pembangunan
- (2) Mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam membangun
- (3) Pelaksanaan pembangunan semakin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
- (4) Jangkauan pembangunan menjadi lebih luas, meskipun dengan dana yang terbatas
- (5) Tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak lain.

Prinsip-prinsip tersebut dikembangkan sesuai dengan kondisi lokalitas dan komunitas untuk mengembangkan kreativitas dalam upaya mengembangkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.

BAB IV

PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL

A. Pengembangan Kepribadian

Koentjaraningrat (1990) menyebut "kepribadian" atau *personality* sebagai "Susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia" Dalam bahasa populer, istilah "Kepribadian" juga berarti ciri-ciri watak seseorang individu yang konsisten, yang memberikan kepadanya suatu identitas sebagai individu yang khusus. Menurut para psikolog, istilah "kepribadian" mempunyai arti yang lebih dari pada sekedar sifat menarik. Kepribadian seseorang itu tersusun dari semua sifat yang dimilikinya. Sifat itu bermacam-macam, antara lain:

- (1) Ada yang berkenaan dengan cara orang berbuat, seperti tekun, tabah dan cepat
- (2) Ada yang menggambarkan sikap, seperti sosiabilitas dan patriotisme
- (3) Ada yang berhubungan dengan minat, seperti estetis, atletis dan sebagainya
- (4) Terpenting ialah temperamen emosional, meliputi optimisme, pesimisme, mudah bergejolak, dan tenang.

Allport (1971) menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi-organisasi dinamis dari sistem-sistem psiko-fisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik/khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan definisi tersebut kepribadian memiliki beberapa unsur, yakni;

- (1) Kepribadian itu merupakan organisasi yang dinamis dan tidak statis tetapi senantiasa berubah setiap saat
- (2) Organisasi tersebut terdapat dalam diri individu dan tidak meliputi hal-hal yang berada diluar diri individu

- (3) Organisasi itu berdiri atas sistem psikis, yang menurut Allport, meliputi sifat dan bakat serta sistem fisik yang saling terkait
- (4) Organisasi itu menentukan corak penyesuaian diri yang unik dari tiap individu terhadap lingkungannya.

Kepribadian menurut Atkinson dkk (Farozin dan Kartika, 2004), merupakan segala bentuk pola pikiran, emosi dan perilaku yang berbeda dan merupakan karakteristik yang menentukan gaya personal individu dan mempengaruhi interaksinya dengan lingkungan. Whiterington (Farozin, 2004) menggambarkan kepribadian sebagai keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan, sebagaimana yang tampak pada orang lain. Kepribadian bukan hanya yang melekat pada diri seseorang, tetapi lebih merupakan hasil dari suatu pertumbuhan yang lama dalam suatu lingkungan kultural.

Pada dasarnya, setiap orang termasuk di dalamnya para ahli di bidang psikologi kepribadian, memiliki anggapan-anggapan atau asumsi-asumsi dasar tertentu tentang manusia. Asumsi-asumsi ini diperoleh melalui hubungan pribadi atau pengalaman-pengalaman sosial secara nyata. Dalam membuat asumsi tersebut para ahli ada yang berpandangan optimistik tentang manusia dan juga ada yang berpandangan pesimistik.

Koswara (Farozin, 2004) menjelaskan beberapa asumsi dasar tentang manusia yang saling berlawanan seperti pandangan bahwa manusia mempunyai kebebasan-ketidak bebasan, rasionalitas-irrasionalitas, holisme-elementalisme, konstitusionalisme-enviromentalisme, berubah-tak berubah, subjektivitas-objektivitas, proaktif-reaktif, homeostatis-heterostatis, dapat diketahui-tidak dapat diketahui, dan lain-lainnya. Pandangan tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- (1) Kebebasan–Ketidak bebasan; anggapan ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas berkehendak, bebas menentukan sikap dan bebas menentukan arah kehidupannya. Anggapan dasar yang menyatakan bahwa manusia adalah sosok yang tidak bebas didasari anggapan bahwa manusia adalah organisme yang tingkah lakunya ditentukan oleh sejumlah faktor penentu

- (2) Rasionalitas-Irrasionalitas, yaitu seberapa besar pengaruh akal terhadap tingkah laku manusia. Manusia adalah makhluk yang rasional yang dianut oleh teoris kepribadian humanistik, sedangkan manusia sebagai makhluk yang tidak rasional dianut oleh tokoh-tokoh aliran psikoanalisa
- (3) Holisme-Elementalisme yang berasal dari psikologi gestalt yang menekankan bahwa suatu fenomena harus dilihat dan hanya bisa dimengerti sebagai suatu totalitas atau keseluruhan. Sedangkan prinsip elementalistik menekankan bahwa suatu hal hanya bisa dipelajari atau diterangkan dengan jalan menyelidiki aspek-aspeknya secara terpisah
- (4) Konstitusionalisme-Environmentalisme, yang menyatakan bahwa pada hakekatnya manusia sudah memiliki sifat bawaan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan pandangan environmentalisme menyatakan bahwa hakekatnya sifat-sifat manusia ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari lingkungan
- (5) Berubah-tak berubah, yaitu bahwa manusia merupakan individu yang berubah Maslow juga berpegang pada anggapan bahwa kepribadian selalu ada dalam perubahan menuju taraf yang lebih tinggi sehingga Maslow juga termasuk teoris kepribadian yang berpandangan bahwa manusia adalah sosok yang berubah
- (6) Subjektivitas-objektivitas, yaitu pandangan bahwa manusia merupakan individu yang hidup dalam pengalaman yang subjektif, dianut oleh tokoh aliran humanistik, dan manusia adalah makhluk yang hidup dalam pengalaman yang objektif dianut oleh tokoh aliran behavioristik
- (7) Proaktif – reaktif, yaitu pandangan yang pada dasarnya mengacu pada sumber penyebab perilaku manusia , yakni sumber penyebab dari seluruh tingkah laku manusia berada dalam diri manusia itu sendiri. Pandangan proaktif, menyatakan bahwa seluruh tingkah laku manusia di dorong oleh penyebab dari dalam diri manusia itu sendiri yang sebagian besar tidak disadari
- (8) Homeostatis – Heterostatis, yaitu konsep yang bersumber pada gagasan *equilibrium* (keseimbangan) yang menerangkan bahwa tingkah laku

manusia digerakkan kearah pengurangan ketegangan karena adanya ketidak seimbangan sampai terjadi keseimbangan yang optimal. Konsep heterostatis menyatakan bahwa tingkah laku manusia tidak digerakkan oleh kekuatan-kekuatan internal seperti naluri atau drive dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan, melainkan sebagai hasil atau pengaruh dari kekuatan-kekuatan eksternal.

Margono (Setiawan, 2003), menyatakan kepribadian manusia terbentuk dari banyak sekali komponen (sifat), dan setiap komponen merupakan variabel. Kemudian setiap orang memiliki kepribadian yang susunan komponennya berbeda dengan orang lain, karena itu setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Lebih lanjut , Slamet mengidentifikasi 135 sifat-sifat dari kepribadian manusia yang dikelompokkan menjadi empat golongan kepribadian, yaitu : (1) sanguinis yang populer, (2) melankolis yang sempurna, (3) koleris yang kuat , dan (4) phlegmatis yang damai.

Sama halnya Hippocrates dan Galenus (Sobur, 2003) mengemukakan bahwa manusia bisa dibagi menjadi empat golongan menurut keadaan zat cair yang ada dalam tubuhnya yakni:

- (1) Melancholicus (*melankolisi*), yaitu orang-orang yang banyak empedu hitamnya, sehingga orang-orang dengan tipe ini selalu bersikap murung atau muram, pesimistis, dan selalu menaruh rasa curiga
- (2) Sanguinicus (sanguinisi), yakni orang-orang yang banyak darahnya, sehingga orang-orang tipe ini selalu menunjukkan wajah yang berseri-seri, periang atau selalu gembira, dan bersikap optimistis
- (3) Flegmatis (flegmatisi), yaitu orang-orang yang banyak lendirnya. Orang tipe ini sifatnya lamban dan pemalas, wajahnya selalu pucat, pesimis, pembawaannya tenang, pendiriannya tidak mudah berubah
- (4) Cholericus (*koleris*), yakni yang banyak empedu kuningnya. Orang tipe ini bertubuh besar dan kuat, namun penakut darah dan sukar mengendalikan diri, sifatnya garang dan agresif.

Heyments (Sobur, 2003) mencoba membuat pembagian kepribadian manusia berdasarkan sifat psikis yang menurut pendapatnya, merupakan

sifa-sifat pokok dari jiwa manusia. Sifat psikis tersebut ialah emosionalitas, aktifitas, dan sekunder fungsi (proses pengiring). Heyments membagi tipe kepribadian manusia berdasarkan kuat lemahnya ketiga unsur diatas dalam diri setiap orang, menjadi tujuh tipe seperti berikut:

- (1) *Gapasioneerden* (orang hebat): orang yang aktif dan emosional serta fungsi sekundernya kuat. Orang ini selalu bersikap keras, emosional, gila kuasa, egois, suka mengecam. Mereka adalah patriot yang baik, memiliki rasa kekeluargaan yang kuat dan suka menolong orang yang lemah
- (2) *Cholerici* (orang garang): orang yang aktif dan emosional, tetapi fungsi sekundernya lemah. Orang ini lincah, rajin bekerja, periang, pemberani, pemboros dan sering bertindak ceroboh tanpa pikir panjang
- (3) *Sentimentil* (orang perayu): orang yang tidak aktif, emosional dan fungsi sekundernya kuat. Orang ini suka bersikap emosional, sering impulsif (menurutkan kata hati), pintar bicara sehingga mudah mempengaruhi orang lain, senang terhadap kehidupan alam, dan menjauhkan diri dari kebisingan dan keramaian
- (4) *Nerveuzen* (orang penggugup): orang yang tidak aktif dan fungsi sekundernya lemah, tetapi emosional kuat. Orang-orang tipe ini sifatnya emosional (mudah naik darah, tetapi cepat menjadi dingin), suka memprotes/mengecam orang lain, tidak sabar, tidak mau berpikir panjang, agresif, tetapi tidak pendendam
- (5) *Flegmaciti* (orang tenang) : orang yang tidak aktif dan fungsi sekundernya kuat. Orang-orang tipe ini selalu bersikap tenang, sabar, tekun bekerja secara teratur, tidak lekas putus asa, berbicara singkat tetapi mantap. Mereka berpandangan luas, berbakat matematika, senang membaca dan memiliki ingatan yang baik. Orang tipe ini rajin dan cekatan serta mampu berdiri sendiri tanpa memerlukan banyak bantuan orang lain
- (6) *Sanguinici* (orang kekanak-kanakan) : orang yang tidak aktif, tidak emosional, tetapi fungsi sekundernya kuat. Orang ini antara lain sukar mengambil keputusan, kuang berani/ragu-ragu bertindak, pemurung, pendiam, suka menyendiri, berpegang teguh pada pendiriannya,

pendendam, tidak gila hormat dan kuasa, dan dalam bidang politik selalu berpandangan konservatif

- (7) *Amorfen* (orang tak berbentuk) : orang-orang yang tidak aktif, tidak emosional dan fungsi sekundernya lemah. Sifat-sifat tipe orang ini antara lain, intelektualnya kurang, picik, tidak praktis, selalu membeo, canggung, dan ingatannya buruk. Mereka termasuk orang yang perisau, peminum, pemboros dan cenderung membiarkan dirinya dibimbing dan dikuasai orang lain

Berdasarkan berbagai pandangan tentang manusia yang menjadi kecenderungan dari kepribadian manusia tersebut, maka dalam pembahasan buku ini, kepribadian yang dipilih adalah sifat-sifat yang relevan dengan perilaku yang didasarkan pada asumsi yang optimistik bahwa setiap manusia memiliki sifat-sifat yang baik, dan sifat-sifat tersebut dapat menjadi kekuatan untuk menilai kepribadian manusia. Sifat-sifat tersebut dikelompokkan sebagai sifat-sifat yang dinamis sebagai sifat dan watak manusia. Sifat-sifat lain diungkapkan pula oleh Jomo (1986) antara lain adalah:

- (1) Seorang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Sekali dia melaksanakan tugas maka akan menerima konsekuensi tugasnya sampai akhir. Orang seperti ini bersedia menanggung kesalahan ataupun resiko dan bertanggung jawab atas keagalannya
- (2) Seorang yang selalu aktif dan tekun serta tidak puas seratus persen dengan apa yang telah ia capai; selalu ada keinginan untuk ingin lebih maju serta mempunyai jiwa perintis dan petualang yang selalu ingin mencari pengalaman baru. Dia senang mengambil prakarsa dan selalu berusaha mengubah situasi yang ada dan melihat cakrawala-cakrawala baru
- (3) Seorang yang penuh kreativitas dengan kata lain seorang penemu yang mempunyai banyak kreasi dalam memecahkan suatu persoalan atau untuk mengatasi suatu rintangan. Ini berarti orang tersebut mempunyai banyak ide dan mengerti, bahwa ia selalu mencoba menyesuaikan diri dengan situasi yang baru.

B. Pengembangan Modal Sosial

Pengembangan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat sama pentingnya dengan pengembangan kepribadian yang berkarakter dan berwatak agar masyarakat menjadi tangguh membangun kebersamaan dalam menjalankan program-program pembangunan. Modal sosial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai dan norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka (Fukuyama, 2002).

Konsep modal sosial, pertama dikembangkan oleh seorang sosiolog Perancis yang bernama Pierre Bordieu dan seorang sosiolog Jerman James Coleman. Coleman (Anonim, 2007) mendefinisikan modal sosial sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan antara individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru.

Selanjutnya Putnam (Anonim, 2007) menyebutkan bahwa modal sosial mengacu pada aspek-aspek utama dalam organisasi sosial seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan (*networks*). Dalam penelitiannya di Amerika, Putnam menemukan bahwa modal sosial berkorelasi positif dengan kehidupan demokrasi. Norma-norma dan jaringan sosial yang disepakati bersama telah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas kinerja dari lembaga-lembaga sosial. Hubungan sosial yang tercipta tersebut menghasilkan suatu mutu sekolah yang semakin baik, pembangunan ekonomi yang pesat, menurunnya tingkat kejahatan, dan bahkan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahannya sendiri sebagai representasi dari komunitas masyarakatnya. Modal sosial ini mengacu pada organisasi sosial dengan jaringan sosial, norma-norma dan kepercayaan sosial yang dapat menjembatani terciptanya kerjasama dalam komunitas masyarakat sehingga tercipta suatu kerjasama yang saling menguntungkan.

Zulkifli Lubis (Anonim, 2007) melihat tiga elemen besar dan beberapa variabel dan indikator dari modal sosial sebagai berikut:

- (1) Kepercayaan dengan variabel kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi dan kemurahan hati
- (2) Jaringan sosial dengan variabel partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerjasama dan keadilan
- (3) Pranata (nilai-nilai sosial) dengan variabel nilai bersama, norma-norma dan sanksi serta aturan-aturan.

Ciri-ciri modal sosial adalah:

- (1) Pola komunikasi yang interaktif dan intensif
- (2) Pola transaksi yang tidak didasarkan atas kepentingan material, walaupun bersifat material tetap bersifat rendah resiko
- (3) Keterlibatan yang luas dari masyarakat dan melibatkan kontrol sosial yang luas
- (4) Mengedepankan keseimbangan dan keharmonisan
- (5) Mengutamakan sumberdaya yang dimiliki secara internal
- (6) Bersifat konservatif
- (7) Jangkauan terbatas pada komunitas tertentu.

Dalam konteks kehidupan masyarakat setelah perjalanan 12 tahun reformasi di Indonesia, norma-norma modal sosial seperti: kejujuran, kesopanan, sikap tenggang rasa, saling tolong menolong dan ketundukan kepada hukum seakan semakin menipis. Ikatan-ikatan sosial lama yang mengedepankan sikap-sikap kasih sayang terhadap sesama seakan berganti wajah dan mengalami proses dehumanisasi. Anggota masyarakat seakan menjadi individu yang kaku dan jauh dari kearifan sosial. Maraknya tindakan asusila, perjudian, peredaran narkoba, perkelahian pelajar, pesta seks di tempat terbuka, dan sebagainya seakan menjadi fenomena kehidupan yang akan semakin berakibat buruk. Oleh sebab itu pengembangan norma-norma modal sosial sangat penting dalam program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengembangan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, kesadaran tentang ketaatan pada hukum serta disiplin sosial.

C. Penguatan Lingkungan Sosial

1. Norma dan Nilai Budaya

Norma adalah pedoman-pedoman tentang perilaku yang diharapkan atau pantas menurut kelompok atau masyarakat. Kadang-kadang biasa juga disebut peraturan sosial. Norma-norma sosial merupakan patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan dalam situasi-situasi tertentu dan merupakan unsur paling penting untuk meramalkan tindakan manusia dalam sistem sosial.

Salah satu faktor lingkungan yang sangat penting yang mempengaruhi tingkah laku manusia adalah apa yang disebut kultur atau kebudayaan. Benedict (Warnaen, 2002) menyatakan bahwa sejarah hidup manusia terutama adalah akomodasi terhadap pola standar yang secara tradisional dianut oleh lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, kebiasaan lingkungan membentuk pengalaman-pengalaman hidup dan tingkah lakunya. Adat dan tingkah laku manusia dalam lingkungannya menjadi kebiasaannya, kepercayaan mereka menjadi kepercayaannya, yang tabu buat mereka menjadi tabu juga baginya.

Klineberg (Warnaen, 2002) dalam bukunya *Social Psychology* menyatakan bahwa psikologi sosial mempunyai implikasi pada setiap kelompok masyarakat, akan tetapi variasi latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi tingkah laku manusia tidak boleh diabaikan. Sekarang menurut Linton (Warnaen, 2002) semakin nyata bahwa integrasi antara individu, masyarakat dan kebudayaan sangat erat dan interaksi diantara ketiganya begitu kontinyu.

Turner serta Ritzer dan Gooman (Uchrowi, 2006) menyebut aspek budaya merupakan pelaksana fungsi pemeliharaan pola pada suatu sistem sosial. Disebut Turner bahwa budaya berperan untuk memelihara pola yang ada dalam sistem seperti "bagaimana menjamin para pelaku dalam sistem sosial agar menunjukkan karakteristik yang tepat". Selain itu, sistem ini juga bertugas mengatasi ketegangan diantara para pelaku dalam sistem sosial.

Parsons menempatkan budaya sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial. Budaya tersebut adalah mengenai interaksi antar pelaku, menginteraksikan kepribadian, serta menyatukan sistem sosial

Kebudayaan memiliki sifat universal, dan sistem nilai budaya adalah unsur yang ada pada semua kebudayaan di dunia. Kultur bagi Triandis (Warnaen, 2002) berarti bagian dari lingkungan manusia yang merupakan hasil cipta manusia. Persepsi tentang nilai, aturan dan norma kelompok, serta peran adalah aspek-aspek kultur subyektif. Unsur-unsur terpenting dari kultur subyektif yang disusun oleh Triandis adalah: (a) kategorisasi, (b) evaluasi, (c) asosiasi dan struktur kognitif elementer, (d) keyakinan atau percaya, (e) sikap, (f) stereotip, (g) harapan, (h) norma, (i) ideal, (y) peranan, (k) tugas, dan (l) nilai-nilai.

Norma, menghubungkan kategori orang dengan kategori tingkah laku. Pada umumnya norma menentukan apakah suatu tingkah laku wajar atau tidak wajar. Banyak norma yang lebih bersifat larangan dari pada pedoman. Dan untuk membenarkan norma-norma, digunakan jalinan keyakinan-keyakinan yang dihubungkan dengan nilai-nilai dan ideal-ideal. Sedangkan sistem nilai memberi orientasi kepada warga masyarakat untuk mempunyai preferensi terhadap tipe-tipe tindakan, dan merupakan hubungan antara kategori abstrak dan komponen afektif.

Kluckhohn dan Strodtbeck (Warnaen, 2002) menyusun suatu kerangka universal yang mencakup lima masalah yang menjadi tujuan orientasi semua sistem nilai di dunia, yaitu:

- (1) Masalah hakekat pembawaan hidup manusia seperti jahat, biasa, kombinasi baik dan jahat, baik, mudah berubah, tidak mudah berubah
- (2) Masalah hubungan manusia dengan alam, yang bisa tunduk, harmonis atau menguasai
- (3) Fokus waktu, bisa pada waktu lampau, saat ini atau yang akan datang

(4) Kegiatan manusia yang paling banyak terjadi, bisa berorientasi lebih pada kepuasan sesaat, pada aktualisasi diri, atau pada kegiatan itu sendiri yang dianggap baik

(5) Hubungan seseorang dengan orang lain yang paling sering terjadi, bisa menekankan hubungan lineal.

Kuckholm (Abdul, 1993) memberi makna nilai sebagai suatu konsep baik yang eksplisit maupun implisit, pembeda individu atau suatu kelompok, keinginan yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, alat dan pengambilan keputusan atau tindakan akhir. Nilai-nilai mengandung unsur evaluatif dan lebih abstrak serta mempunyai bangunan struktur yang lebih tinggi. Nilai-nilai pada prinsipnya lebih permanen dan tahan terhadap perubahan, serta mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku. Oleh karena itu nilai-nilai dapat dipandang sebagai penyebab atau faktor penentu terhadap munculnya sikap. Budiman (Abdul, 2000) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat mengarahkan sikap yang positif terhadap perkembangan suatu masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut disimpulkan bahwa individu dalam kelompok di perdesaan sebagaimana individu manusia lainnya memiliki keeratan hubungan dengan kebudayaan. Sikap dan tingkah laku mereka terkait dengan norma dan sistem nilai, serta aturan dan norma kelompok. Dengan demikian integrasi individu, masyarakat dan kebudayaan sangat erat dan interaksi ketiganya begitu kontinyu.

Norma dan nilai budaya orang bugis makassar tidak terlepas dari budaya lokal yang dianut. Munadah (2005) menemukan dalam penelitiannya bahwa orang makassar tidak seperti asumsi banyak orang yang mengatakan bahwa orang Makassar itu kasar, keras. Dia keras tapi bukan kasar. Keras dalam kaitannya dengan pendirian. Di antara mereka masih kental *sipakatau*, saling menghormati sebagai keluarga, saudara dan kerabat; saling membantu, tolong menolong, gotong royong sangat tinggi. Lebih jauh diungkapkan, orang Makassar adalah mereka yang memegang teguh *siri' na pacce*, yang merupakan nilai utama dalam

berperilaku., karena ada prinsip “ hanya dengan *siri* kita hidup didunia. Mereka larut dan menerapkan nilai tersebut dan pemali melakukan *counter* walau hidup di zaman moderen. Mereka sangat terikat secara kultural dengan daerah Makassar. Demikian pula dalam etnis bugis dikenal budaya “resopa tumangingi naletei pammase dewata ” yang artinya Tuhan akan menyayangi hambanya jika mau berusaha dan bekerja keras . Dengan demikian norma dan nilai budaya tidak terlepas dari sikap dan perilaku baik dalam berkelompok maupun dalam bermasyarakat.

2. Peran Pemimpin Informal

Dalam studi kepemimpinan dikenal adanya pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal disebut juga pemimpin resmi yang menduduki kursi kepemimpinan dalam suatu lembaga tetap ditengah masyarakat. Mereka mempunyai nama jabatan, tugas dan tanggung jawab yang sudah dirumuskan secara tegas. Menurut Mangunharjana (Ginting, 1999), pemimpin informal tidak menduduki suatu tempat tertentu dalam struktur kemasyarakatan dan tidak mempunyai naman jabatan serta tidak dibebani tugas tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kalaupun dibebani tugas karena ia memiliki kualifikasi tertentu, seperti di bidang agama, adat dan sebagainya. Pemimpin informal adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal, namun karena ia memiliki kualitas unggul, maka dapat mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi serta perilaku suatu kelompok atau masyarakat (Soekanto, 2002).

Hofstede (Ginting, 1999), pemegang kendali di perdesaan cenderung lebih banyak pada pemimpin informal, dan berpengaruh serta diakui sebagai pemimpin oleh suatu kelompok atau golongan tertentu atau oleh seluruh masyarakat desa . Seseorang tergolong pemimpin informal karena kharisma yang dimilikinya dan sering didatangi warga desa untuk meminta nasehat serta saran dalam memecahkan masalah-masalah

pertanian di pedesaan. Dengan demikian pemimpin informal di desa sering menjadi pusat informasi dan menjadi tempat bertanya dan dimintai pendapat dari warga desa.

Pengertian pemimpin informal dalam buku ini adalah orang-orang yang berpengaruh, memiliki kharisma dan sikap pribadi serta kepedulian terhadap kehidupan orang-orang desa khususnya petani dengan kelompoknya. Dalam interaksi dengan warga desa, pemimpin ini sering memberi dorongan, pengarahan atau nasehat serta memberi bantuan dan dukungan moril kepada warga terutama petani di pedesaan.

Menurut Faisal (1981), pemimpin informal di desa mempunyai pengaruh dan urgensi besar untuk menggalang gerakan bangun diri di kalangan masyarakat desa. Tokoh-tokoh berpengaruh seperti ini menjadi pusat komando masyarakat dan berperan sebagai berikut:

- (1) Memutuskan apa yang akan dilakukan kelompok
- (2) Memberi perintah dan pengarahan
- (3) Memberi sanksi
- (4) Tempat bergantung bagi pengikutnya hampir dalam semua segi kehidupan

Pemimpin informal lain menurut Rogers (1983) adalah yang dapat mempengaruhi warga desa dalam adopsi inovasi yaitu pemuka pendapat (*opinion leaders*) yang memiliki ciri-ciri antara lain:

- (1) Banyak berhubungan dengan media massa
- (2) Kosmopolit
- (3) Sering berhubungan dengan agen pembaharu
- (4) Partisipasi sosialnya besar
- (5) Status sosial ekonominya tinggi
- (6) Lebih inovatif dibanding dengan pengikutnya.

Peranan yang perlu ditampilkan oleh pemimpin informal dalam kaitan dengan tulisan buku ini adalah:

- (1) Memelihara kelompok yang telah terbentuk
- (2) Mengembangkan atau mengembangkan kinerja kelompok
- (3) Mengajak anggota menilai hasil-hasil yang telah dan belum dicapai.

Menurut Ginting (1999), dalam meningkatkan kinerja kelompok, pemimpin informal perlu mengajak pengikut:

- (a) Menyadari adanya kebutuhan dalam arti terdapat kesenjangan antara apa yang telah dicapai
- (b) Mengidentifikasi kebutuhan
- (c) Menyusun rencana kegiatan
- (d) Membagi tugas
- (e) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas
- (f) Mengarahkan kegiatan.

Kinerja yang telah ditampilkan kelompok perlu dinilai sehingga dapat memperoleh umpan balik yang dapat dijadikan masukan bagi perbaikan di masa datang. Penilaian terhadap pelaksanaan tugas perlu dilakukan secara bersama dengan anggota kelompok agar masing-masing dapat mengukur dan mengetahui berapa banyak sumbangan yang telah diberikannya dalam rangka pencapaian tujuan.

D. Peningkatan Produktivitas Kerja

Menurut Dewan Produktivitas Nasional, produktivitas mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Produktivitas mengandung pula arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (*out put*) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (*input*). Produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektifitas yang mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan *input* dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Menurut Nawawi dan Hadari (Djoko, 2006), produktivitas dapat dibedakan sebagai berikut:

- (1) Produktivitas kerja adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah sumber yang dipergunakan (*input*) . Produktivitas dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar dari pada sumber kerja yang dipergunakan. Sebaliknya, produktivitas kerja dikatakann rendah, jika hasil yang diperoleh lebih kecil dari pada sumber kerja yang dipergunakan
- (2) Produktivitas yang diukur dari daya guna (efisiensi) penggunaan personel sebagai tenaga kerja. Produktivitas ini digambarkan dari ketepatan penggunaan metode atau cara kerja dan alat yang tersedia, sehingga volume dan beban kerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia.

Kusriyanto (Djoko, 2006) menyatakan produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu(lazimnya per jam/ orang). Dalam mengukur tingkat produktivitas kerja, maka faktor efisiensi *in put* selalu menjadi tolok ukur. Efisiensi merupakan suatu ukuran membandingkan input yang direncanakan dengan input yang sebenarnya. Apabila input yang sebenarnya digunakan semakin besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Tetapi semakin kecil input yang dapat dihemat kan semakin rendah tingkat efisiensinya. Efektifitas merupakan ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai. Apabila efesiensi dikaitkan dengan efektifitas, walau terjadi peningkatan efektifitas, efisiensinya belum tentu meningkat. Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (Umar, 2004), ada enam faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu:

- (1) Sikap kerja
- (2) Tingkat keterampilan
- (3) Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan
- (4) Managemen produktivitas
- (5) Efisiensi tenaga kerja
- (6) Kewiraswastaan.

Sedarmayanti (Umar, 2003) mengutip tentang ciri-ciri individu yang produktif, yaitu:

- (1) Tindakannya konstruktif
- (2) Percaya diri
- (3) Mempunyai rasa tanggung jawab
- (4) Memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya
- (5) Mempunyai pandangan ke depan
- (6) Mampu menyelesaikan pekerjaan
- (7) Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah
- (8) Mempunyai kontribusi positif terhadap lingkungan
- (9) Mempunyai kekuatan untuk mewujudkan potensinya

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut disimpulkan bahwa produktivitas kerja merupakan perbandingan antara hasil kerja yang diperoleh dengan jumlah sumber yang dipergunakan.

Hal yang sering terlupakan dalam kegiatan pengembangan masyarakat adalah peningkatan kapasitas individu atau kelompok dengan peningkatan produktivitas kerja. Pandangan kelompok marginal (miskin), bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, bukanlah hal yang mampu dimaknai, karena prinsip utama adalah bagaimana kebutuhan dasar mereka segera terpenuhi. Oleh sebab itu materi penyuluhan yang sering dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran akan keadaan diri dan keluarga kelompok sasaran agar mereka mampu memanfaatkan potensi diri dan keluarganya dalam pemanfaatan sumberdaya kehidupan dengan unjuk kerja yang maksimal serta pemanfaatan kualitas dan kuantitas waktu secara efektif. Proses pemberdayaan dapat menjadi guru bagi mereka untuk dapat hidup dengan kerja keras dan menghargai waktu agar semakin produktif

BAB V

DUKUNGAN FAKTOR EKSTERNAL

A. Sumber Daya Alam

Salah satu faktor kunci penanggulangan kemiskinan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah dukungan sumberdaya alam yang dapat membantu ketersediaan pangan. Sumber daya alam memberikan kontribusi yang amat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam pengertian umum, sumber daya alam didefinisikan sebagai suatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Fauzi (2004), menyatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Grima dan Berkes (Fauzi 2004) mendefinisikan sumber daya sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. Res (Fauzi 2004) mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria, yakni:

- (1) Harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (*skill*) untuk memanfaatkannya
- (2) Harus ada permintaan (*demand*) terhadap sumber daya tersebut.

Selain dua kriteria tersebut, definisi sumber daya juga terkait pada dua aspek, yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan, dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan (Fauzi 2004). Jika sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan umat manusia dikemudian hari. Jika sebaliknya justru akan merusak kehidupan generasi mendatang.

Menurut Lopez (Thomas *et al*, 2001), bahwa ekonomi yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari sumber daya alam tidak dapat melestarikan pertumbuhan dengan mengganti akumulasi modal fisik untuk modal alam yang semakin buruk. Dalam memahami sumber daya alam,

ada dua pandangan yang umumnya digunakan. Pertama adalah pandangan konservatif atau sering disebut juga pandangan pesimis atau perspektif *Malthusian*. Dalam pandangan ini, resiko akan terkurasnya sumber daya alam menjadi perhatian utama. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena adanya faktor ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi terhadap sumber daya alam dimasa yang akan datang. Dalam perspektif Malthus, sumber daya alam yang terbatas tidak akan mampu mendukung pertumbuhan penduduk yang cenderung tumbuh secara eksponensial. Pandangan kedua adalah pandangan eksploitatif atau sering juga disebut sebagai perspektif *Ricardian*. Dalam pandangan ini dikemukakan bahwa sumber daya alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan (*engine of growth*) yang mentransformasikan sumber daya alam ke dalam “ *man made capital* “ yang pada gilirannya akan menghasilkan produktifitas yang lebih tinggi di masa mendatang.

Dalam sistem usahatani terdapat sumber daya fisik, biologis dan manusia yang berbeda. Sumber daya fisik seperti tanah, air dan udara saling berinteraksi hingga menciptakan kondisi suhu, angin, curah hujan tertentu dan lain-lain yang unik. Kondisi ini mempengaruhi berfungsinya sumber daya biologis (misalnya tanaman, ternak, burung, serangga, gulma dan mikroorganisme). Organisme yang hidup ini, dengan daur hidup dari kelahiran, pertumbuhan, perkembangbiakan dan kematian, masing-masing berinteraksi satu sama lain dalam proses seperti persaingan, penurunan/regenerasi, simbiosis dan alelopati. Berbagai sumber daya dan proses biologis dan fisik ini secara sengaja dimanipulasi oleh sumber daya manusia di dalam sistem tersebut, dengan segala pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan energinya.

B. Akses Permodalan

Modal merupakan merupakan salah satu faktor produksi dalam meningkatkan usaha kelompok masyarakat di pedesaan di samping tanah, dan tenaga kerja. Yang dimaksud modal adalah yang berhubungan erat

dengan uang baik yang akan dibelanjakan maupun yang disimpan untuk kemudian di investasikan. Dalam memberdayakan masyarakat pedesaan tidak terlepas adanya modal pertanian. Menurut Mubyarto (1995) modal pertanian selalu dinyatakan nilainya dalam uang, misalnya harga ternak, biaya bajak, harga teknologi produksi dan seterusnya. Uang merupakan alat tukar dan pengukur nilai dimana-mana, termasuk di pelosok-pelosok desa, maka uang dianggap merupakan alat utama untuk menciptakan modal. Sebagian petani dapat memenuhi semua keperluan modalnya dari kekayaan yang dimilikinya, bahkan petani kaya dapat meminjamkan modal kepada petani lain yang memerlukan, namun sebagian petani lainnya hanya dapat memiliki modal yang berasal dari pinjaman luar yang biasanya merupakan kredit.

Kredit merupakan alat untuk menciptakan modal yang terdiri dari kredit investasi dan kredit tidak untuk investasi. Kredit investasi adalah kredit yang dipakai untuk membiayai pembelian barang-barang modal yang bersifat tetap yaitu yang tidak habis dalam suatu proses produksi, misalnya tanah, ternak, mesin-mesin dan lain-lain. Sedangkan kredit yang tidak untuk investasi disebut kredit modal kerja misalnya untuk membeli pupuk, bibit, pestisida atau untuk membayar upah tenaga kerja.

Sebagian ahli berasumsi bahwa masyarakat miskin pedesaan memerlukan kredit karena mereka miskin dan modalnya sangat lemah. Kemudian sebagian lainnya mengkritik asumsi tersebut dengan alasan bahwa kredit tidak merupakan syarat mutlak dalam pembangunan pedesaan. Yang mutlak adalah mendorong motivasi petani untuk menggunakan barang-barang modal dan penemuan-penemuan teknologi baru untuk meningkatkan produksi dengan cara menyediakan alat-alat dan bahan-bahan pertanian di dekat petani. Setelah petani didorong motivasinya dan ingin membeli alat-alat dan bahan-bahan tersebut, maka kredit akan melancarkan adopsi dan penerapannya dalam usahatani. Dengan kata lain bukan terletak pada ada tidaknya atau perlu tidaknya kredit, melainkan masih sangat terbatasnya kesempatan petani untuk maju atau kurangnya aspirasi mereka. Namun menurut Mubyarto (1995) bahwa dari penelitian-penelitian di Indonesia dan

di negara-negara lainnya ternyata bahwa tidak ada keragu-raguan tentang sangat pentingnya kredit bagi kemajuan usahatani. Selanjutnya diungkapkan bahwa petani perlu mendapatkan kredit dengan bunga yang wajar, cukuplah dibuktikan dengan larinya mereka kepada para pelepas uang dan terlibatnya mereka dalam sistem ijon.

Hasil penelitian Sudjanadi (Mubyarto 1995) di daerah karawang disimpulkan antara lain: (a) pemberian kredit usahatani dengan bunga yang ringan perlu untuk memungkinkan petani melakukan inovasi-inovasi dalam uasataninya, (b) kredit harus bersifat dinamis yaitu mendorong petani untuk menggunakan secara produktif dengan bimbingan dan pengawasan yang teliti, (c) kredit yang diberikan selain merupakan bantuan modal juga merupakan perangsang untuk menerima petunjuk-petunjuk dan bersedia berpartisipasi dalam program peningkatan produksi, dan (d) kredit pertanian yang diberikan kepada petani tidak perlu hanya terbatas pada kredit usahatani yang langsung diberikan bagi produksi pertanian tetapi harus pula mencakup kredit-kredit untuk kebutuhan rumah tangga (kredit konsumsi).

C. Akses Pada Informasi

Akses pada informasi membuat masyarakat pedesaan memiliki pilihan yang lebih banyak bagi jenis informasi yang ingin mereka dapatkan. Kemajuan teknologi informasi seolah-olah membuat semua orang dapat mengetahui apa saja yang ingin mereka ketahui dengan segera. Naisbitt (Kumaratomo dan Subandi Agus Margono, 1996) mengatakan bahwa kita telah menapaki zaman baru yang dicirikan oleh adanya ledakan informasi (*information explosion*) beserta sepuluh kecenderungan pokok yang sesungguhnya menunjukkan bahwa kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi.

Jika dikaitkan pembangunan masyarakat pedesaan, informasi memegang peranan penting dalam memperkenalkan metode-metode baru, teknologi produksi baru, informasi pasar dan lain-lain. Namun tumpukan

informasi tersebut belum menjamin pemanfaatannya akan lebih baik karena tergantung bagaimana mengorganisir informasi tersebut.

Van den Ban dan Hawkins (1999), informasi merupakan sumber daya penting di dalam pertanian modern. Perkembangan komputer dan perbaikan telekomunikasi memberikan petani kesempatan untuk memperoleh informasi teknis dan ekonomis dengan cepat dan menggunakannya dengan efektif untuk pengambilan keputusan. Diungkapkan, jumlah informasi yang dapat dan harus digunakan oleh petani untuk mengambil keputusan semakin cepat bertambah. Informasi ini meliputi laporan hasil penelitian, data pasar, data tentang pertumbuhan dan proses pengelolaan lahan pertaniannya dan yang serupa sebagai pembanding. Informasi ini digunakan untuk memilih teknologi produksi yang paling menguntungkan, menciptakan kondisi pertumbuhan yang optimal untuk tanaman dan ternaknya, menentukan anggaran pengeluaran dan melihat usaha yang paling menguntungkan serta memutuskan kapan dan dimana menjual hasilnya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka bagi petani, informasi memegang peranan penting dalam membuka wawasan terhadap dunia nyata yang dihadapinya, karena informasi yang diterimanya akan merubah kebiasaan-kebiasaan sikap berusahatani, kemudian membentuk suatu sikap baru yang merupakan dampak penyesuaian informasi lama dengan sejumlah informasi baru yang diterima. Semakin banyak informasi yang diterima akan semakin banyak perubahan-perubahan untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpuaskan dalam diri petani tersebut.

Informasi tersebut akan semakin membangkitkan motivasi dan kinerja petani untuk mencari ide-ide baru dalam praktek pertaniannya, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja petani. Untuk mengenali permasalahan yang sebenarnya yang sedang dihadapi dituntut memperoleh informasi yang lebih banyak dan petani yang mempunyai akses terhadap sumber informasi cenderung memperoleh informasi yang lebih banyak. Tetapi hal tersebut tergantung pada karakteristik sumber informasi dan kualitas serta intensitas interaksi antara petani dengan sumber informasi tersebut.

Akses informasi pertanian bukan hanya penting bagi petani saja, melainkan bagi penyuluh merupakan suatu keharusan sebagai bahan penyampaian perkembangan pembangunan pertanian kepada petani. Dengan berkembangnya teknologi informasi, penyuluh dapat memberikan petunjuk yang dibuat untuk setiap lahan pertanian tanpa harus mengunjungi sendiri lahan tersebut. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, membuat petani dan penyuluh bisa memilih berbagai alternatif sumber informasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya, baik dari media elektronik seperti radio, televisi dan media cetak seperti surat kabar, majalah, brosur maupun dengan kontak personal. Tersedianya sumber informasi, menyebabkan petani dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkannya dalam membangun pertaniannya tanpa harus kontak langsung dengan penyuluh.

Kaye (Agussabti, 2002) menawarkan langkah-langkah pengolahan data terhadap sejumlah informasi yang telah dikumpulkan dengan melibatkan serangkaian faktor-faktor antara lain:

- (1) Relevansi, apakah informasi tersebut berkaitan erat dengan persoalan yang tengah dihadapi. Apakah informasi itu sesuai dengan perspektif kita dan situasi yang ada
- (2) Akurasi, apakah sumber informasi tersebut layak untuk dipercaya dan dapat diuji kebenarannya
- (3) Kelengkapan, apakah informassi tersebut sudah menerangkan seluruh cakupan yang tengah dipertimbangkan
- (4) Ketajaman, apakah informasi itu menunjukkan perbedaan-perbedaan antara pilihan yang satu dengan yang lain
- (5) Ketepatan waktu, apakah informasi dan data-data tersebut masih berlaku dan absah atau sebaliknya sudah usang
- (6) Keterwakilan, apakah informasi yang dikumpulkan cukup mewakili seluruh kenyataan.

Kemampuan petani dalam mengakses informasi akan berdayaguna jika faktor-faktor tersebut menjadi acuan dalam memanfaatkan informasi untuk usahataniannya. Informasi media massa penyebarannya lebih bersifat

massal yang dapat memperbaiki sistem usahatani, pemasaran dan lebih penting lagi adalah memperbaiki budaya bertani yang belakangan ini masih dianggap berproduktivitas rendah.

BAB VI

KASUS-KASUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kasus-kasus pemberdayaan yang dielaborasi dalam buku ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang penulis pernah laksanakan sejak tahun 2008 hingga 2010. Kasus ini sangat penting untuk disajikan, karena selain sebagai bukti konsistensi antara tulisan ilmiah dan kegiatan yang dilaksanakan juga menjadi pembelajaran bagi siapapun yang merasa perlu melaksanakan aktivitas pemberdayaan masyarakat. Adapun kegiatan itu antara lain:

A. Pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi problema dalam beberapa dekade terakhir, dan kasus tersebut merupakan salah satu masalah utama di Indonesia, sebagaimana juga yang terjadi di beberapa negara. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban. *World Health Organization (WHO)* dalam *World Report* pertamanya mengenai "Kekerasan dan Kesehatan" di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan atau pasangannya sendiri. Kemudian laporan khusus dari PBB mengenai kekerasan terhadap perempuan telah mendefinisikan KDRT dalam bingkai gender sebagai "kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan dikarenakan peranannya dalam lingkup tersebut; atau kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan akibat langsung dan negatif pada perempuan dalam lingkup rumah tangga.

Sebagai contoh, di wilayah Kota Makassar dalam tahun 2007, kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 174 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun 2006 lalu yang hanya 104 kasus (Sohra, 2007). Kenaikan jumlah kasus ini menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Dari 104 kasus tahun 2006 lalu, 40 diantaranya ditangani melalui proses hukum. Sementara di tahun 2007

dengan 174 kasus, 66 kasus diproses hukum. Belum termasuk banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No.7/1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan serta Undang-Undang No.23/2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang lainnya yang mendukung penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, implementasinya belum optimal.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Di sebagian besar masyarakat, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan, padahal kekerasan tersebut merupakan suatu tanggung jawab sosial, terutama terhadap pribadi perempuan yang sering menerima perlakuan kekerasan dan penderitaan. Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan sebagian masyarakat yang sering mengartikan bahwa perempuan adalah sebagai orang yang bertanggung jawab dalam memperbaiki situasi yang didikte oleh norma-norma sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat

endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial dalam masyarakat.

Pembahasan kasus ini akan memberikan fokus pada isu perlindungan terhadap perempuan dan anggota keluarganya melalui pengembangan fungsi keluarga dan pemanfaatan nilai-nilai sosial budaya lokal. Selain solusi hukum terhadap permasalahan tersebut, penelitian ini mengelaborasi pula pentingnya menegakkan fungsi-fungsi keluarga. Parsons dalam Baeti (2007) mengatakan fungsi-fungsi keluarga yang disingkat AGIL adalah fungsi-fungsi yang harus ada dalam keluarga. Keseluruhan fungsi-fungsi tersebut saling berhubungan dan saling tergantung (*interdependensi*). Adapun fungsi keluarga menurut Parsons adalah fungsi adaptasi (*adaptation*), fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*), fungsi integrasi (*integration*), dan fungsi latensi (*latency*). Fungsi adaptasi dalam keluarga bermakna kemampuan keluarga memanfaatkan sumberdaya ekonomi yang ada di dalam dan diluar keluarga agar mampu mempertahankan diri terhadap lingkungannya. Fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*) berkaitan dengan bagaimana keluarga mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan keluarga. Fungsi integrasi (*integration*) menyangkut masalah norma dan komunikasi dalam keluarga, dan fungsi latensi (*latency*) adalah kemampuan keluarga untuk mempertahankan pola-pola yang sesuai dengan nilai keluarga. Keefektifan pelaksanaan fungsi AGIL di duga menentukan keberdayaan keluarga dalam membangun kekuatan keluarga yakni komunikasi, kesejahteraan, komitmen, penghargaan dan waktu kebersamaan (Achord *et al*, 1986).

Berdasarkan studi pustaka, ternyata kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi problem yang bersejarah panjang serta menjamur pada pelbagai kultur dan bangsa. Misalnya, dalam kurun waktu 1885-1905, di Inggris dan Wales, dari 487 pembunuhan yang dilakukan oleh pria, lebih dari seperempat korbannya (124) adalah wanita yang dibunuh oleh suaminya;

dan 115 lainnya ialah pacar atau kekasih dari para pembunuh itu. Data dari Jerman, bahwa sekitar Tahun 1930 menunjukkan bahwa pada umumnya wanita dibunuh oleh orang yang dekat dengan mereka dan ternyata 62 persen dari wanita yang dibunuh oleh orang yang dekat ini dibunuh oleh suami mereka. Data dari Philadelphia (Amerika Serikat) sekitar tahun 1950 menunjukkan 41 persen wanita yang mati terbunuh ternyata dibunuh oleh suami mereka. Di Inggris dan Wales, pada tahun 1962, sebanyak 63 persen dari wanita yang terbunuh, dibunuh oleh suami mereka dan dalam kurun waktu 1967-1971. Dari semua wanita di atas usia 16 yang mati terbunuh, 58 persen dibunuh oleh suami atau kekasih mereka (Gunadi, 2007).

Di Indonesia diperkirakan separuh dari wanita yang terbunuh tersebut ternyata mati di tangan suami atau kekasih mereka sendiri. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KNAP) menyebutkan sepanjang tahun 2004 telah terjadi sebanyak 6.634 atau 47,3 persen kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apa yang menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin meningkat, dan apa yang menyebabkan para pria khususnya kepala keluarga menganiaya orang-orang yang pernah mereka kasihi.

Merry (2006) menyatakan, kekerasan adalah suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Sedangkan Sihite (2007) menyatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Bentuk-bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:

- (a) Kekerasan Fisik
- (b) Kekerasan psikis
- (c) Kekerasan seksual
- (d) Penelantaran rumah tangga. Kekerasan yang muncul dalam analisa tersebut, sebagai sensitifitas jender dan jenis kelamin.

Ada beberapa teori tentang kekerasan dalam keluarga. Teori Goode dalam Gunadi (2007) menyatakan bahwa keluarga, seperti institusi sosial lainnya, bertumpu pada unsur kekuatan paksa atau ancaman akan kekuatan paksa itu. Dengan kata lain, jika kekuatan paksa itu tidak ada, maka struktur keluarga akan runtuh pula. Sebagai contoh, institusi negara mempunyai aparat keamanan dan sistem peradilan yang berfungsi untuk memberi imbalan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan. Institusi sekolah mempunyai perangkat peraturan yang dapat mengeluarkan siswa yang tidak lagi tunduk pada peraturan yang berlaku. Jadi, menurut teori ini, sebagai institusi kecil, keluarga pun tidak lepas dari faktor kekuatan paksa untuk melanggengkan eksistensinya.

Teori sub-budaya kekerasan menjabarkan bahwa kekerasan merupakan pola budaya pada kelompok sosial tertentu dan tindak kekerasan dianggap biasa pada kelompok tersebut. Riset tidak sepenuhnya mendukung teori ini; 34 persen wanita dan 46 persen pria yang terlibat dalam kekerasan rumah tangga tidak bertumbuh besar dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Sudah tentu ada sebagian orang yang tidak ingin mencontoh perilaku kekerasan di lingkungannya. Namun, sebaliknya ada pula orang yang akhirnya merekam dan mengikuti pola kekerasan di lingkungan.

Teori pembelajaran mengatakan bahwa penggunaan kekerasan merupakan respons yang telah “dipelajari” dari keluarga sendiri. Riset tidak sepenuhnya mendukung teori ini pula; ternyata 41 persen pria dan 71 persen wanita tidak bertumbuh besar dalam rumah yang penuh kekerasan. Sungguhpun demikian, ada sebagian orang yang menyerap apa yang disaksikannya pada masa kecil dan membawanya sampai pada usia dewasa. Ada pula yang mengkonsepkan kekerasan terhadap istri sebagai upaya suami untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, kekerasan dilihat sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, bukan tindakan dari orang yang bermasalah atau produk dari keluarga bermasalah. Menurut teori ini, seseorang tidak harus dibesarkan dalam budaya tertentu atau mempunyai masalah kejiwaan tertentu untuk memukul istrinya. Sifatnya yang kaku dan tidak mau menghiraukan orang lainlah yang membuatnya

memukul istri; tolok ukurnya adalah: Apakah keinginannya terpenuhi atau tidak.

Dobash dan Russell dalam Gunadi (2007) dalam bukunya, *Violence Against Wives* berpendapat bahwa pemukulan terhadap istri merupakan produk budaya-historisigius di mana wanita sejak dahulu kala telah dikondisikan untuk menjadi pihak yang harus tunduk kepada suaminya sebab ia merupakan hak milik suaminya. Dengan kata lain, kekerasan terhadap istri merupakan upaya suami untuk kembali menempatkan istri pada kedudukannya. Dalam hal ini, suami merasa tidak bersalah memukul istri karena ia menganggap inilah tanggung jawab dan haknya sebagai suami untuk mengontrol perilaku istrinya. Jadi, kesimpulan teori ini ialah, pemukulan suami terhadap istri merupakan perpanjangan dari dominasi dan kontrol suami atas istrinya. Setiap teori tersebut mencoba menawarkan penjelasan tentang masalah yang kompleks dan berdimensi majemuk Oleh sebab itu setiap analisis masalah kekerasan rumah tangga harus mempertimbangkan semua aspek yang terkait di dalamnya.

Menurut Solichah (2005), meningkatnya tindak kekerasan dalam rumah tangga keluarga akibat ditinggalkannya nilai-nilai agama, di samping tekanan kebutuhan hidup modern dan kurang pahamiannya masyarakat akan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang. Solusi utama mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan kembali kepada nilai-nilai agama. Pemahaman agama yang benar akan membentuk keluarga yang saling memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarganya, serta menghormatinya. Pemahaman ini pula yang dapat membentengi keluarga dari tekanan kebutuhan hidup modern yang tidak rasional, melampaui kemampuan pengadaannya.

Pada dimensi sosiologis, agama adalah salah satu dari institusi sosial, sebagai subsistem dari sistem sosial yang mempunyai fungsi sosial tertentu, misalnya sebagai salah satu pranata sosial (Mashud dalam Narwoko, 2004). Agama merupakan subsistem dalam masyarakat mempunyai peran yang sama dengan subsistem lainnya, meskipun mempunyai fungsi yang berbeda, seperti sub sistem ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Dalam

konteks kajian sosiologis, agama tidak dilihat berdasar apa dan bagaimana ajaran dan doktrin keyakinannya, melainkan bagaimana ajaran dan keyakinan agama itu dilakukan dan mewujudkan dalam perilaku para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.

Dimensi lain, Sihite (2007) menyatakan kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditoleransi oleh perempuan dan pada saat yang sama sejatinya mereka telah mengesampingkan hak-hak dan otonomi mereka sebagai individu demi keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak. Ketergantungan ekonomi sering membuat perempuan dihadapkan pada keadaan yang sangat dilematis dalam mengambil keputusan.

The Feminist Perspective on Violence dalam Sihite (2007) menjelaskan bahwa hukum, agama dan ilmu pengetahuan, secara historis mengesahkan otoritas suami dan membenarkan melakukan kekerasan terhadap isteri untuk menghukum atas ketidak tundukan isteri. Laki-laki potensial dapat menggunakan kekerasan atas subordinasi perempuan (Busawa, 1990 dalam Sihite, 2007). Tradisi patriarki memosisikan ayah sebagai pemilik (*ownership*) penuh atas isteri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, ayah memiliki kekuasaan penuh atas diri mereka. Hal itu mengakibatkan sering terjadinya penyiksaan, pembunuhan, dan penjualan isteri dan anak dalam keluarga (Millet, 1977).

Ada dua dimensi permasalahan yang perlu diselesaikan dalam proses penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Pertama adalah masalah pengendalian emosi suami, dan kedua adalah relasi nikah yang telah rusak. Menurut Gunadi (2006), kekerasan dalam rumah tangga memerlukan konseling dalam waktu yang panjang dan pemulihan tidak akan kunjung datang jika suami tetap mengulangi perbuatannya. Lebih serius jika mengarah ketindakan pemukulan pada tubuh, dan pemukulan yang terjadi akan menghancurkan relasi nikah itu sendiri. Rasa aman, rasa percaya, kasih, dan hormat pada suami hanya akan bertumbuh kembali jika pemukulan berhenti dan digantikan dengan tindakan positif.

Jika keselamatan jiwa terancam, para pemerhati menyarankan agar istri pergi meninggalkan suami dan mencari perlindungan sampai keamanan

bisa terjamin kembali. Sikap tergesa-gesa untuk pulang dapat menurunkan respek suami terhadap isterinya. Oleh sebab itu memerlukan sikap kesabaran yang intensif. Dalam jangka waktu tertentu akan terjadi perubahan pada dirinya dan perubahan seperti ini memerlukan waktu yang panjang. Perlu suatu syarat agar dia mencari pertolongan terlebih dahulu dan biarlah pembimbingan dilakukan secara tuntas. Setelah ada kepastian bahwa suami memang telah berubah, barulah pulang. Ada wanita yang pergi meninggalkan rumah kemudian pulang tanpa diminta. Tindakan ini semakin menurunkan respek suami terhadap istri dan tanpa respek, kekerasan suami semakin menjadi-jadi.

1. Pengembangan Fungsi-Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan suatu grup sosial yang di dasarkan pada ikatan perkawinan (hubungan suami-isteri) dan ikatan kekerabatan yang mempererat hubungan antar generasi, orang tua anak (Baiti, 2007). Menurut Iver dan Page dalam Khairuddin (1997), ciri-ciri umum keluarga meliputi:

- (1) Keluarga merupakan hubungan perkawinan
- (2) Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara
- (3) Suatu sistem tata norma, termasuk perhitungan garis keturunan
- (4) Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak
- (5) Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun tidak mungkin terpisah terhadap kelompok keluarga. Dengan kata lain keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak

Kedudukan utama setiap keluarga ialah fungsi perantara pada masyarakat besar atau sebagai penghubung pribadi dengan struktur

sosial yang lebih besar. Hal ini bermakna bahwa keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi manusia. McCubbin dalam Baiti (2007) menyatakan bahwa faktor komunikasi, penghargaan, kesadaran keunggulan dan kesehatan sebagai komponen kekuatan keluarga. Sementara Kryan, Moore dan Zill (1990) menjelaskan keluarga yang sukses (*success family*) adalah keluarga yang memiliki kekuatan yang dicirikan oleh adanya:

- (1) Komunikasi
- (2) Dorongan kepada anggota keluarga
- (3) Komitmen kepada keluarga
- (4) Orientasi beragama
- (5) Keeratan hubungan social
- (6) Kemampuan beradaptasi
- (7) Pengungkapan penghargaan
- (8) Peran yang jelas
- (9) Kebersamaan

Berdasarkan konsep dan teori tersebut, dapat diartikan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Menurut Fagan (1995) elemen yang paling penting dari terbentuknya masyarakat yang aman adalah melalui keluarga. Parsons (1960) dengan konsep *functional imperative*, mengatakan bahwa keefektifan pelaksanaan fungsi AGIL di dalam keluarga di duga sangat menentukan keberdayaan keluarga. Keberdayaan merupakan sebuah kondisi dinamis keluarga yang menunjukkan kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan psikologis keluarga.

Narwoko dan Bagong Suyanto (2004), mengungkapkan posisi keluarga sangat penting dan menjadi pusat kehidupan individu, maka dalam kenyataannya fungsi keluarga pada semua masyarakat adalah sama. Beberapa fungsi dari keluarga adalah:

- (1) Fungsi pengaturan keturunan

- (2) Fungsi sosialisasi atau pendidikan
- (3) Fungsi ekonomi atau unit produksi
- (4) Fungsi pelindung atau proteksi
- (5) Fungsi penentuan status
- (6) Fungsi pemeliharaan
- (7) Fungsi afeksi

Kegagalan-kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga dapat disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

- (1) Faktor pribadi, dimana suami isteri kurang menyadari akan arti dan fungsi perkawinan yang sebenarnya. Misalnya, sifat egoisme, kurang adanya toleransi, dan kurang adanya kepercayaan satu sama lain
- (2) Faktor situasi khusus dalam keluarga. Beberapa diantaranya adalah:
 - (a) Kehadiran terus menerus dari salah satu orang tua, baik dari pihak suami atau isteri mereka
 - (b) Karena isteri bekerja dan mendambakan kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya
 - (c) Tinggal bersama keluarga lain dalam satu rumah
 - (d) Suami isteri sering meninggalkan rumah karena kesibukan luar.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas yang menyebabkan fungsi-fungsi keluarga tidak dapat berjalan semestinya, antara lain:

- (1) Fungsi kebutuhan seks dan reproduksi, yaitu suami isteri tidak kerasan tinggal dirumah serta timbul sikap dingin dan masa bodoh dari pihak isteri dalam memenuhi kebutuhan seksual
- (2) Fungsi pemeliharaan, dimana orang tua kehilangan atau kurang menjadi kebutuhan psikologis anak
- (3) Fungsi sosialisasi, dimana anak-anak menjadi terlantar akibat kurang mendapat perhatian dari orang tua
- (4) Fungsi-fungsi keluarga lainnya yang tidak dapat dijalankan dengan baik.

2. Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya

Suatu ciri yang khas di dalam masyarakat yang berbudaya adalah terpeliharanya nilai-nilai sosial yang menjadi anutan dalam kehidupan bermasyarakat. Kuckholm (Abdul, 1993) memberi makna nilai sebagai suatu konsep baik yang eksplisit maupun implisit, pembeda individu atau suatu kelompok, keinginan yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, alat dan pengambilan keputusan atau tindakan akhir. Nilai-nilai mengandung unsur evaluatif dan lebih abstrak serta mempunyai bangunan struktur yang lebih tinggi. Nilai-nilai pada prinsipnya lebih permanen dan tahan terhadap perubahan, serta mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku. Oleh karena itu nilai-nilai dapat dipandang sebagai penyebab atau faktor penentu terhadap munculnya sikap. Budiman (Abdul, 2000) mengemukakan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat mengarahkan sikap yang positif terhadap perkembangan suatu masyarakat.

Menurut Horton dan Hunt (1991), nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada hakekatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu itu salah atau benar. Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap individu manusia memiliki keeratan hubungan dengan kebudayaan. Sikap dan tingkah laku seseorang terkait dengan norma dan sistem nilai, serta aturan dan norma kelompok termasuk kelompok rumah tangga. Dengan demikian integrasi individu, masyarakat dan kebudayaan sangat erat dan interaksi ketiganya begitu kontinyu.

Nilai nilai sosial budaya orang bugis makassar dalam berinteraksi sosial tidak terlepas dari budaya lokal yang dianut. Munadah (2005) menemukan dalam penelitiannya bahwa orang makassar tidak seperti asumsi banyak orang yang mengatakan bahwa orang Makassar itu kasar dan keras. Dia keras tapi bukan kasar. Keras dalam kaitannya dengan

pendirian. Di antara mereka masih kental *sipakatau*, saling menghormati sebagai keluarga, saudara dan kerabat; saling membantu, tolong menolong, gotong royong sangat tinggi. Lebih jauh diungkapkan, orang Makassar adalah mereka yang memegang teguh *siri' na pacce*, yang merupakan nilai utama dalam berperilaku., karena ada prinsip “hanya dengan *siri* kita hidup didunia”. Mereka larut dan menerapkan nilai tersebut dan pemali melakukan *counter* walau hidup di zaman moderen. Mereka sangat terikat secara kultural dengan daerah Makassar. Demikian pula dalam etnis bugis dikenal budaya “*resopa tumangingi naletei pammase dewata* ” yang artinya Tuhan akan menyayangi hambanya jika mau berusaha dan bekerja keras . Dengan demikian norma dan nilai budaya tidak terlepas dari sikap dan perilaku baik dalam berkelompok maupun dalam bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Wignjosoebroto dalam Narwoko (2004) menyatakan, adalah sesuatu yang khayal belaka kalau orang mengatakan bahwa masyarakat manusia itu bisa tegak sepenuhnya tanpa adanya norma yang bersifat kultural dan yang harus dipelajari terlebih dahulu. Di ungkapkan pula bahwa salah satu masalah yang belum juga bisa dipecahkan di dalam kehidupan sosial manusia sampai saat ini adalah adanya konflik-konflik yang belum kunjung henti antara nafsu-nafsu dan naluri-naluri biologik di satu pihak dengan kontrol-kontrol sosial yang bersifat normativ dilain pihak.

Di dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai senantiasa akan ikut berubah. Pergeseran nilai dalam banyak hal juga akan mempengaruhi tatacara dan sikap pergaulan setiap individu. Di wilayah perkotaan, sejak berbagai siaran dan tayangan televisi swasta mulai dikenal, dengan perlahan-lahan terlihat bahwa di dalam masyarakat mulai terjadi pergeseran nilai, misalnya tentang kesopanan, kekerasan dalam keluarga yang ditayangkan lewat sinetron-sinetron mutakhir yang sedikit banyak menyebabkan batas-batas toleransi masyarakat, terpengaruh dan ikut longgar (Wignjosoebroto dalam Narwoko, 2004).

Pola tingkah laku serta budaya dalam kehidupan sosial suku Bugis Makassar bisa dipahami dengan baik dengan konsep *pangngaderreng* (Bugis) atau *pangngadakkang* (Makassar) dan siri'. *Pangngaderreng* sebagai suatu ikatan untuk sistem nilai yang memberikan acuan bagi hidup bermasyarakat orang Bugis Makassar, serta siri' sebagai sikap hidup yang sangat mementingkan harga diri. Konsep *pangngaderreng* telah menjadi landasan kebudayaan yang mengikat dari dua suku bangsa tersebut. *Pangngaderreng* sebagai suatu sistem nilai bertujuan menjaga martabat manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Akan tetapi *pangngaderreng* yang utuh dan lengkap itu bila tidak di dukung oleh suatu sikap hidup yang mensakralkannya akan merupakan suatu sistem nilai yang rapuh kedudukannya (Sajogyo, 2002). Apa yang terjadi ialah terbentuknya suatu pandangan yang menganggap *pangngaderreng* itu begitu penting, begitu suci, hingga bila tidak ada *pangngaderreng*, hidup ini tidak cukup berharga untuk dijalani.

Etika pergaulan yang dilandasi norma dan nilai budaya masyarakat berdasarkan konsep *pangngaderreng* diharapkan tercermin dalam pergaulan kehidupan sosial maupun dalam keluarga, seperti antara lain:

- (a) Menumbuhkan sikap saling membantu dalam memajukan kehidupan sosial maupun dalam keluarga atau kelompok
- (b) Sikap kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan
- (c) Memelihara kejujuran dalam berkomunikasi maupun dalam bertindak
- (d) Saling menghargai perbedaan pendapat, dan saling mematuhi keputusan bersama
- (e) Menumbuhkan kekerabatan dan solidaritas dan saling menasehati jika terjadi pelanggaran etika budaya
- (f) Saling menjaga harga diri dan kualitas pribadi
- (g) Saling mengendalikan diri dalam mengatasi masalah.

Semua rambu-rambu pergaulan hidup tersebut merupakan suatu norma dan nilai yang diwajibkan dan dibenarkan melekat dalam kehidupan budaya bugis makassar. Bagi orang yang menjunjung tinggi

norma dan nilai kehidupan tersebut akan dihormati dan dijunjung tinggi, dan bagi orang desa/kota yang berani melanggar norma tersebut akan memperoleh ejekan dan sesalan dari kerabat dan teman-teman lainnya.

B. Program Layanan Khusus Pendidikan Anak Nelayan

Akses setiap warga negara Indonesia pada pendidikan dasar dan menengah sangat penting sebagai suatu komitmen pendidikan untuk semua atau *Education For All*. Hingga tahun 2015 nanti semua anak, terutama anak-anak perempuan, anak-anak yang berada dalam lingkungan sulit dan anak-anak dari komunitas etnis minoritas, harus memiliki akses yang lengkap dan gratis terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas (*EFA Global Monitoring Report, 2008*).

Sebagai contoh di Sulawesi Selatan, layanan pendidikan dasar dan menengah ini juga sangat perlu diberikan kepada anak-anak komunitas kampung miskin di pesisir Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Jaminan layanan pendidikan dasar dan menengah buat mereka tanpa membedakan latar belakangnya, sangat diharapkan oleh komunitas tersebut terutama bagi yang tidak pernah menikmati pendidikan di bangku sekolah seperti anak-anak lain yang berhak mendapat layanan pendidikan dasar dan menengah.

Desa Aeng Batu-Batu salah satu dari 600 desa lainnya di Sulawesi Selatan yang jauh dari akses informasi, dan mengalami keterbatasan dalam pelayanan kebutuhan pokok masyarakat akan pendidikan. Dilema di bidang pendidikan ini telah berlangsung puluhan tahun setelah kemerdekaan RI.

Berdasarkan hasil studi menunjukkan tingkat pendidikan anak-anak pesisir di Desa Aeng Batu-Batu tersebut sangat rendah, dan anak-anak keluarga nelayan di desa ini juga sangat sulit mengakses pendidikan layanan formal yang tersedia, akhirnya banyak anak putus sekolah. Jumlah penduduk masyarakat pesisir Desa Aeng Batu-Batu Takalar hingga tahun 2009 sebanyak 4.587 jiwa dengan komposisi; laki-laki 2.219 dan perempuan sebanyak 2.385 jiwa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dan

kegiatan usaha tambahan pada sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan. Rumah tangga miskin di Desa pesisir Aeng batu-Batu juga mempunyai lahan yang sempit, kurang dari 0,5 hektar.

Dari sisi pendidikan, sebanyak 628 orang anak yang seharusnya menikmati pendidikan sekolah dasar, SMP, dan SMA. Namun 34,2 persen atau terdapat 215 orang anak yang putus sekolah pada kelompok usia 7-18 tahun, yakni putus sekolah pada tingkat SD sebanyak 45 orang, SMP 75 orang, dan tingkat SMA sebanyak 95 orang. Prasarana pendidikan SD sebanyak 3 buah dan SLTP 1 buah. Meskipun di desa ini tersedia sekolah, siswanya sangat rentan putus sekolah, sebab penduduk setempat cenderung mengajak anaka-anak mereka ikut melaut. Dengan demikian potensi sumber daya manusia dari sisi pendidikan masih sangat terkebelakang.

Angka tertinggi yang menunjukkan keikut sertaan masyarakat dalam pendidikan formal adalah tingkat SD, kemudian turun dengan drastis pada tingkat sekolah menengah pertama dan menurun lagi pada sekolah menengah atas apalagi universitas. Masyarakat menganggap bahwa tidaklah begitu penting menyekolahkan anak hingga ketinggian yang lebih tinggi dari sekolah dasar. Kondisi ekonomi yang memburuk memaksa pilihan lain, yaitu mempekerjakan anak di laut agar asap dapur tetap dapat mengepul. Merekapun beranggapan bahwa cukuplah anak bisa berhitung dan cakap dalam membaca dan lebih baik ikut melaut saja. Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan akses sekolah serta ketersediaan sekolah untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu akses masyarakat di Desa Aeng Batu-Batu untuk mendapatkan pendidikan formal bagi anak-anaknya sangat mendesak untuk direalisasikan agar mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan formal yang setara kualitasnya dengan pendidikan anak-anak di daerah lainnya.

1. Tujuan Pemberdayaan

Kegiatan program layanan khusus pendidikan ini bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan partisipasi pendidikan anak-anak pesisir Desa Aeng Batu-Batu pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas
- (2) Meningkatkan akses informasi pendidikan yang mendukung pemberdayaan anak-anak masyarakat pesisir
- (3) Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan kecerdasan anak-anak mereka
- (4) Meningkatkan pemahaman dalam melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut Indonesia dari segi sosial, ekonomi dan ekologi.

2. Bentuk Pemberdayaan

Model pemberdayaan anak-anak komunitas pesisir Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dikondisikan sesuai dengan kondisi mereka yang dapat mendorong mereka mau belajar. Mayoritas yang menjadi peserta didik adalah anak-anak yang putus sekolah baik pada tingkat sekolah dasar maupun tingkat menengah. Kurikulum pembelajaran yang disiapkan sesuai dengan kondisi lingkungan pesisir, sesuai minat dan kondisi psikis anak didik yang sudah terbiasa dengan aktivitas kehidupan mereka di wilayah pesisir. Metode pembelajaran dilakukan dengan cara belajar partisipatif baik ketika mereka didarat maupun diatas perahu. Anak-anak komunitas pesisir Desa Aeng Batu-Batu dapat belajar tanpa harus mengikuti aktivitas orang tua mereka dilaut. Pendidikan yang mereka jalani juga agak unik, tetapi membantu anak-anak tersebut menyadari diri bahwa mereka berhak juga mendapatkan pendidikan formal untuk masa depan mereka. Di desa pesisir tersebut para siswa layanan khusus tinggal di daratan atau diatas perahu untuk belajar bersama dengan para guru, sementara orang tua mereka tetap melaut.

Mengingat warga setempat hidup di wilayah perairan laut, maka kelas berjalan harus diwujudkan dengan kapal motor. Program layanan khusus

ini membutuhkan pengadaan kapal kayu berukuran 25 x 7 meter dan perangkat pembelajaran media elektronik lainnya.

3. Tahapan Pelaksanaan Program

Aplikasi pelaksanaan program dilakukan dengan langkah-langkah metodologis sebagai berikut:

- (1) Survei lanjutan dengan diskusi dan wawancara mendalam bersama masyarakat setempat untuk merekan aspirasi dan kebutuhan pendidikan dasar/menengah anak-anak mereka
- (2) Kerjasama kelembagaan dengan pihak pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan program
- (3) Diskusi bersama tokoh masyarakat setempat (*leader potensial*) untuk memantapkan pelaksanaan program
- (4) Mengidentifikasi jumlah anak-anak desa pesisir yang potensial dan kurang mampu atau putus sekolah untuk menjadi peserta belajar
- (5) Merumuskan kurikulum pembelajaran berdasarkan tingkat pendidikan
- (6) Membentuk kelas pembelajaran setara SMP satu kelas dengan jumlah peserta didik 45 orang.
- (7) Membentuk kelas pembelajaran setara SMA satu kelas dengan jumlah peserta didik 45 orang
- (8) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran oleh tim pengelola, guru serta dari pihak dinas pendidikan setempat.

Pada tahun pertama telah berhasil dilakukan proses sosialisasi yang mampu membentuk sikap masyarakat akan pentingnya pendidikan formal dan mau memikirkan serta mau terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pendidikan. Pada kegiatan pembelajaran peserta belajar mendapatkan pengetahuan formal dan pendidikan keterampilan tentang pemeliharaan lingkungan pesisir sesuai kebutuhan mereka dan mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada akhir tahun pelaksanaan program, para

pengelola dan guru membuat pelaporan tentang keberhasilan program. Dan jika mereka berhasil maka program ini diusulkan untuk dilanjutkan kembali dan bisa menjadi *success story* bagi komunitas lainnya.

C. Pemberdayaan Petani Sayuran

Salah satu masalah pertanian nasional secara umum adalah rendahnya kualitas SDM petani Indonesia. Jika dilihat dari tingkat pendidikan petani Indonesia yang tidak tamat dan tamat SD sebanyak 81,25 persen, tamat SMP sebanyak 13,08 persen, tamat SMA 9,5 persen dan tamat perguruan tinggi sebanyak 0,30 persen (Institut Pertanian Bogor, 2003). Oleh sebab itu pembangunan pertanian dimasa datang sebaiknya meletakkan manusia petani, pertanian dan pedesaan sebagai landasan strategis pembangunan nasional yang dinamis, jika ingin mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, bertanggung jawab dan berkelanjutan (Agusssabti,2002).

Sumber daya pertanian yang beraneka ragam, kurang dapat terkelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian besar petani karena kurang mempunyai kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai dalam mengembangkan usahatani, walaupun sebagian diantara mereka telah turut memberi andil dalam menyelamatkan krisis ekonomi Indonesia beberapa tahun lalu. Pada umumnya masyarakat petani memiliki pengetahuan dan keterampilan berusahatani secara tradisional, dan oleh karena itu maka salah satu misi pembangunan pertanian sebagai program pertanian 2004-2009 yang terumuskan dalam program Departemen Pertanian adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparat pemerintah maupun pelaku agribisnis, khususnya petani.

Salah satu potensi tanaman pertanian yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan pengelolaannya adalah tanaman sayuran. Produksi sayuran di Indonesia sejak tahun 2004 hingga tahun 2005 sedikit mengalami peningkatan dari 9.096,76 ton pada tahun 2004 hingga mencapai 9.106,96 ton pada tahun 2005 (BPS, 2005). Hal ini sejalan dengan pertambahan luas panen sayuran dari 977 ribu Ha tahun 2004 menjadi 1.004 Ha pada tahun

2005 (Statistik Pertanian, 2005). Namun peningkatan produksi sayuran belum sepenuhnya di dukung oleh kemampuan petani mengembangkan usahanya, dan hal ini berkaitan dengan rendahnya potensi pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki.

Kehidupan petani hingga saat ini termasuk petani sayuran masih memprihatinkan, dan kurang berdaya. Ada banyak hal yang menyebabkan kondisi ini terus berlangsung, namun yang paling utama adalah masalah yang berkaitan dengan kualitas SDM dari petani itu sendiri, pola pikir petani perlu perubahan dari hanya sekedar untuk kebutuhan sendiri (subsistem) menjadi pola pikir agribisnis, yang menuntut kualitas produk yang tinggi, atau dengan kata lain dari pola pikir tradisional primitif ke arah pola pikir industri/manufaktur (Widyatmoko, 2006). Kondisi yang lebih memprihatinkan lagi adalah menurunnya kuantitas tenaga kerja sektor pertanian yang beralih kesektor lain diluar sektor pertanian yang tentunya akan berpengaruh terhadap menurunnya kuantitas dan kualitas produksi pertanian (BPS, 2005)

Persaingan yang ketat antar negara produsen komoditas komersial akan semakin terjadi dan dikhawatirkan produsen komoditas pertanian Indonesia hanya akan menjadi penonton dirumah sendiri menyaksikan pergulatan para produsen agribisnis dari negara lain untuk merebut pasar dalam negeri yang sangat potensial. Tanda-tanda kearah itu telah ada dan sebagian menjadi nyata seperti membanjirnya buah impor serta melemahnya permintaan produk pertanian ekspor konvensional Indonesia di pasar luar negeri. Kondisi tersebut akan menjadikan nasib petani semakin terpuruk yang akan berakibat menurunnya semangat dan gairah berusaha dan berdampak menurunnya tingkat produktivitas dan pendapatan petani. Keadaan tersebut cenderung membuat sebagian besar petani tidak mempunyai *bargaining power* untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya dalam berbangsa dan bernegara, seperti memperoleh harga jual yang wajar dari produk usaha taninya. Oleh sebab itu petani perlu diberdayakan dan aneka ragam tanaman usahatani yang dikelola perlu mendapat perhatian yang memadai dalam pembangunan pertanian.

Sebagai contoh Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup potensial di bidang pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi perkembangan perekonomian nasional di bidang pertanian. Namun dari aspek peningkatan kesejahteraan petani belum menunjukkan peningkatan secara signifikan. Salah satu kegiatan usahatani yang cukup potensial adalah peningkatan produksi sayuran yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan diversifikasi pangan. Berdasarkan data, diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan produksi sayur-sayuran di Sulawesi Selatan pada tahun 2005 adalah 260.965 ton, menurun sebesar 1.810 ton atau 0,69 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2004 yang besarnya 262.775 ton. Penurunan tersebut terjadi sejak tahun 2004 jika dibandingkan dengan produksi tahun 2003 sebesar 327.032 ton (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sulawesi Selatan, 2006)

1. Sasaran Pemberdayaan

Sebagian besar petani sayuran adalah rumah tangga petani yang tinggal di desa tertinggal. Dari jumlah 630 desa di Sulawesi Selatan sebagian diantaranya adalah desa-desa tertinggal, dan petani yang berada di desa tertinggal tersebut tergolong miskin dan perlu diberdayakan agar tingkat kesejahteraannya terus meningkat. Oleh sebab itu, upaya pemberdayaan petani menjadi penting dengan beberapa alasan antara lain:

- (1) Petani masih dihadapkan pada keterbatasan kemampuan memanfaatkan potensi sumber daya tani yang tersedia
- (2) Keterbatasan kemampuan mengembangkan usaha pemasaran yakni ketika menghadapi musim panen, produksi meningkat dan harga hasil produksi pun anjlok
- (3) Kemampuan menjalin kerjasama dan kemitraan agribisnis serta kemampuan mengakses modal, akses pasar yang tidak ditambah akses teknologi dan kapasitas manajemen dalam memanfaatkan tenaga kerja yang rendah serta tatanan kelembagaan yang belum sepenuhnya mencapai keseimbangan ideal dalam

mengatur interaksi dan pertukaran kepentingan antara *stakeholder* (Balitbangda Sul-Sel dan *Institute For Social and Political Economic Issues*, 2004). Dengan kata lain meskipun pembangunan pertanian terus ditingkatkan tetapi kenyataannya keadaan petani sebagian masih tetap miskin. Salah satu penyebab utamanya adalah karena petani kurang berdaya.

Menurut Sudiyanto (2005), orang miskin akan tetap miskin selama dia tidak berdaya untuk dapat mendayagunakan kapasitas produktifnya. Dengan pemberdayaan akan terjadi pendayagunaan semua potensi yang dimiliki seseorang untuk dapat memperbaiki nasibnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka salah satu upaya untuk memberdayakan kehidupan petani adalah dengan mengembangkan usaha tani baik *on-farm* maupun *off-farm*, mengembangkan jaringan kerja, mengembangkan permodalan usaha, dan memantapkan kelembagaan penyuluhan melalui kelompok tani agar petani memiliki wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan dari kelompok tersebut. Petani yang tergabung dalam kelompok dapat memiliki sejumlah kekuasaan sehingga dapat mengatasi masalah yang dihadapi (van den Ban dan Hawkins, 1999).

Pentingnya upaya pemberdayaan petani melalui pengembangan kelompok tani yang ada di pedesaan di dasarkan pada suatu kenyataan bahwa pembangunan pertanian dalam dua dasawarsa terakhir telah menimbulkan permasalahan mendasar karena paradigma pembangunan pertanian selama ini bersifat sentralistik dan instruktif (BPSDMP Departemen Pertanian, 2000). Dominasi pemerintah yang begitu kuat mengakibatkan keberhasilan pembangunan yang dicapai kurang mengakar pada kekuatan masyarakat tani sebagai basis berkembangnya ekonomi pedesaan. Pendekatan pembangunan yang terpusat telah mempersempit ruang gerak dan kreatifitas bagi tumbuh dan berkembangnya keswadayaan masyarakat tani (BPSDMP Departemen Pertanian, 2000).

Pembangunan pertanian yang bersifat *top-down* dan *one way traffic* yang seringkali tidak di dasarkan atas kebutuhan nyata dan pemecahan riil yang dihadapi oleh petani. Kelompok tani lebih banyak dibutuhkan oleh pemerintah untuk mendukung keberhasilan program dan proyek yang dirancang (BPSDMPP Departemen Pertanian, 2000). Pendekatan seperti ini telah mengakibatkan kelompok tani sebagai suatu organisasi petani tidak mampu memenuhi fungsinya secara penuh, sebagai kelas belajar, wadah kerjasama dan wadah partisipasi bagi anggotanya dan memiliki posisi tawar yang lemah. Banyak kelompok tani yang tidak mampu berkembang memenuhi kepentingan anggotanya karena sangat tergantung dari pihak luar.

Berdasarkan kenyataan dan pengalaman tersebut maka di dalam pemberdayaan petani melalui kelompok tani diperlukan reorientasi pendekatan pembangunan pertanian melalui perubahan paradigma dari yang sentralistik dan instruktif menjadi desentralistik dan persuasif edukatif. Inti pokok dari paradigma ini adalah pembangunan pertanian dirancang dan dilaksanakan oleh dan bertumpu pada kekuatan masyarakat tani. Pengembangan usahatani (*on farm dan off farm*) nampaknya kurang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pedesaan dan berlandaskan kemampuan sumber daya pedesaan. Oleh sebab itu salah satu pendekatan adalah pengembangan kelompok tani di desa agar petani mampu menjadi pelaku agribisnis yang berdaya dan memiliki posisi tawar yang kuat.

Pemerintah seringkali berharap agar kelembagaan kelompok tani dapat mewadahi kepentingan dan kebutuhan petani secara efektif. Hasil penelitian Sumardjo (Margono, 2003) menemukan adanya kecenderungan perilaku kelompok tani menjadi kurang efektif, apabila keberadaannya cenderung artifisial dan formalitas, dan kurang efektif mengembangkan SDM sehingga SDM anggota cenderung lokalit serta kurang memiliki kompetensi berorganisasi. Disamping itu ditemukan pula kelompok tani menjadi kurang efektif memenuhi kebutuhan anggotanya dan adanya keragaman anggota yang rendah seperti

pendidikan rendah, kurang percaya diri, nepotisme dalam rekrutmen keanggotaan sehingga masyarakat diluar menjadi kurang simpati.

Berdasarkan kondisi objektif dari kekurang berdayaan petani sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan perlunya program pemberdayaan bagi petani khususnya petani sayuran agar dapat mengungkap faktor-faktor yang paling mendasar yang dirasakan oleh petani dalam mengembangkan usahanya.

2. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan petani sayuran di Sulawesi Selatan dapat dikembangkan dengan program pengembangan sebagai berikut:

- (1) Memantapkan dan meningkatkan produktivitas kerja petani dengan mengembangkan jaringan kerja dalam mengembangkan usaha, baik jaringan permodalan, jaringan layanan sarana produksi, maupun jaringan pemasaran. Pengembangan jaringan yang luas tersebut harus di dukung oleh layanan informasi yang akurat baik melalui informasi media, kontak person maupun melalui balai informasi desa yang dimiliki. Pengembangan jaringan kerja petani dan kelompok tani akan memperkuat kerjasama dan kemitraan petani dengan institusi lain baik pemerintah maupun dengan swasta atau perusahaan. Dengan demikian petani akan merencanakan usahanya dengan baik dan mampu dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi
- (2) Memperkuat kualitas kepribadian petani terutama peningkatan rasa percaya diri dalam mengembangkan usaha, agar petani mampu merencanakan, memutuskan dan memecahkan permasalahannya dengan penuh rasa percaya diri. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan yang benar-benar berorientasi pada tujuan dan kebutuhan petani dalam membangun rasa percaya dirinya
- (3) Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang dapat bermanfaat dalam membangun kepribadian petani dan

berfungsi sebagai perekat dalam norma sosial terutama dalam kehidupan berkelompok maupun dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Nilai-nilai budaya yang merupakan norma sosial merupakan aset dalam membangun sistem sosial yang tangguh dan kuat. Ketangguhan tersebut akan berdampak pada ketahanan kelompok sehingga petani dan kelompok tani mampu meningkatkan produktivitas kerjanya. Namun demikian, untuk meningkatkan produktivitas kerja petani maka pemberdayaan harus ditekankan pada peningkatan semangat kerja, rasa percaya diri, keuletan dan kreativitas, sehingga bisa memanfaatkan pelatihan dan mengembangkan jaringan kerja dengan baik seperti memanfaatkan informasi kelompok dengan kelompok.

Sennet dan Conway (Suharto, 2005) menyatakan bahwa ketidak berdayaan suatu kelompok masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena kekuasaan, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial (permodalan), ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik dan emosional. Di bagian lain oleh para teoritis meyakini bahwa ketidak berdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah dan tidak berdaya karena masyarakat memang menganggapnya demikian dan keadaan ini disebut dengan istilah 'alienasi'. Agar tidak teralienasi maka pengembangan jaringan merupakan alternatif dan upaya pembelajaran untuk lebih kuat dalam berinteraksi.

Keberdayaan petani akan berkembang lebih efektif bila didukung oleh kekuatan kelompok khususnya kemampuan mengembangkan tujuan dan pembinaan kelompok. Pentingnya peran kelompok, diadopsi dari model strategi pemberdayaan Parsons (1994) yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif

melalui kelompok. Melalui kelompok, petani melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungannya dalam membangun potensi dirinya, rasa percaya diri dan termotivasi menjauhkan sikap keterasingan dari semua layanan akses dan sumber-sumber pendukung usaha. Melalui kelompok, petani belajar mengelola kemampuan dirinya yang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar atau dari keadaan psikologis yang ditandai oleh kurangnya rasa percaya diri menjadi berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. Namun dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya tetap berkaitan dengan kolektivitas. Dalam konteks ilmu penyuluhan, proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan pendekatan individu atau dalam relasi satu lawan satu (antara petani dengan penyuluh) dalam setting pertolongan perseorangan. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, dilakukan dengan cara belajar orang dewasa yang tujuan utamanya adalah membimbing, mendidik atau melatih klien agar lebih tahu, mau dan mampu merubah perilaku untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Penguatan kelompok sebagai media atau unit sosial meliputi penguatan unsur-unsur dinamika kelompok terutama penguatan tujuan kelompok, inisiasi, partisipasi, kerjasama dan kordinasi dalam kelompok. Secara umum seluruh kelemahan dari pengembangan unsur dinamika kelompok dalam penelitian ini karena lemahnya unsur inisiasi, partisipasi, kerjasama dan kordinasi tugas yang menjadi salah satu kekuatan dalam kelompok. Kemampuan mengembangkan inisiatif dalam menggerakkan kegiatan kelompok tergolong paling rendah karena selain lemahnya kerjasama dan kordinasi tugas, juga karena pemahaman tentang fungsi dan tugas kelompok masih rendah. Sejalan dengan penelitian Sumardjo di wilayah Jawa Tengah menemukan bahwa rata-rata anggota kelompok tani kurang memiliki kompetensi dalam berorganisasi sehingga kelompok kurang efektif. Penjabaran fungsi dan tugas yang divisualisasikan melalui struktur kelompok kurang berjalan

secara efektif. Oleh karena itu pemahaman dan kesadaran petani berkelompok perlu ditingkatkan melalui penyuluhan. Pemberdayaan melalui penyuluhan dapat ditempuh melalui perpaduan antara penyuluhan yang merupakan tugas dan wewenang pemerintah dan pihak swasta. Keberadaan penyuluh pertanian swakarsa dan penyuluh pertanian swasta diserahkan kepada kebutuhan petani dan pelaku usaha pertanian lainnya serta kepentingan lembaga bukan pemerintah yang melakukan penyuluhan pertanian (Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, 2006)

Penguatan penyuluhan harus di dukung oleh kualitas materi, metode dan kualitas penyuluh. Materi penyuluhan yang baik adalah materi yang berorientasi pada kebutuhan, harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh petani saat ini, mampu mereka pecahkan dan tidak merasa terpaksa dan dipaksa. Tjitropranoto (Yustina dan Sudradjat, 2003) menyatakan bahwa, pada dasarnya petani akan mempelajari teknologi, informasi atau materi penyuluhan kalau dirasakannya berguna untuk kegiatan pertaniannya, dan teknologi, informasi ataupun materi penyuluhan pertanian yang dibutuhkan petani adalah yang benar-benar diyakini petani akan mengunggulkannya, terjangkau oleh kemampuannya, dan memiliki pasar yang dekat dengan lokasi usaha pertaniannya.

Materi penyuluhan mudah mereka pahami dengan metode yang dinamis ataupun bersifat praktis seperti bentuk sekolah lapang yang dikembangkan dalam kelompok tani di Kabupaten Enrekang. Kemudian peran penyuluh sangat penting sebagai motivator, inspirator dan dinamisator di lapangan. Tugas penyuluh tergolong berat baik kini maupun masa datang dan paling tidak ada empat pendekatan yang perlu dilakukan penyuluh yaitu:

- (1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi diri petani dalam kelompok termasuk potensi kepemimpinan dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu

mendidik petani melepaskan diri dari sebagian kondisi kultural dan struktural yang menghambat.

- (2) Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki petani dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pengetahuan lokal yang diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Berbagai bentuk tambahan pengetahuan dan keterampilan budi daya yang perlu dikuatkan antara lain: kecakapan dalam kegiatan produksi terutama dalam pemilihan benih yang berkualitas, pengetahuan tentang potensi lahan yang dibudidayakan, teknik pengolahan tanah seperti pencangkulan, penggemburan, pemberian pupuk organik(kompos) maupun non organik, pengetahuan tentang asal usul benih/varietas, kecakapan dalam penggunaan bahan kimiawi yang ramah lingkungan baik pra panen maupun pasca panen, kecakapan tentang teknik pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan kecakapan dalam pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil panen. Tak kalah pentingnya pula adalah kecakapan dalam pemanfaatan air irigasi yang berasal dari air tanah, air hujan, air danau, air waduk dan embun yang tidak mengandung limbah berbahaya.
- (3) Membantu petani khususnya yang tergolong dalam kelompok sosial ekonomi yang lemah agar tidak tereksplotasi dan bisa lebih sinergis dengan kelompok yang lebih kuat, serta upaya peningkatan rasa percaya diri. Pemberdayaan diarahkan pula pada pengembangan sikap kemampuan memecahkan masalah, termasuk dalam mengakses bantuan permodalan baik dari pemerintah maupun dari lembaga yang dapat membantu usaha dan permodalan petani.
- (4) Melakukan proses bimbingan manajemen dan motivasi agar kelompok tani dapat menjalankan peranan, tugas dan kegiatannya sehingga lebih dinamik. Kelompok harus mampu memilih pemimpin dan menjalankan fungsi kepemimpinan mereka sendiri

dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan dan melakukan pencatatan/pelaporan semua aspek kegiatan usaha. Pada tahapan ini peran penyuluh atau pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan kelompok.

D. Pemberdayaan Petani IP Padi 400

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan swasembada beras dan program Pemerintah Sulawesi Selatan tahun 2010 adalah dengan meningkatkan indeks pertanaman padi. Untuk itu maka salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan intensitas tanam menuju IP padi 400 dengan tujuan untuk mencapai produksi padi 30 ton perhektar pertahun melalui pendekatan pengendalian hama terpadu mendukung IP padi 400.

Hasil observasi terhadap beberapa petani yang telah melakukan uji coba dalam satu kali musim tanam, umumnya memberi alasan IP padi 400 unggul karena:

- (1) Memiliki banyak anakan
- (2) Memiliki bulir lebih besar dan banyak
- (3) Tahan dengan kekurangan air
- (4) Umur padi lebih cepat dapat dipanen dibandingkan dengan varitas lain
- (5) Biaya relatif murah karena menggunakan pupuk dengan dosis terbatas
- (6) Selama uji coba dilakukan belum ada hama yang berarti ditemukan dilokasi. Untuk itu perlu mempercepat adopsi inovasi yang terjadi dikalangan petani.

Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan secara menyeluruh suatu inovasi. Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempercepat adopsi teknologi IP Padi 400. Melalui komunikasi yang baik, pesan yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan (penerima pesan) dalam hal ini petani akan berjalan dengan baik sehingga diharapkan akan mempercepat proses adopsi teknologi IP Padi 400.

Sulawesi Selatan pada tahun 2010 mencanangkan program surplus 3 juta ton beras. Hal ini dapat dicapai berdasarkan peluang peningkatan produksi yang masih cukup besar dimana beberapa daerah dan petani ada yang mampu menghasilkan produksi 7-9 ton/ha, sedangkan hasil kajian PTT di Sulawesi Selatan diperoleh antara 6,5- 8,3 ton/ha. Namun, peran tersebut bukan mustahil berakhir apabila pendapatan dan kesejahteraan petani tidak dapat ditingkatkan.

Kabupaten Gowa sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah lumbung padi yang sangat potensial di Provinsi Sulawesi Selatan. Produksi padi pada tahun 2009 sebesar 216.580,00 ton pada lahan seluas 47.761 hektar atau rata-rata produktivitas sebanyak 4,5 ton per hektar (Biro Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2009). Sebagian besar produksi padi di Kabupaten Gowa merupakan jenis padi sawah dengan kontribusi sebesar 99,67 persen dari total hasil produksi di Kabupaten Gowa, sedangkan sisanya merupakan jenis padi ladang. Hal tersebut di dukung oleh luas tanah sawah yang beririgasi teknis seluas 10.869 Ha dan setengah teknis seluas 3.772 Ha maupun tadah hujan seluas 10.449,41 Ha. Curah hujan tertinggi mencapai 803/154 hari hujan.

Meskipun demikian, serangan hama, penyakit, kekeringan dan genangan air sangat mempengaruhi produktivitas. Penurunan produksi memerlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan usaha petani agar produktivitas kerja dan produksinya dapat meningkat. Oleh karena itu upaya mempercepat pencapaian adopsi IP padi 400 sangat diperlukan untuk melipat gandakan hasil produksi padi di daerah tersebut. Keberhasilan percepatan pencapaian adopsi IP padi 400 akan meningkatkan produksi padi di Kabupaten Gowa pada delapan belas kecamatan hingga 1.240.200 ton pertahun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja akan terserap sebanyak 248.040 orang tenaga kerja tahun 2010 hingga 2011, baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Gowa. Dengan demikian, maka selain akan meningkatkan tingkat pendapatan petani dan tenaga kerja perdesaan sekaligus dapat

membantu mewujudkan program ketahanan pangan dengan pencapaian surplus 3 juta ton beras di Sulawesi Selatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam percepatan pencapaian adopsi IP padi 400 adalah:

- (1) Keluasan informasi tentang IP padi 400 tersebut masih dalam skala yang sangat terbatas, sehingga sebagian besar petani belum tahu banyak tentang jenis IP padi 400 yang diuji coba
- (2) Sebagian besar petani belum melihat langsung hasilnya
- (3) Belum tahu banyak teknik menanamnya
- (4) Belum bisa mengkalkulasi berapa besar keuntungan yang diperoleh kalau jenis IP padi 400 diterapkan
- (5) Kesulitan tenaga penggarap jika pola penanaman 4 kali setahun
- (6) Kenaikan biaya pompa air pada musim kemarau yang mencapai 1 juta rupiah per ha persatu kali musim tanam.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan prioritas yang harus ditangani adalah:

- (1) Memperluas informasi tentang IP padi 400 baik dari kalangan anggota kelompok tani maupun yang tidak menjadi anggota kelompok
- (2) Mengaplikasikan pengetahuan teknik menanam dan pemeliharaan IP padi 400
- (3) Mengaplikasikan keterampilan manajemen usaha agar petani dapat memperoleh keuntungan atau *profitability*
- (4) Mendorong tumbuhnya motivasi, minat petani agar mau mencoba dan menerapkan adopsi IP padi 400.

Pada umumnya petani belum banyak memperoleh dan mengakses informasi tentang IP padi 400 baik dari penyuluh, kelompok tani, tetangga maupun dari media. Walaupun sebagian besar diantaranya menyatakan ingin tahu dan sering bertanya tentang teknologi yang diuji cobakan dan menginginkan ada hasil yang dapat diamati terkait dengan IP padi 400. Keingintahuan petani didorong oleh faktor seperti: (1) penanaman dapat dilakukan 4 kali setahun, dan (2) keuntungan yang akan diperoleh sangat menjanjikan.

1. Pendekatan Pemberdayaan

Untuk mendukung program percepatan pencapaian adopsi IP padi 400, maka metode pendekatan yang perlu dilakukan adalah mengaplikasikan model komunikasi dengan beberapa penguatan yang terkait antara satu dengan yang lain sebagai berikut:

- (1) Penguatan efek komunikasi. Informasi keunggulan IP padi 400 semakin diperluas sehingga dapat memberi keuntungan bagi petani yang menerapkan guna meningkatkan kesejahteraannya. Penguatan tersebut tidak saja terhenti pada tindakan individu tetapi berlanjut menjadi tindakan dan pengertian bersama dalam realitas sosial yang lebih luas.
- (2) Penguatan pengetahuan bagi penyuluh. Untuk mendukung penyebaran informasi, tenaga penyuluh yang tersedia di lokasi perlu diberi tambahan pengetahuan tentang teknologi IP padi 400 sehingga mampu mengkomunikasikan inovasi ini secara interaktif. Kemudian petani mampu mendiskusikan dan mengambil keputusan untuk menentukan pilihan yang tepat guna menyelesaikan masalah disekitarnya.
- (3) Perbanyak media uji coba. Tempat/alat (media) penyampaian informasi guna memperkenalkan teknologi IP padi 400 perlu diperbanyak dengan merangsang minat dan motivasi. Media ini dapat menjadi wadah bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan perilaku baru yang lebih baik tentang IP padi 400.
- (4) Penguatan minat dan motivasi. Rasa ingin tahu yang tinggi pada petani, perlu terus di dorong sehingga terwujud menjadi minat dan keyakinan untuk mencoba dan menerapkan IP padi 400, sehingga difusi inovasi dapat berlangsung dengan lebih cepat.
- (5) Perbaiki pola interaksi. Proses interaksi dalam mengkomunikasikan IP padi 400 perlu ditingkatkan terutama antara motivator program ini dengan petani, sehingga penguasaan

teknologi IP padi 400 lebih cepat diadopsi, dan bisa mengkalkulasi berapa besar keuntungan yang diperoleh kalau jenis IP padi 400 diterapkan

- (6) Penyediaan benih. Upaya mengadakan ketersediaan benih lebih dekat dengan petani, merupakan langkah penting dalam merangsang motivasi bagi petani untuk mencoba dan menerapkan IP padi 400.
- (7) Perluasan jaringan komunikasi. Pelibatan tokoh masyarakat tani yang berpengaruh dalam komunikasi, pemberian informasi dan edukasi sebagai bentuk penyampaian realitas fisik inovasi IP padi 400 perlu ditingkatkan sehingga terbangun pemahaman, pengertian dan kepercayaan bersama yang lebih baik dikalangan petani.

2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan sebagai langkah-langkah solusi atas persoalan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan lahan uji coba yang lebih luas hingga 1 ha untuk sekali musim tanam, baik yang disewa maupun milik petani mitra yang baru berminat mengadopsi IP padi 400.
2. Memberi bibit, pupuk dan sarana pengendalian hama kepada petani kelompok mitra.
3. Memberi pengetahuan aplikasi teknik menanam dan pemeliharaan IP padi 400.
4. Memberi keterampilan aplikasi manajemen usaha agar petani dapat mengkalkulasi berapa besar keuntungan yang diperoleh kalau jenis IP padi 400 diterapkan.
5. Membuat sarana (tempat) media komunikasi antara pelaksana dan penyuluh sebagai motivator program agar penyebaran informasi IP padi 400 semakin meluas, dan petani segera mengadopsi teknologi tersebut.
6. Mendeteksi masalah-masalah yang menjadi keluhan petani

7. Melibatkan media pers dan televisi untuk meliput dan menyebarluaskan keberhasilan penerapan IP padi 400 disaat masa panen.

Partisipasi petani sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan menghadiri undangan dialog interaktif antara pelaksana dan penyuluh dengan petani di mesjid untuk mendapatkan informasi mengenai keunggulan IP padi 400. Pertemuan tersebut akan dihadiri 50 orang petani yang berasal dari wakil-wakil kelompok tani maupun dari unsur petani luar kelompok. Kemudian petani dan pelaksana membuat kesepakatan tentang pelaksanaan kegiatan program yang meliputi:

- (1) Penentuan lahan uji coba baik yang akan disewa maupun lahan yang tidak disewa milik petani mitra sendiri
- (2) Penentuan waktu aplikasi penanaman
- (3) Penentuan waktu kegiatan penyuluhan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan manajemen untuk penerapan IP padi 400. Setelah terjadi kesepakatan, petani diharapkan selalu mendatangi tempat (posko) sebagai media komunikasi bersama pelaksana dan mempersiapkan diri melakukan uji coba penanaman.

Aktivitas petani dalam musim tanam akan berlangsung selama 3 bulan termasuk kegiatan penyuluhan yang diikuti. Selama kegiatan penyuluhan, petani akan mendapat penguatan minat dan motivasi serta mampu mengetahui teknik penanaman IP padi 400 dan keterampilan mengkalkulasi berapa besar keuntungan yang diperoleh kalau jenis IP padi 400 diterapkan. Kemudian petani mampu menemukan solusi jika menemukan masalah-masalah dalam penerapan IP padi 400. Petani yang telah terlibat dalam kegiatan ini akan menjadi petani pelopor dan berinteraksi dengan petani lainnya mulai dari wilayah kecamatan hingga kabupaten menyebarkan informasi keberhasilan penerapan IP padi 400.

3. Target yang Akan dicapai

Target hasil atau manfaat yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah:

- (1) Pemerintah daerah mendapatkan penghargaan (sertifikat) sebagai daerah lumbung pangan beras nasional dari pemerintah pusat
- (2) Hasil program ini diseminasikan dalam bentuk artikel dan dipublikasikan melalui jurnal/majalah nasional di Institut Pertanian Bogor. Sedangkan manfaat bagi petani adalah:
 - (1) Petani mendapat sertifikat sebagai petani pelopor penerapan IP padi 400 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan
 - (2) Petani memiliki keyakinan dan minat yang tinggi akan keberhasilan pencapaian adopsi IP padi 400
 - (3) Memiliki pengetahuan aplikasi penanaman dan pemeliharaan IP padi 400
 - (4) Memiliki keterampilan manajemen usaha dalam wujud kemampuan mengkalkulasi besaran keuntungan yang diperoleh kalau IP padi 400 diterapkan
 - (5) Meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya dari perolehan produksi 4,5 ton per ha dalam sekali musim tanam, menjadi 7,5 ton per ha, atau dari 9 ton per ha pertahun menjadi 30 ton per ha pertahun
 - (6) Sebanyak 80 persen petani di daerah tahun 2011 menjadi petani yang berhasil menerapkan IP padi 400 dan lebih mandiri dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

E. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk

memanfaatkan sumberdaya alam dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Kekayaan sumberdaya pesisir meliputi pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya mencapai sekitar 17.500 pulau yang dikelilingi ekosistem pesisir tropis seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, berikut sumberdaya hayati dan non hayati yang terkandung di dalamnya.

Secara normatif, kekayaan sumberdaya pesisir dikuasai negara untuk dikelola sedemikian rupa demi kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Ironisnya sebagian besar tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir justru menempati strata ekonomi yang paling rendah bila dibandingkan dengan masyarakat darat lainnya.

Paradoks mekanisme pengelolaan wilayah pesisir yang tidak efektif dan kemiskinan masyarakat di wilayah tersebut harus segera diakhiri. Langkah ke arah itu dapat dimulai dengan mengembangkan model pengelolaan wilayah pesisir. Melalui model pengelolaan wilayah pesisir diharapkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat dilakukan secara optimal, efisien dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir yang mengelolanya.

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat, diantaranya masyarakat nelayan tangkap, nelayan pengumpul, nelayan buruh, nelayan tambak, nelayan pengolah, dan lain-lain.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan

aktivitas ekonominya. Pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap misalnya, membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang dibutuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman model pengelolaan pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut

1. Bentuk Pemberdayaan.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.

Berdasarkan realita dan kondisi yang terjadi pada masyarakat pesisir, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir hendaknya melihat dan memperhatikan konteks sumberdaya alam (kelautan dan pesisir) dan sumberdaya manusianya. Seperti sumberdaya kelautan dalam hal ini ikan merupakan sasaran utama bagi akselerasi kegiatan ekonomi dalam masyarakat pesisir. Sangat jelas bahwa sumberdaya perikanan yang terbatas dan cenderung *over exploited* di beberapa wilayah pesisir, tidak mungkin memberikan penghasilan yang lebih baik bagi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir itu sendiri. Selain itu perlu mengurangi ketergantungan masyarakat pesisir/nelayan kepada pengijon atau touke yang umumnya memberikan bantuan modal dan sarana perikanan kepada nelayan seperti perahu, jaring, dan bahan bakar minyak dengan bunga yang besar bila dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan maka yang terjadi adalah beban utang yang terus bertambah tanpa berkesudahan.

Mempertimbangkan karakteristik masyarakat pesisir, khususnya nelayan sebagai komponen yang paling banyak, serta cakupan atau batasan pemberdayaan maka sudah tentu pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara holistik. Pembangunan secara holistik adalah pembangunan mencakup semua aspek. Untuk itu setiap sumberdaya lokal patut diketahui dan didayagunakan. Pembangunan yang komprehensif, menurut pengertian Asian Development Bank, adalah pembangunan yang memiliki ciri-ciri

- (1) Berbasis lokal
- (2) Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
- (3) Berbasis kemitraan
- (4) Secara holistik atau multi aspek
- (5) Berkelanjutan

Era otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi ekonomi secara optimal untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Namun, harus diwaspadai agar kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut tetap bersandar pada kepentingan publik dan kelestarian lingkungan. Dua hal yang terlihat kontradiktif ini harus dapat disinergikan secara terpadu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka prinsip pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu dapat difokuskan pada empat aspek yaitu:

- (1) Keterpaduan antara berbagai sektor dan swasta yang berasosiasi
- (2) Keterpaduan antara berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
- (3) Integrasi antara pemanfaatan ekosistem darat dan laut
- (4) Integrasi antara sains/teknologi dan manajemen.

Prinsip pengelolaan yang terpadu ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa pemanfaatan sumberdaya pesisir pada saat ini tidak boleh mengorbankan kebutuhan sumberdaya pesisir bagi generasi yang akan datang. Prinsip ini bisa lebih efektif dilaksanakan bila pengelolaannya bersifat demokratis, transparan, dan didesentralisasikan

ke level pemerintahan yang rendah yang melibatkan masyarakat pesisir setempat.

Sulawesi Selatan memiliki sejarah keterkaitan yang sangat erat dengan dinamika kehidupan laut dan khazanah budaya masyarakat yang kaya dengan pengalaman kehidupan pesisir dan petualangan di laut. Kondisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan potensi sumberdaya alam yang kaya baik di darat maupun di laut. Dengan panjang pantai sekitar 2.500 km, maka di era otonomi daerah ini Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan bertanggung jawab mengelola wilayah laut pesisir yang tidak kurang dari 60.000 km², suatu luasan areal yang kurang lebih sebanding dengan luas wilayah daratan provinsi ini. Kondisi ini meyaratkan perlunya upaya untuk memahami dengan baik potensi wilayah dan karakter sumberdaya, bukan hanya sebatas terestrial, namun mengupayakan orientasi yang lebih besar pada sumberdaya alam laut dan pesisir tersebut agar dapat dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan, khususnya demi meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir.

Sumberdaya alam di wilayah pesisir merupakan aset bangsa yang strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan. Dalam perkembangan selanjutnya akibat pertambahan jumlah penduduk, perluasan pemukiman, dan kegiatan industri, maka wilayah ini akan mendapat tekanan berat akibat eksploitasi sumberdaya alam di lingkungan sekitarnya. Untuk itu langkah antisipatif dengan mencari alternatif pendekatan atau paradigma yang dapat mempertemukan berbagai tuntutan kepentingan pemanfaatan melalui konservasi sumberdaya untuk pembangunan yang berkelanjutan mutlak menjadi tuntutan.

Arah modernisasi di sektor perikanan yang dilakukan selama ini, hanya memberi keuntungan kepada sekelompok kecil yang punya kemampuan ekonomi. Beberapa model pemberdayaan masyarakat

pesisir tentunya merupakan alternatif yang sangat diharapkan masyarakat nelayan sehingga masyarakat pesisir mampu melakukan diversifikasi usaha sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang ada. Model pemberdayaan tersebut harusnya berjalan secara sinergis dengan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mulai pelaksanaan program padat karya hingga inovasi peluang kerja yang memungkinkan dilakukan para nelayan atau masyarakat pesisir yang seharusnya mendapatkan perhatian serius, khususnya oleh setiap pemerintah daerah yang memiliki wilayah pesisir.

Untuk mewujudkan pembangunan yang holistik diperlukan alternatif strategi, yaitu strategi yang berorientasi pada sumberdaya atau *Resource Base Strategy (RBS)*, yang meliputi ketersediaan sumberdaya, faktor keberhasilan serta proses belajar. Pendekatan dalam RBS adalah strategi pengelolaan sumberdaya lokal/pesisir dan kelautan yang berorientasi pada: kualitas, proses, kinerja, pengembangan, budaya, lingkungan (*management by process*) yang berdasarkan pada pembelajaran, kompetensi, keunggulan, berpikir sistematis, dan pengetahuan (*knowledge based management*) (Anonim, 2005).

Dibalik harapan yang tinggi tersebut, pengalaman bangsa Indonesia di dalam membangun wilayah pesisir, menunjukkan hasil yang kurang optimal dan cenderung ke arah yang tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Selain itu, penduduk pesisir itu sendiri sebagian besar masih bergumul dengan kemiskinan. Padahal banyak bukti menunjukkan, bahwa kemiskinan selain sebagai akibat dari kerusakan lingkungan, sekaligus juga sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Dengan perut kosong, seseorang sangat kecil kemungkinannya untuk peduli dengan konservasi. Dilain pihak, potensi pembangunan kawasan-kawasan pesisir, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal dan bahkan masih banyak yang belum tersentuh pembangunan.

Berdasarkan sifat alamiah dari wilayah pesisir maka untuk membangun sumberdaya wilayah ini secara optimal dan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya haruslah ditempuh dengan pendekatan pengelolaan secara terpadu. Perencanaan terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir. Perencanaan terpadu biasanya dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang muncul dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini, dibutuhkan suatu model pengelolaan yang kolaboratif yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dll) dan pemerintah yang dikenal dengan *Co-management* yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminasi. Melalui model ini, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan dengan menyatukan lembaga-lembaga terkait terutama masyarakat dan pemerintah serta stakeholder lainnya dalam setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan. Pembagian tanggung jawab dan wewenang antar *stakeholder* dapat terjadi dalam berbagai pola, tergantung kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia dan institusi yang ada di masing-masing daerah. Susunan dalam model pengelolaan ini bukanlah sebuah struktur legal yang statis terhadap hak dan aturan, melainkan sebuah proses yang dinamis dalam menciptakan sebuah struktur lembaga yang baru.

2. Metode *Participatory Rural Appraisal* dan *Rapid Rural Appraisal*

Dipandang dari sudut penamaannya, *Participatory Rural Appraisal* (PRA) atau Memahami Desa secara Partisipatif memberikan sebuah gambaran tentang adanya perkembangan kelompok pendekatan dan metode yang memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk turut ambil bagian dalam menambah dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka menyusun perencanaan dan aksi/tindakan. Chambers (1992) dalam Amanah (2000) mengemukakan bahwa PRA berasal dari dan banyak memberikan kontribusi kepada penelitian partisipatif radikal, analisis agroekosistem, antropologi terapan, penelitian lapang tentang sistem usahatani dan memahami desa secara cepat (*Rapid Rural Appraisal* atau RRA). Hal mendasar yang membedakan antara PRA dengan RRA adalah dalam RRA, informasi lebih banyak diperoleh dan diambil oleh orang luar (*outsiders*); sedangkan dalam PRA masyarakat desa sendiri yang lebih memiliki dan memanfaatkan informasi tersebut.

Sebagai orang luar dalam PRA lebih banyak bertindak sebagai fasilitator yang memiliki kesadaran kritis terhadap dirinya sendiri, ketimbang sebagai pendatang asing yang terkadang diistilahkan dengan wisatawan oleh para penulis metode-metode penelitian partisipatif. Cara-cara penelitian, proses saling berbagi, dan analisis dilakukan secara terbuka, dan dapat dilihat oleh kelompok, serta melalui perbandingan-perbandingan. Di antara sekian banyak terapannya, PRA telah dipakai dalam pengelolaan sumberdaya alami (konservasi tanah dan air, kehutanan, perikanan, satwa liar, perencanaan desa, dan lain-lain), pertanian, pemberdayaan masyarakat lemah, kesehatan, dan pengadaan bahan pangan.

Di sisi lain, RRA sebagai suatu metode yang telah lebih dahulu berkembang (era 1970-an). Yang melatarbelakangi munculnya RRA diantaranya adalah kurang berhasilnya pendekatan lainnya yang digunakan dalam menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Umumnya sebelum RRA, masyarakat hanya sebagai pihak yang tidak tahu menahu mengenai suatu program ataupun penerapan kebijakan. Sebagai akibatnya tidak ada perubahan yang berarti setelah dilaksanakan penerapan kebijakan. Dengan adanya RRA yang kemudian berkembang pula PRA, maka diharapkan akan memungkinkan masyarakat desa pesisir secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan yang nantinya sangat diperlukan dalam perumusan perencanaan dan kebijakan oleh pihak yang berwenang.

Menurut Daniel, dkk. (2008) PRA (*Participatory Rural Appraisal*) merupakan suatu teknik untuk menyusun dan mengembangkan program yang operasional dalam pembangunan tingkat desa. Metode ini ditempuh dengan memobilisasikan sumberdaya manusia dan alam setempat, lembaga lokal guna mempercepat peningkatan produktivitas, menstabilkan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mampu pula melestarikan sumberdaya setempat.

Pada pelaksanaannya, metode ini lebih menekankan pada diskusi kelompok daripada diskusi individu. Pengelola program berperan sebagai fasilitator dan sekaligus katalisator, sedangkan masyarakat setempat lebih banyak diberi peran dalam menggali, menganalisis, merencanakan, dan melaksanakan. Seperti halnya RRA, alat analisis yang digunakan dalam PRA berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, sosial, analisis agroekosistem, sistem usahatani, dan lain-lain.

Tujuan utama dari PRA adalah untuk menjaring rencana atau program pembangunan pedesaan yang memenuhi persyaratan; diterima oleh masyarakat setempat, secara ekonomi menguntungkan, sesuai dengan kondisi desa dan lingkungan, serta berdampak positif pada lingkungan sekitar. Metode PRA dapat membantu dalam menggerakkan sumberdaya alam dan manusia untuk memahami masalah, mempertimbangkan program yang telah sukses, menganalisis kapasitas kelembagaan lokal, menilai kelembagaan modern yang telah

diintrodusir, dan membuat rencana/program spesifik yang operasional secara sistematis.

PRA dikembangkan oleh LSM, dimana mereka sering menangani pembangunan masyarakat desa dengan menggerakkan kemampuan masyarakat lokal. Kata kunci, luaran dari PRA adalah perencanaan dan/atau proyek. Pada prinsipnya teori dan persyaratan PRA sama dengan RRA, tetapi PRA lebih menekankan pada partisipasi masyarakat. Di samping itu, ada beberapa prinsip kunci pada pelaksanaannya di lapang. Bila prinsip itu dilanggar atau tidak diindahkan, hasil yang diperoleh bisa jadi tidak sesuai dengan inspirasi, aspirasi masyarakat, serta kondisi wilayah.

F. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar PT Aneka Tambang Pongkor

Perjalanan studi penulis di Institut Pertanian Bogor membuahkan pengalaman berharga dalam mengamati proses pemberdayaan masyarakat di sekitar Perusahaan Aneka Tambang Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat. Tambang Emas Pongkor merupakan suatu kawasan pertambangan konsesi PT. Aneka Tambang Persero Tbk (PT. ANTAM) yang berada di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Kandungan cadangan emas di dalamnya mencatat 60-70 ton dan kegiatan penambangan emas di wilayah Pongkor di dasarkan pada perijinan kegiatan penambangan dan pengolahan biji dari Departemen Pertambangan dan Energi serta Departemen Kehutanan.

Berdasarkan pada perijinan yang telah ada maka PT Aneka Tambang selanjutnya melakukan kegiatan penambangan di wilayah Pongkor seluas 4.058 Ha yang terdiri dari wilayah taman nasional 105 Ha, hutan lindung 275 Ha, hutan produksi 2.025 Ha, dan tanah masyarakat seluas 1.653 Ha. Dari besarnya cadangan emas di Pongkor, PT Aneka Tambang dapat memproduksi emas yang masih dalam bentuk biji (emas dengan mineral pengikutnya) sekitar 2.000 kg emas setiap tahunnya, dan

rencananya akan ditingkatkan menjadi 4.000 kg emas Pongkor yang memberi pemasukan sebanyak 15-20% bagi PT ANTAM.

Kondisi masyarakat sekitar kawasan penambangan pada awal eksplorasi tahun 1984 merupakan suatu kehidupan yang relegius dan agraris yang umumnya berprofesi sebagai petani. Dengan adanya kegiatan eksplorasi, mengundang pula masuknya para pendatang menjadi penambang emas tanpa izin (PETI) di wilayah kawasan pertambangan. PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Selain masalah penambangan liar oleh para PETI atau Gurandil, kegiatan eksplorasi PT Antam Pongkor juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat lokal, antara lain masalah sosial budaya, ekonomi, ekologi (lingkungan fisik) dan hukum.

Masalah sosial budaya yakni meningkatnya pola-pola kehidupan sosial baru pada masyarakat lokal yang beragam dan cenderung merubah perilaku masyarakat setempat. Masalah ekonomi yakni meningkatnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat walaupun berdampak pula meningkatnya tingkat kriminalitas dan perilaku negatif remaja. Masalah ekologi timbul akibat kegiatan eksploitasi dan eksplorasi baik pihak PT Antam Pongkor maupun yang dilakukan secara tidak terkendali oleh para penambang liar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan (hutan dan pencemaran pada sungai dan tanah) yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan makhluk lainnya. Kemudian masalah hukum, karena kegiatan penambangan liar di Pongkor merupakan kegiatan melanggar hukum dan perundang-undangan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan antara pihak PT Antam Pongkor dengan kelompok masyarakat adalah:

(a) Bidang pendidikan

Masalah pendidikan merupakan hal yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat di wilayah ini. Sarana pendidikan formal yang ada yakni sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah lanjutan atas memiliki kondisi fisik bangunan yang kurang terawat dan belum mampu menggugah tokoh masyarakat dan aparat desa memberikan perhatian yang maksimal. Seorang kepala sekolah SD di Desa Bantar Karet menuturkan keprihatinannya terhadap kurangnya perhatian pihak terkait terhadap sarana dan fasilitas pendidikan formal. Hal tersebut terbukti dari dana 50 juta perbulan bantuan PT Antam Pongkor untuk setiap desa hanya dialokasikan pada pemeliharaan dana sosial lainnya, sementara sarana pendidikan lainnya cenderung terabaikan. Sebagai contoh ketika survei ini dilakukan terdapat sebuah sekolah dasar yang memiliki 6 kelas dengan jumlah 126 murid hanya memiliki 3 orang guru PNS dan 1 orang honorer yang digaji 250 ribu setiap bulan oleh PT Antam Pongkor. Bantuan lainnya adalah beasiswa kepada 9 orang murid sekolah, masing-masing murid mendapat 60 ribu rupiah. Nampaknya keberadaan PT Antam Pongkot dinilai masih kurang dirasakan peranannya oleh para guru dan masyarakat sekitarnya sehingga peran sosialnya dalam memberdayakan masyarakat menjadi lambat.

(b) Bidang Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat ditentukan oleh adanya sarana dan fasilitas kesehatan yang memadai. Sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan unit puskesmas di kematan ini terdapat pada setiap desa. Kesadaran memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan cukup tinggi, walaupun sebagian masyarakat lainnya masih sering melakukan pengobatan melalui dukun kampung. Partisipasi PT Antam Pongkor di bidang kesehatan cukup membantu masyarakat, walaupun bantuan tersebut tidak secara langsung berupa uang dan peralatan, akan tetapi dengan terbukanya sarana jalan yang menghubungkan berbagai tujuan

antar pusat pelayanan kesehatan, juga berdampak semakin memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Jenis penyakit yang sering mewabah di daerah ini adalah batuk-batuk yang dirasakan oleh masyarakat di daerah beriklim dingin. PT Antam Pongkor juga kurang memberikan tambahan tunjangan honorer dan bantuan tenaga medis pada pusat pelayanan kesehatan, kecuali bantuan dana sosial desa melalui birokrasi pemerintahan desa yang sering kurang diketahui jumlah dan pemanfaatannya. Namun demikian dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dampak keberadaan PT Antam Pongkor, maka dengan sendirinya masyarakat memiliki kemampuan mencegah penyakit dan mendapatkan pengobatan.

(c) Bidang Ketenagakerjaan

Sebagian besar masyarakat di daerah ini bekerja sebagai petani, pedagang sayur, pisang, buruh PT Antam, buruh bangunan dan sebagian lagi berdagang di Kota Bogor dan wilayah sekitarnya. Mayoritas usia pekerja antara 12-50 tahun. Laki-laki bekerja sebagai petani, buruh dan pedagang, sedangkan perempuan sebagian besar tetap berada di desa membantu bertani dan sebagian lainnya menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di perkotaan. Rata-rata tingkat penghasilan pekerja tersebut sebanyak 600 ribu perbulan. Kendatipun demikian masalah pengangguran di daerah ini tetap menjadi problema yang sering berakibat terhadap gangguan sosial seperti mabuk-mabukan, miras, disko, dan foya-foya. Nampaknya ada perbedaan gaya hidup remaja sebelum dan sesudah keberadaan PT Antam Pongkor, dimana setelah keberadaan PT Antam Pongkor kecenderungan tingkat kriminalitas meningkat khususnya di kalangan anak-anak berusia muda. Dengan kondisi tersebut maka PT Antam Pongkor melaksanakan pembinaan kegiatan remaja melalui mesjid dan mengadakan pelatihan keterampilan mengembangkan wirausaha tani dan pengembangan pengetahuan pelestarian hutan.

(d) Bidang Keagamaan

Kegiatan keagamaan pasca keberadaan PT Antam Pongkor semakin meningkat seperti pengajian rutin, perayaan hari-hari besar Islam dan kegiatan ditempat-tempat peribadatan (Mesjid). Hal tersebut seiring dengan bantuan rutin PT Antam Pongkor setiap bulan terhadap pembinaan keagamaan di Mesjid. Aktivitas keagamaan tersebut didukung oleh sejumlah tokoh agama yang berada di wilayah ini. Aktivitas tokoh agama dalam melayani kegiatan keagamaan didukung langsung oleh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Nanggung. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan bertambahnya bantuan PT Antam Pongkor terhadap aktivitas dan pemeliharaan sarana peribadatan, berefek terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan perusahaan tersebut.

(e) Menggerakkan Peran Kelembagaan Masyarakat

Kecamatan Nanggung sebagai lokasi PT Antam Pongkor memiliki lembaga formal tingkat desa/kelurahan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). LPM berfungsi merancang program pembangunan desa sedangkan BPD sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi menghimpun aspirasi masyarakat desa. Dengan keberadaan PT Antam Pongkor membuat lembaga formal tingkat desa/kelurahan tersebut dapat secara dinamis menjalankan fungsi dan peranannya. Setiap bulan lembaga tersebut mendapat bantuan 50 juta rupiah untuk program pembangunan desa. Selain lembaga formal terdapat juga lembaga non formal seperti lembaga amil, karang taruna dan majelis taklim. Lembaga tersebut dinilai sangat positif keberadaannya sebagai media pertemuan sosial masyarakat terlebih bagi masyarakat luar yang datang kewilayah ini, seperti para peneliti dan mahasiswa yang mengadakan studi dan kuliah kerja nyata dari berbagai perguruan tinggi.

(f) Pembinaan Kantibmas

Sebagai salah satu unsur pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ini, maka sejak lama telah memiliki satuan keamanan masyarakat seperti Hansip, Pamswakarsa dan Siskamling. Tingginya tingkat kerawanan dan gangguan keamanan berkaitan dengan kedatangan penambang liar (PETI) atau gurandil yang diperkirakan berjumlah 6.000 orang menjarah kawasan pertambangan. Kejadian ini pernah terjadi pada tahun 1998-1999. Mereka menguasai hampir 200 hektar areal pertambangan yang tersebar di beberapa daerah prospek Blok Kubang Kicau, Cisurug, Gunung Butak dan Pasir Jawa. Ketegangan pada saat itu membumi hanguskan kompleks dan fasilitas kantor UBPEP di Sorongan. Akibatnya PT Antam Pongkor berhenti berproduksi selama 10 hari dan mengalami kerugian negara mencapai milyaran rupiah. Kemudian tahun 2002 jumlah gurandil mulai berkurang dan tahun 2003 jumlah gurandil yang bertahan sekitar 150 orang. Berdasarkan kasus tersebut maka pihak perusahaan menambah sistem keamanan sekaligus memberi sosialisasi terpadu kepada masyarakat sekitarnya akan pentingnya kesadaran dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

(g) Pengembangan Aspek Budaya

PT Antam Pongkor mempunyai tanggung jawab melestarikan nilai-nilai budaya lokal masyarakat sekitarnya. Sebelum keberadaan PT Antam Pongkor, kehidupan masyarakat masih diwarnai dengan keeratan hubungan sosial yang sangat normatif, gotong royong dan sistem kekerabatan yang tinggi. Jenis bahasa sehari-hari adalah bahasa Sunda dan sebagian kecil bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sebagian masyarakatnya masih merasa minder dan takut berkomunikasi dengan pendatang luar yang tidak dikenalnya. Jenis bahasa sehari-hari adalah bahasa Sunda dan sebagian kecil bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sebagian masyarakatnya masih merasa minder dan takut berkomunikasi dengan pendatang luar yang tidak dikenalnya. Namun setelah itu telah

mulai mengalami pergeseran dimana norma-norma kegotong royongan hanya terjadi pada kegiatan pengadaan sarana umum seperti pemeliharaan jalan, pembuatan saluran air, perambaan sumber mata air dari dataran tinggi dan pembangunan sarana sosial lainnya. Namun untuk urusan domestik rumah tangga, norma kekerabatan tersebut mulai bergeser sebagai dampak perilaku yang cenderung individualistik.

Pola hubungan sosial masyarakat di wilayah ini tergolong masyarakat transisi dimana ikatan-ikatan sosial telah didasarkan pada status ekonomi, kekuasaan dan tingkat pengetahuan. Dengan demikian semakin tinggi kepemilikan pada aspek tersebut semakin cenderung individualistik dan mengabaikan faktor kekerabatan. Keberadaan PT Antam Pongkor sangat berpengaruh terhadap pola-pola interaksi sosial masyarakat sekitarnya. Hal tersebut terlihat dari gaya pergaulan anak-anak berusia muda yang cenderung berperilaku hedonistik, malas, kurang produktif dan kurang tertib. Kemudian interaksi sosial antara aparat desa, tokoh masyarakat dengan warga hanya terbatas pada aspek kepentingan pemerintahan desa seperti penagihan pajak bumi dan bangunan dan berbagai kegiatan sosialisasi program pembangunan desa. Sedangkan jika berkaitan dengan kepentingan pelayanan masyarakat, interaksi sosial tersebut seringkali terhambat. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan aparat desa dan masyarakat masih didasarkan pada hubungan yang lebih menguntungkan pemerintahan dan kurang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini maka PT Antam Pongkor selalu memberi apresiasi terhadap kegiatan masyarakat dalam bentuk pertunjukan budaya lokal, pembinaan seni musik, seni tari budaya Sunda dan Jawa serta memediasi peran tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh muda yang membawa pembaharuan. Meskipun demikian, mayoritas masyarakat di daerah ini masih mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai lokal yang berlaku. Artinya interaksi sosial antar individu atau antar kelompok masyarakat masih taat pada aturan-aturan budaya lokal seperti saling menghormati,

saling menghargai antara yang muda kepada yang tua maupun sebaliknya.

BAB VII

PENUTUP

Pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap masyarakat miskin di Indonesia perlu dikembangkan dalam konteks yang lebih luas, baik dengan mengembangkan kapasitasnya, pengetahuan dan keterampilan, prakarsa dan partisipasinya agar mereka dapat membantu diri dan keluarganya, juga dapat dikembangkan melalui bantuan secara langsung yang bersifat fisik material, parsial dan gradual sepanjang bantuan tersebut tidak menjadi sebuah ketergantungan yang justru dapat menghambat motivasi, harga diri dan kreativitas masyarakat itu sendiri.

Pendekatan yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat perlu dirancang dengan baik dan tepat, yakni tepat program, tepat metode, tepat sasaran dan target baik secara individu maupun kelompok, sehingga bisa memberikan hasil yang optimal. Berbagai pendekatan telah sering diterapkan, namun yang paling penting adalah bagaimana dampak dari pendekatan tersebut dapat meningkatkan *Energi Sosial Kreatif* dimana masyarakat dapat memiliki daya internal atau energi sosial dalam menghadapi kerasnya kehidupan dalam lingkungan sosial maupun lingkungan fisik tempat mereka tinggal baik dimasa kini maupun yang akan datang.

Saran kebijakan adalah perlunya pemihakan terhadap program pembangunan manusia yang berorientasi pada meningkatnya kualitas kehidupan yang dilandasi oleh norma-norma pendidikan, kejujuran, kepercayaan, sikap egaliter, solidaritas, kerjasama dan keadilan, tanpa mengabaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara fisik materil. Sebuah kebijakan yang berbeda antara cita-cita dan kenyataan adalah keniscayaan bagi negara dalam memenuhi kewajiban sosial dan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahid S. 1993. "Punggawa Sawi: Tela'ah Gaya Kepemimpinan dan Manajemen Menurut Nilai-Nilai Budaya Bugis Makassar." Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Pajajaran Bandung
- Achord, B, Margaret Berry, Gene Harding, Kerry Kerber, Susan Scott, & Lois O. Schwab. 1986. *Bulding Family Strength. A manual for families.* University of Nebraska-Lincoln. Departemen of Human Development and Family and Conferences and Institutes. Nebraska.
- Agussabti. 2002. "Kemandirian Petani dalam Pengambilan Keputusan Adopsi Inovasi." Disertasi. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor
- Allport, Gordon. 1971. *Personality a Psychological Interpretation.* Constable & Co,Ltd,London.
- Anonim, 2004. *Buletin P3K.* Edisi Khusus, Vol. II No.05-Oktober 2004, Hal. 03-09
- Anonim, 2007. *Pemberdayaan Masyarakat: Participatory Facilitator Comunity Development,* Buku 1, Hal. 01-112.
- Arifin, B. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Baiti, Astriana. 2007. Keberdayaan Keluarga Di Perkotaan dan Pedesaan: Kasus Keluarga Di Kecamatan Duren Sawit dan Kecamatan Jasinga (Disertasi) SPs Institut Pertanian Bogor.
- Bank Dunia. 2007. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.* (Terjemahan) Penerbit: *The World Bank*
- Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2007, *Penduduk Fakir Miskin Indonesia, BPS, Jakarta Indonesia*
- Biro Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2005. *Sulawesi Selatan dalam Angka.* Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan
- _____. 2005. *Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin.* Jakarta: Biro Pusat Statistik
- Bryant, C and White, L.G, 1982. *Managing Development in The Third World,* Boulder Colorado: Westview Press.
- Cartwright, Dorwin, and Alvin Zander. 1968. *Group Dinamic. Research and Theory.* New York, Harper & Row, Publishers

- Christenson, James A and Jerry Robinson. 1989. *Community Development in Perspective*, Ames: Iowa State University Press
- Daniel, M, Darmawati, dan Nieldalina. 2008. *PRA Participatory Rural Appraisal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Pertanian, 2000. Pedoman Umum Pemberdayaan Kelompok Tani Seri I dan II. Jakarta: P2BPP-BPSDMPP Departemen Pertanian RI
- Djoko Sutrisno. 2006. "Pemberdayaan Pejabat Struktural Kepegawaian Pemerintah terhadap Produktivitas yang Bermutu di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Yogyakarta." Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Fagan, P.F., 1995. *The Real Root Causes of Violent Crime; the Breakdown of Mariage, Family and Community*
- Faisal, Sanapiah. 1981. *Gerakan Bangun Diri Masyarakat*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Farozin, M., dan Kartika N. 2004. *Pemahaman Tingkah Laku*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fukuyama, F. 2002. *The Great Disruption: Hakekat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*. Penerjemah : Ruslani. Yogyakarta: Penerbit Qalam
- Ginting, Rata. 1999. "Peranan Pemimpin Informal dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa." Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor
- Gunawan, Febri. 2000. "Hubungan antara Karakteristik, Tingkat Pendapatan dan Interaksi Sosial pada Pemuda Sirkulator (Studi Kasus Desa Cibatok II, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, Jawa Barat)." Skripsi. Program Sarjana Departemen Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
- Gunawan dan Sugiyanto, 2008. *Kondisi Keluarga Fakir Miskin (Penelitian Kasus di 17 Provinsi)*, Jakarta: Balitbang Depsos RI
- Haiman, Franklin S. 1951. *Group Leadership and Democratic Action*. Massachusetts, Houghton Mifflin Company

- Hakim, Lukman. 2002. *Sasaran dan Strategi Pembangunan Pedesaan*, (Jurnal Ilmiah Perspektif) Vol.1 Nomor 1 Tahun 2002, Makassar: LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hansen, Gary E. 1973. *The Politics and Administration Agriculture Development in Indonesia, The Case of Agriculture Center For Southeast Asia Studies*, University of California Barkeley
- Horton, Paul B., & Chester L. Hunt, 1991. *Sosiologi*, 6th Edition (terjemahan), Jakarta: Erlangga
- Idianto, M. 2004. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*, Australia: Longman.
- Indrawijaya, Adam I. 1986. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru
- Isbandi Rukminto Adi. 2003. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Jomo, W.F. 1986. *Membangun Masyarakat*. Bandung: Alumni
- Kartasasmita, G., 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairuddin, 1997. *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru
- Krysan, M. Moore, K. dan Zill, N. 1990. *Identifying Succesful Family: An Overview of Constructs and Selected Measures*, Washington DC: Child Trends Inc.
- Kumorotomo, W., dan A.M. Subando. 1996. *Sistem Informasi Managemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Lau, James B., dan A.B. Shani. 1992. *Behavior in Organizations: An Experiential Approach*. Boston: Irwin.
- Mar'at, 1981. *Sikap Manusi: Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press

- Margono, Slamet. 2005. *Kelompok, Organisasi dan Kepemimpinan*. Tidak Dipublikasikan. Bogor: Program Studi PPN IPB Press
- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES
- Mujiyadi. B. dan Gunawan. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat miskin (Suatu Kajian terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri)* dalam *Informasi* Vol .5 No. 1 Januari 2000. Balitbang Depsos RI. Jakarta
- Mulyana, Deddy. 2001. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Munadah, Agussalim. 2005. "Perilaku Birokrasi Orang Makassar di Kabupaten Gowa." Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin Makassar
- Narwoko, J.Dwi dan Bagong Suyanto, 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media.
- Nasdian, F.T. 2003. *Pengembangan Masyarakat (Community Development)*. Bahan Kuliah Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi. Institut Pertanian Bogor
- Nasikun, 1995, *Kemiskinan di Indonesia Menurun*, dalam *Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasannya*, (Bagong Suyanto, ed), Airlangga University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1985. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa (Disertasi)*, Yogyakarta: P3PK Universitas Gajah Mada
- _____, 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta
- North, Douglas C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic and for A Turn Toward the Local*. San Fransisco: Sierra Club Books
- Ohama, Yutaka. 2002. *Participatory Local Social Development*. Nagoya: JICA
- Parsons, Talcott, 1960. *Structure and Process in Modern Societies*, Glencoe: The Free Press
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen dan Santos H. Hernandez. 1994. *The Integration of Social Work Practice*, California: Brooks/Cole
- Poerwadarminta, WJS, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka

- Purnaningsih, Ninuk. 2006. *"Adopsi Inovasi Pola Kemitraan Agribisnis Sayuran Di Propinsi Jawa Barat."* Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor
- Republik Indonesia. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- Rogers, E.M. 1983. *Diffusion of Innovation*. New York: The Free Press. A Division of Macmillan Publishing Coy, Inc.
- Sarman, Mukhtar dan Sayogyo, 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Puspa Swara
- Saefuddin, Asep, dkk. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Setiawan, A.P. 2003. *Kelompok Organisasi dan Kepemimpinan*. Bogor: Tirta Kencana
- Siagian, S.P. 1982. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sihite, Romawiy. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Sosiologi Kelompok*. Bandung: Remadja Karya
- Soesanto, A. 1985. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Cipta.
- Sudiyanto. 2005. "Memberdayakan Sumber Daya Manusia Petani." *Makalah Seminar Pengembangan Sumber Daya Manusia*. 21 September 2005 Program Studi Penyuluhan Pembangunan IPB Bogor
- Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Thomas, V. 2001. *The Quality of Growth*. Alih Bahasa: Marcus Prihminto Widodo. Editor: Y. Dwy Helly Purnomo. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Uchrowi, Zaim. 2006. *"Model Ketahanan Kelompok Tani di Jawa."* Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor

Umar, Husein. 2004. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Undang-Undang No.7/1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Uphoff, N. 1988. *Local Institutional Development*. Fransisco: Cornell University Press

Van den Ban, A.W, dan H.W. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. (Terjemahan) oleh: Agnes Dwina Herdiasti. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Warnaen, S. 2002. *Stereotip Ethnis dalam Masyarakat Multietnis*. Yogyakarta : Mata Bangsa Bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation

Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijo, 2007. *Managemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT Komputindo Gramedia

Yustina, Ida dan Adjat Sudradjat (Penyunting). 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, Bogor: IPB Press

Internet

Gunadi, Paul. 2007. Kekerasan dalam Rumah Tangga. <http://www.telaga.org/2/7/2008 9:43>

Merry, Sally E. 2007. Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisa Perbandingan antara Indonesia dan India. <http://jurnalhukum.blogspot.com/2/7/2008 9:27>

Widyatmoko 2006. Nasib Petani Sekarang Ini. [http://www.trubus-online.com/ctrl+click to follow link \(13 Juli 2007\)](http://www.trubus-online.com/ctrl+click to follow link (13 Juli 2007))

Sohrah, A. Baso. 2007. Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat, <http://www.scriptintermedia.com/2/7/2008 9:52>



BIODATA PENULIS

Penulis dilahirkan di Makassar pada tanggal 19 Agustus 1961 sebagai putera kelima dari delapan bersaudara. Pada tahun 1986, menyelesaikan studi S1. Saat menempuh program sarjana, penulis aktif sebagai Ketua Lembaga Pendidikan dan Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Islam Makassar.

Sejak tahun 1987, penulis bertugas sebagai dosen Kopertis Wilayah IX Dpk Universitas Muhammadiyah Makassar. Mata kuliah yang diajarkan antara lain: Administrasi Pembangunan, Perilaku Organisasi, Sistem Informasi Manajemen, Kebijakan Pembangunan Regional, Pengantar Statistik dan Manajemen Strategik. Pada semester ganjil Tahun 2005 menjadi Asisten Mata Kuliah Metode Penelitian pada Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan IPB. Selama bertugas sebagai tenaga pengajar di Unismuh Makassar, penulis diamanahi pula tugas struktural sebagai ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara tahun 1991-1997, Pembantu Dekan I tahun 1997-2000, Kepala Biro Administrasi Akademik tahun 2000-2001, Sekretaris Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Unismuh Makassar tahun 2001-2004, dan Sekretaris Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmiah Perspektif Unismuh hingga tahun 2005.

Penulis menyelesaikan program Magister tahun 1996 pada Program Studi Administrasi Pembangunan di Universitas Hasanuddin. Dengan minat yang tinggi pada studi-studi pembangunan, maka pada tahun 2007 penulis lulus menempuh Program Doktor pada Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan dengan keahlian Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*) Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Tulisan ilmiah yang dipublikasikan antara lain adalah Sasaran dan Strategi Pembangunan Pedesaan (Jurnal Ilmiah Perspektif, 2002), Komunikasi Persuasi dalam Penyuluhan Pembangunan: Kajian Teoritis dalam Masyarakat Pedesaan (Jurnal Ilmiah Perspektif, 2003), Perubahan Sosial pada Masyarakat di Sekitar Penambangan Emas Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor (Jurnal Ilmiah Perspektif, 2005). Model Pengembangan Usaha Masyarakat Pesisir (Jurnal Penelitian Balitbangda Sulsel, 2009). *The Local Governments Ability to Develop Regional Potential Area Based on Seed and Competitiveness* (International Journal of Academic Research, 2015), *Public Participation in the Development of Leading Sector of Agriculture and Fisheries in Pangkep Regency* (Mediterranean Journal of Social Science, 2015), *The Development of Auction Licysgovernments In Makassar City* (IQSR Journal of Humanities and Social Science, 2016), *Development Of Competency, Job Performance, Commitment And Integrity At Government Of Makassar City* (Innovation Journal, Public Sector Innovation Journal, 2017). Aktif pula sebagai tim peneliti dan kegiatan pengabdian masyarakat. Penelitian mulai tahun 2009-2017. Semua biaya penelitian selama 8

tahun terakhir sepenuhnya biaya hibah pascasarjana kemenristek dikti. Penelitian tahun 2017 adalah Pengembangan Kebijakan Lelang Jabatan Pemerintah Kota Makassar. Selain penelitian ada pula beberapa buku referensi dan prosiding yang telah rampung penerbitannya.